



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**ANALISIS MANFAAT PELAKSANAAN BLM-PUAP OLEH LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS TERHADAP USAHATANI PADI
SAWAH ANGGOTA (STUDI KASUS : LKM-A AGRO FLORIS
GAPOKTAN AGRO FLORIS KEC. KOTO TANGAH KOTA PADANG)**

SKRIPSI



**PUJA PRATAMA PUTRA
0810222094**

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2012**

**ANALISIS MANFAAT PELAKSANAAN BLM-PUAP OLEH
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS TERHADAP
USAHATANI PADI SAWAH ANGGOTA (STUDI KASUS :
LKM-A AGRO FLORIS PRIMA GAPOKTAN AGRO FLORIS
KEC.KOTO TANGAH KOTA PADANG)**

OLEH

**PUJA PRATAMA PUTRA
0810222094**

SKRIPSI

**SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
UNTUK MEMPEROLEH GELAR
SARJANA PERTANIAN**

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2012**

**ANALISIS MANFAAT PELAKSANAAN BLM-PUAP OLEH
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS TERHADAP
USAHATANI PADI SAWAH ANGGOTA (STUDI KASUS :
LKM-A AGRO FLORIS PRIMA GAPOKTAN AGRO FLORIS
KEC.KOTO TANGAH KOTA PADANG)**

OLEH

**PUJA PRATAMA PUTRA
0810222094**

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing I



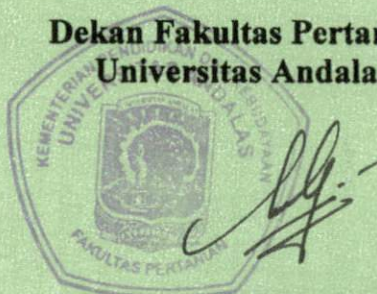
**Dr.Ir.Endry Martius,MSc
Nip.195910311986031005**

Dosen Pembimbing II



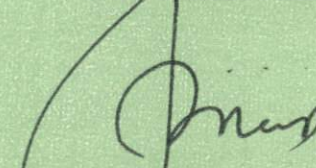
**Ir.Dwi Evaliza, MSi
Nip.196204111989032001**

**Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Andalas**



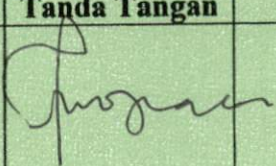
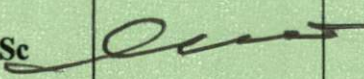

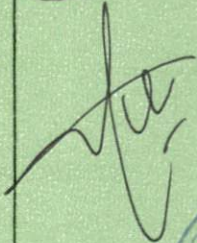
**Prof. Ir. H. Ardi, M.Sc
NIP. 19531216 198003 1 004**

**Ketua Jurusan Sosial Ekonomi
Fakultas Pertanian
Universitas Andalas**



**Prof. Ir. Yonariza, M.Sc, PhD
NIP. 19650505 199103 1 003**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Pertanian Universitas Andalas Pada tanggal 129 Oktober : 2012

No.	Nama	Tanda Tangan	Jabatan
1.	Dr. Ir. H. Nofialdi, M.Si		Ketua
2.	Dr.Ir.Endry Martius, M.Sc		Sekretaris
3.	Ir.Dwi Evaliza, M.Si		Anggota
4.	Ferdhinal Asful, SP, M.Si		Anggota



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu? Dan Kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu, yang memberatkan punggungmu. Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

(QS. Alam Insyrah Ayat 1-8)

Dari lubuk hati yang terdalam kupersembahkan karya kecil ini sebagai bukti dan tanda terima kasihku atas ketulusan, kasih sayang, pengorbanan dan do'a dari Ibunda Suryati Basir dan Ayahanda Amrizal Rahman yang telah memberikan semangat dan dorongan kepadaku untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Kepada teman-temanku terima kasih atas dukungan, semangat dan do'anya selama ini. Kepada Adikku Pandu, Annisa dan Adinda, terima kasih karena telah menjadi penyemangatku. Terima kasih kepada teman-teman COA dan semoga kita selalu kompak. Serta kepada Bapak Wo Noda dan Uncu, terima kasih telah membantu mengirimkan do'a untuk kelancaran studiku.

Semoga keberkahan selalu dilimpahkan ALLAH SWT kepada kita yang selalu mensyukuri nikmat-Nya. Dan semoga keberhasilan ini menjadi awal yang baik untuk perjalanan hidupku meraih kesuksesan dimasa depan.
Amiiin.....!!!!

BIODATA

Penulis dilahirkan di Solok pada tanggal 5 Februari 1991 sebagai anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Amrizal Rahman dan Suryati Basir Spd. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) ditempuh di SD ADABIAH Padang (1996-2002). Sekolah Menengah Pertama (SMP) ditempuh di SMP Negeri 30 Padang (2002-2005). Sekolah Menengah Atas (SMA) ditempuh di SMA DIAN ANDALAS Padang (2005-2008). Pada tahun 2008, penulis diterima di Fakultas Pertanian Universitas Andalas Program Studi Agribisnis.

Padang, November 2012

Puja Pratama Putra

KATA PENGANTAR



Kalimat puji dan rasa syukur penulis serahkan hanya kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada ummat-Nya, sehingga dengan izin-Nya penulis telah dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul: **“Analisis Pelaksanaan BLM-PUAP oleh Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Terhadap Usahatani Padi Sawah Anggota (Studi Kasus : LKM-A Agro Floris Prima Gapoktan Agro Floris Kec. Koto Tangah Kota Padang)”**.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Ir. Endry Martius, M.Sc. dan Ir. Dwi Evaliza, MSi. sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Ir. Osmet, M.Sc, Bapak Prof.Ir.Yonariza,MSc,PhD, dan Bapak Ferdhinal Asful, SP, MSi selaku dosen penguji dan dosen undangan atas masukan, saran dan penilaian yang telah diberikan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Kepada Bapak Jamaris, SP, selaku Ketua Pengurus Gapoktan Agro Floris, Bapak Rustam selaku manajer LKM-A dan Ibu Darniwilis selaku pengelola LKM-A Agro Floris Prima, terima kasih yang tak terhingga penulis rangkai dalam kalimat ini, kerjasama dan bantuan Bapak/Ibu menjadikan penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih juga yang setulusnya kepada teman-teman Agribisnis angkatan 2008 dan teman-teman se-pembimbing, khususnya Adelova, S.P, Sescholy SP, Aseh S.P, Yesa Puspita ,S.P , Didi Al-Amin, Rizki Adidji serta teman-teman COA lainnya yang telah memberikan semangat pada penulis agar secepatnya menyelesaikan skripsi ini. Penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada kedua orang tua yang telah memberikan dorongan, semangat, dan doa dengan tulus dan ikhlas untuk penulis.

Selayaknya karya manusia biasa, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan-kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan masukan, kritikan, dan saran dari semua pihak agar kekurangan tersebut dapat diperbaiki dimasa mendatang. Penulis mengharapkan skripsi ini dapat memenuhi fungsinya dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dengannya.

Padang, November 2012

P. P. P

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian ..	7
1.4. Manfaat Penelitian..	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian Kredit Mikro	9
2.2. Tinjauan Tentang Kredit Pertanian.....	15
2.3. Tinjauan Tentang Simpan Pinjam.....	18
2.4. Lembaga Keuangan Mikro dan Manfaatnya.....	19
2.5. Penumbuhan LKM-A.....	21
2.6. Sistem Pengelolaan Dana LKM-A.....	23
2.7. Kedudukan dan Fungsi LKM-A dalam Gapoktan.....	25
2.8. BLM-PUAP.....	27
2.9. Penelitian Terdahulu	31
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian	33
3.2. Metode Penelitian	33
3.3. Teknik Pengambilan Responden	34
3.4. Metode Pengumpulan Data	37
3.5. Variabel yang Diamati	38
3.6. Analisa Data	39
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran umum wilayah kerja LKM-A Agro Floris Prima	
4.1.1. Penduduk dan potensi Kelurahan Lubuk Minturun.....	40

4.1.2. Mata Pencaharian Penduduk Di Lubuk Minturun.....	41
4.1.3. Sarana Di Kelurahan Lubuk Minturun Sungai Lareh.....	42
4.1.4. Pertanian Di Kelurahan Lubuk Minturun.....	43
4.2. Identitas Petani Sampel.....	43
4.3. Profil LKM-A Agro Floris Prima.....	46
4.3.1. Sejarah dan Tujuan Pendirian LKM-A Agro Floris.....	46
4.3.2. Organisasi	47
4.3.3. Permodalan	50
4.3.4. Keanggotaan	51
4.3.5. Usaha dan Perkembangannya	54
4.4. Deskripsi Pelaksanaan Simpan-Pinjam Dana Program BLM- PUAP di LKM-A Agro Floris Prima.....	55
4.4.1. Penetapan Prosedur dan Persyaratan Simpan-Pinjam.....	55
4.4.2. Penetapan Bunga Pinjaman.....	58
4.4.3. Pelaksanaan Simpan-Pinjam.....	60
4.4.4. Rencana dan Realisasi Pencairan dan Penggunaan Dana BLM-PUAP kepada Anggota.....	65
4.4.5. Hambatan Pelaksanaan Simpan-Pinjam BLM-PUAP....	69
4.4.6. Pencatatan dan Pelaporan Keuangan oleh LKM-A Agro Floris Prima.....	72
4.5. Analisis Manfaat BLM-PUAP Bagi Aktivitas Usahatani Padi Sawah Anggota.....	74
4.5.1. Sumber Permodalan.....	74
4.5.2. Jumlah Pinjaman yang Diberikan.....	77
4.5.3. Penggunaan Dana Pinjaman	84
4.5.4. Waktu Penyaluran Pinjaman.....	85
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	88
5.2. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

<u>Tabel</u>		<u>Halaman</u>
1	Rincian Petani Sampel.....	35
2	Rincian Informan Kunci.....	36
3	Jenis data, teknik dan sumber data	37
4	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kelurahan Lubuk Minturun Sungai Lareh.....	41
5	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Kelurahan Lubuk Minturun Sungai Lareh.....	42
6	Sarana Di Kelurahan Lubuk Minturun Sungai Lareh.....	43
7	Identitas Petani Responden.....	44
8	Keadaan Modal Awal LKM-A per Januari 2010.....	50
9	Jumlah Anggota LKM-A Menurut Jenis Usaha	52
10	Perkembangan Dana BLM-PUAP di LKM-A.....	54
11	Jumlah Total Simpanan Anggota Per Mei 2012.....	56
12	Proses Pembuatan Rencana Usaha Gapoktan Agro Floris.....	66
13	Rencana dan Realisasi Pencairan Penggunaan Dana PUAP.....	67
14	Kendala Pelaksanaan Simpan-Pinjam Dana PUAP di LKM-A..	70
15	Sumber Permodalan Petani Responden.....	76
16	Biaya dan Persentase Dana PUAP yang digunakan Saprodi.....	78
17	Jumlah Rata-Rata Biaya yang Dibayarkan Petani Responden...	80
18	Perbandingan Pemakaian Input-Input dan Produksi dengan Standar Pada Daerah Penelitian.....	81
19	Kontribusi Kredit Terhadap Usahatani Padi Sawah.....	83
20	Penggunaan Dana Kredit Diluar Kebutuhan Usahatani Oleh Petani Responden.....	85
21	Cara Pembayaran Pinjaman Dari LKM-A oleh Responden.....	87

DAFTAR GAMBAR

<u>Gambar</u>		<u>Halaman</u>
1	Kedudukan LKM-A dan usaha otonom lainnya dalam Gapoktan.....	27
2	Alur Pembinaan dan Pengendalian PUAP.....	31

DAFTAR LAMPIRAN

<u>Lampiran</u>	<u>Halaman</u>
1 Kuota lokasi penerima PUAP menurut propinsi tahun 2008.....	93
2 Gapoktan Penerima Dana PUAP di Kota Padang.....	94
3 Daftar Nama dan Jumlah Poktan di Gapoktan Agro Floris.....	95
4 Jumlah Petani Padi Sawah Pengguna Dana BLM-PUAP.....	96
5 Rencana Usaha Bersama (RUB).....	97
6 Perkembangan Dana PUAP di LKM-A Agro Floris Prima.....	98
7 Struktur Organisasi LKM-A Agro Floris Prima.....	99
8 Surat Rekomendasi Pinjaman.....	100
9 Surat Persetujuan Peminjaman.....	101
10 Surat Permohonan Pembiayaan.....	102
11 Surat Perjanjian Pinjaman.....	103
12 Prosedur Permohonan dan Pencairan Dana BLM-PUAP.....	105
13 Perbandingan Bunga LKM-A dengan Bunga Bank Umum.....	106
14 Sumber Permodalan Petani Responden.....	107
15 Identitas Responden Petani Padi Sawah.....	108
16 Biaya Penggunaan Pupuk oleh Petani Responden.....	109
17 Biaya Penggunaan Obat Oleh Petani Responden.....	111
18 Total Biaya Saprodi Petani Responden.....	112
19 Biaya Bibit Petani Responden.....	113
20 Biaya TKLK Petani Petani Responden.....	114
21 Biaya Sewa Mesin Petani Responden.....	116
22 Biaya Pajak Petani Responden.....	117
23 Total Biaya Yang Dibayarkan Oleh Petani Responden.....	118
24 Produksi Padi Sawah Petani Responden.....	119
25 Rekomendasi Pemakaian Input dan Estándar Produksi Padi Sawah Di Daerah Penelitian.....	120
26 Persentase Kontribusi Jumlah Kredit BLM-PUAP Terhadap Usahatani..	121
27 Penggunaan Dana Kredit Oleh Responden.....	122
28 Jangka Waktu Pencairan Kredit BLM-PUAP oleh LKM-A.....	123

29	Cara Pembayaran Kredit BLM-PUAP Oleh Petani Responden.....	124
30	Matriks Data Set Penelitian	125

ANALISIS MANFAAT PELAKSANAAN BLM-PUAP OLEH LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS TERHADAP USAHATANI PADI SAWAH ANGGOTA (STUDI KASUS : LKM-A AGRO FLORIS PRIMA GAPOKTAN AGRO FLORIS KEC. KOTO TANGAH KOTA PADANG)

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan kegiatan simpan-pinjam BLM-PUAP dan manfaatnya terhadap kegiatan usahatani padi sawah anggota Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan melalui *key informan* yang terdiri dari: a) Penyelia Mitra Tani (PMT); b) Penyuluh Pendamping; c) Pengelola LKM-A; dan d) Pengurus Gapoktan. Sampel dalam penelitian ini adalah 30 orang petani anggota LKM-A Agro Floris Prima yang mengusahakan usahatani padi sawah. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan simpan-pinjam BLM-PUAP oleh LKM-A dan menganalisis manfaat BLM-PUAP bagi aktivitas usahatani padi sawah anggota.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa secara keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan simpan-pinjam BLM-PUAP di LKM-A Agro Floris Prima telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Pedoman Umum PUAP. Hal ini dibuktikan dengan proses penetapan prosedur dan persyaratan yang mudah, bunga pinjaman cukup ringan dan berdasarkan ketetapan bersama, proses pelaksanaan simpan-pinjam yang berjalan lancar, tidak terjadinya kemacetan dalam pengembalian pinjaman. Selanjutnya terdapat perubahan sumber modal usahatani petani responden setelah adanya penyaluran dana PUAP di LKM-A Agro Floris Prima, dimana sebelum adanya dana PUAP, petani responden selain menggunakan modal sendiri juga menggunakan pinjaman modal dari rentenir. Namun setelah adanya penyaluran dana PUAP, penggunaan pinjaman modal dari rentenir menjadi berkurang karena pinjaman dari LKM-A mampu memutus ketergantungan petani terhadap rentenir yang bersifat eksploitatif. Selain itu jika dibandingkan dengan rekomendasi pemakaian input-input produksi, setelah adanya BLM-PUAP masih belum ada perbaikan berarti terkait penggunaan input-input produksi sesuai dengan rekomendasi yang ada. Hal ini berdampak pada produksi padi sawah petani yang belum sesuai dengan standar produksi potensial produksi padi sawah disana.

Sehubungan dengan hasil penelitian tersebut, disarankan LKM-A Agro Floris Prima untuk melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan lain agar semakin berkembang karena keberadaannya yang cukup berpotensi serta melakukan pembinaan terhadap anggota agar pelaksanaan kegiatan simpan-pinjam dapat lebih baik lagi. Disamping diharapkan pemerintah dapat memperpendek jalur birokrasi pencairan program bantuan agar dapat terealisasi dan digunakan sesuai harapan.

**Implementation Analysis of Rural Agribusiness Development Program
(Case Study on LKM-A Agro Floris Prima Gapoktan Agro Floris at
Koto Tengah Padang Sub District)**

ABSTRACT

The study focused on the implementation of Rural Agribusiness Development Program and its impact on rice farming in the research area. Data were gathered from key informants that consist of: a) The supervisor of Mitra Tani (PMT), b) agricultural extension; c) The manager of LKM-A and Gapoktan. The purposes of this study are to describe the implementation of Rural Agribusiness Development Program and to analyze the benefits of the program to the farmers.

The finding shows that the implementation of saving and loan on LKM-A Florist Agro Prima is in accordance to the General Guidelines of the program. It can be seen from the simple procedures and the requirements, a low interest rate, the process of the savings and loans went smoothly, and there is no unpaid loan. Furthermore, after Rural Agribusiness Development Program mostly the resource of the farmers fund come from the program, whereas beforehand the resources of fund were the farmer's own asset and moneylenders. However there is no difference in production before and after the program.

Therefore, it can be suggested to the LKM-A Florist Agro Prima to improve the collaboration with the other financial institutions in order to give a better service for the customers. Besides that, the government is expected to cut the bureaucracy and provide an easier way for farmers to get loan.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting dalam pembangunan nasional karena sektor ini menyerap sumber daya manusia yang paling besar dan merupakan sumber pendapatan mayoritas penduduk Indonesia. Peranan sektor pertanian di Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Pemerintah memberikan amanat bahwa prioritas pembangunan diletakan pada pembangunan bidang ekonomi dengan dititik beratkan pada sektor pertanian (Soekartawi, 1995).

Kegiatan perekonomian di pedesaan masih didominasi oleh usaha-usaha skala mikro dan kecil dengan pelaku utama para petani, buruh tani, pedagang sarana produksi dan hasil pertanian, pengolah hasil pertanian, serta industri rumah tangga. Namun demikian para pelaku usaha ini masih dihadapkan pada masalah klasik yaitu terbatasnya ketersediaan modal. Sebagai unsur esensial dalam mendukung peningkatan produksi dan taraf hidup masyarakat pedesaan, keterbatasan modal dapat membatasi ruang gerak aktivitas sektor pertanian dan pedesaan. Dalam jangka panjang kelangkaan modal bisa menjadi *entry point* terjadinya siklus rantai kemiskinan pada masyarakat petani/pedesaan yang sulit untuk diputus (Hamid, 1986).

Ciri khas dari kehidupan petani adalah perbedaan pola penerimaan, pendapatan, dan pengeluarannya. Hasil produksi hanya diterima petani setiap musim sedangkan pengeluaran harus diadakan setiap hari, setiap minggu atau kadang-kadang dalam waktu yang sangat mendesak seperti kematian, pesta perkawinan dan selamatan lain. Petani kaya dapat menyimpan hasil panen untuk kemudian dijual sedikit demi sedikit pada waktu diperlukan sedangkan petani gurem (tidak berlahan dan penguasaan lahan sempit) masih kesulitan untuk menyimpan hasil (Mubiyarto, 1973).

Hadisapoetra (1973) *cit* Rusbina (2010) menjelaskan bahwa sebagian besar petani padi sawah merupakan masyarakat miskin atau berpendapatan rendah, rata-rata pendapatan rumah tangga petani masih rendah, yakni hanya sekitar 30% dari total

pendapatan keluarga. Selain berhadapan dengan rendahnya pendapatan yang diterima petani, petani padi juga dihadapkan pada keterbatasan modal untuk menjalankan usahatani serta penurunan produksi dan produktivitas hasil pertanian mereka. Untuk itu keberadaan kredit sangat dibutuhkan oleh petani guna melaksanakan kegiatan usahatani. Dengan adanya kredit nantinya petani dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhan usahatani padi sawah mereka, hingga meningkatkan produksi dan pendapatan petani nantinya.

Sekitar 70% petani padi Indonesia terutama petani-petani gurem diklasifikasikan sebagai masyarakat miskin berpendapatan rendah. Keberadaan kredit benar-benar dibutuhkan oleh petani untuk tujuan produksi, pengeluaran hidup sehari-hari sebelum hasil panen terjual dan untuk pertemuan sosial lainnya. Dikarenakan penguasaan lahan tergolong sempit, upah yang mahal dan kesempatan kerja terbatas di luar musim tanam, sebagian besar petani tidak dapat memenuhi biaya hidupnya dari satu musim ke musim lainnya tanpa pinjaman. Kredit sudah menjadi bagian hidup dan ekonomi usahatani, bila kredit tidak tersedia tingkat produksi dan pendapatan usahatani akan turun drastis (Suryana, *dkk.*, 2001).

Sudaryanto (2000) *cit* Rozany (2006) menjelaskan bahwa untuk memberdayakan masyarakat golongan ekonomi lemah atau sektor usaha kecil adalah dengan menyediakan sumber pembiayaan usaha yang terjangkau. Salah satu strategi pembiayaan bagi golongan ini adalah kredit mikro. Masalah utama dalam penyediaan kredit ke petani gurem adalah adanya jurang pemisah antara penyaluran dengan penerimaan kredit. Banyak lembaga permodalan dengan berbagai skim kreditnya ditawarkan ke petani, tetapi pada kenyataannya hanya dapat diakses oleh kelompok masyarakat tertentu sedangkan petani kecil masih tetap kesulitan.

Menurut Umali (1978) *cit* Supriatna (2003), selama ini lembaga keuangan formal hanya memiliki sedikit perhatian kepada orang miskin pedesaan dalam hal memberikan pinjaman. Hal ini disebabkan karena : (a) petani tidak memiliki jaminan sertifikat tanah, (b) pembayaran secara bulanan tidak sesuai dengan usahatani padi yang memberikan siklus produksi musiman dan (c) petani kecil umumnya belum familier dengan prosedur administrasi yang rumit. Sekarang ini, lembaga formal

hanya dimanfaatkan oleh kelompok petani kaya seperti pemilik penggilingan padi, pedagang input produksi dan pelaku bisnis lainnya. Sebaliknya, petani kecil hanya dapat akses kepada lembaga kredit informal karena tidak mensyaratkan jaminan dan prosedur perolehan sangat mudah, meskipun lembaga ini menetapkan suku bunga yang tinggi antara 24%-80% persen per tahun.

Untuk menjawab permasalahan keterbatasan modal maka perlu lebih mengoptimalkan potensi lembaga keuangan yang dapat menjadi alternatif sumber dana bagi petani dan masyarakat pedesaan. Salah satu lembaga keuangan yang dapat dimanfaatkan dan didorong untuk membiayai kegiatan perekonomian di pedesaan yang mayoritas usaha penduduknya masuk dalam segmen mikro adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Lembaga keuangan mikro memiliki kelebihan yang paling nyata, yaitu prosedurnya yang sederhana, tanpa jaminan, hubungannya yang cair (*personal relationship*), dan waktu pengembalian kredit yang fleksibel (*negotiable repayment*). Karakteristik itu sangat sesuai dengan ciri pelaku ekonomi di pedesaan (khususnya di sektor pertanian) yang memiliki aset terbatas, tingkat pendidikan rendah dan siklus pendapatan yang tidak teratur (bergantung panen) (Ashari 2006).

Para petani beranggapan bahwa lembaga ini memiliki prosedur administrasi sederhana, pencairan pinjaman cepat/tepat waktu sesuai kebutuhan tetapi dengan tingkat bunga lebih tinggi. Namun demikian, penilaian petani terhadap tingkat bunga sangat relatif. Beberapa di antara mereka beranggapan bahwa dengan kesediaan memberikan pinjaman lebih diartikan sebagai “bantuan” atau “pertolongan” terhadap mereka dalam mengatasi masalah pembiayaan usahatani (Hastuti, 2006), sehingga tingkat bunga yang harus dibayar lebih tinggi dianggap sebagai balas jasa dan merupakan hal yang wajar dan tidak memberatkan.

Salah satu diantara kebijakan alternatif yang saat ini sedang dijalankan oleh pemerintah untuk mempercepat tumbuh dan berkembangnya usahatani khususnya usaha agribisnis sekaligus mengurangi kemiskinan dan pengangguran di pedesaan adalah Program Bantuan Langsung Masyarakat untuk Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLM-PUAP). Program ini terintegrasi dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-M) yang dicanangkan Bapak

Presiden RI pada tanggal 30 April 2007 di Palu Sulawesi Tengah (Departemen Pertanian, 2008).

Program PUAP merupakan bentuk fasilitas bantuan modal usaha untuk anggota kelompok tani, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani. Program yang ditujukan untuk memberdayakan masyarakat ini mempunyai fokus pemberdayaan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis. Oleh karena itu sebagai syarat utama PUAP adalah keberadaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai kelembagaan pelaksana PUAP untuk menyalurkan bantuan modal usaha bagi anggota (Departemen Pertanian, 2008).

Pengalaman menunjukkan bahwa dana bantuan selama ini sulit digulirkan dan bahkan cenderung tidak produktif, karena tidak adanya lembaga yang mengelola keuangannya. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadikan dana PUAP sebagai penguatan modal atau dana awal untuk penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A). LKM-A diharapkan sebagai lembaga pengelola dana PUAP agar menjadi produktif dan efektif untuk kepentingan usaha masyarakat tani dan khususnya masyarakat miskin. LKM-A secara bertahap berkembang menuju lembaga keuangan mikro yang profesional, melalui pendampingan oleh Penyelia Mitra Tani (PMT) dan Penyuluh Pendamping. Sasaran akhirnya adalah LKM-A yang berada dibawah naungan gapoktan menjadi lembaga keuangan yang mampu mendorong pembangunan ekonomi Nagari dalam arti luas (BPTP Sumatera Barat, 2009).

Gapoktan Agro Floris yang terletak di Kelurahan Lubuk Minturun Kecamatan Koto Tengah adalah salah satu gapoktan penerima dana BLM PUAP tahap I bersama gapoktan lain di Kota Padang. Menurut Penyelia Mitra Tani (PMT) Kota Padang, gapoktan ini termasuk kategori baik dalam perkembangan Gapoktan dan pengelolaan dana BLM PUAP di Kota Padang. Gapoktan Agro Floris mengelola dana BLM PUAP ini melalui unit usaha Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) "Agro Floris Prima".

1.2. Perumusan masalah

Permasalahan mendasar yang dihadapi petani selama ini adalah kurangnya akses kepada sumber permodalan yang umumnya masih lemah. Padahal ketersediaan dana yang cukup untuk membiayai kebutuhan modal kerja maupun investasi merupakan syarat mutlak dalam usaha pertanian, sehingga usaha dapat berjalan dengan optimal dan tumbuh berkembang secara progresif dan kesejahteraan petani dapat ditingkatkan. Kebutuhan modal selama ini dapat berasal dari modal sendiri (*self financing*), bantuan pemerintah dalam bentuk modal bergulir (*support financing*), serta dari lembaga keuangan dalam bentuk pembiayaan (*external financing*).

Dalam menyikapi keterbatasan modal petani, pemerintah menjawabnya dengan program-program Pembangunan Jangka Menengah (2005-2009) yang fokus pada pembangunan pertanian di perdesaan yaitu program PUAP sebagai penguatan modal atau dana awal untuk penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A). LKM-A ini nantinya diharapkan sebagai lembaga pengelola dana PUAP agar menjadi produktif dan efektif untuk kepentingan usaha masyarakat tani dan khususnya masyarakat miskin, yang mana salah satu indikator keberhasilan PUAP ini adalah meningkatkan pendapatan petani, buruh tani dan rumah tangga tani melalui agribisnis sesuai potensi daerah (Departemen Pertanian, 2008).

Selama ini keberadaan lembaga keuangan formal dengan bunga kredit yang ringan cenderung sulit untuk diakses oleh petani. Hal ini dikarenakan banyaknya persyaratan yang diberikan untuk mendapatkan pinjaman, petani tidak mempunyai jaminan agar bisa mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal, prosedur peminjaman yang dianggap berbelit-belit oleh petani, dan pola pembayaran yang tidak sesuai dengan penerimaan usaha tani. Sehingga petani cenderung beralih ke lembaga keuangan informal untuk membantu permodalannya. Bantuan kredit dengan bunga rendah tersebut lebih banyak jatuh kepada kelompok dengan penghasilan menengah ke atas. Pihak-pihak yang mendapatkan kredit itu nantinya akan bertindak sebagai lembaga kredit informal bagi petani, dimana bantuan kredit yang mereka dapatkan itu nantinya akan dipinjamkan lagi kepada petani kecil dengan bunga yang tinggi.

BLM-PUAP yang nantinya akan dikelola oleh LKM-A merupakan solusi bagi masalah permodalan yang dihadapi petani selama ini. Diharapkan BLM-PUAP ini dapat dikelola oleh LKM-A secara berkelanjutan, serta keberadaan LKM-A yang dekat dengan lingkungan petani, dalam jangka panjang dapat terus membantu aspek permodalan, karena sulitnya petani untuk mengakses pinjaman dari lembaga keuangan formal.

Gapoktan Agro Floris merupakan Gapoktan penerima dan pengelola dana PUAP bersama Gapoktan lain di Kota Padang (Lampiran 2). Gapoktan Agro Floris didirikan pada tanggal 31 Mei 2007 dengan jumlah kelompok tani sebanyak 12 kelompok dan 215 anggota (Lampiran 3), sedangkan LKM-A Agro Floris Prima dibentuk pada tanggal 13 April 2008 sebagai unit simpan pinjam dan pengelola keuangan Gapoktan Agro Floris. Anggota LKM-A penerima manfaat pada perguliran pertama BLM-PUAP adalah sebanyak 119 anggota yang berasal dari 8 kelompok tani yang tergabung dalam keanggotaan gapoktan dan LKM-A. Di Gapoktan Agro Floris rata-rata yang memanfaatkan dana BLM-PUAP ini adalah petani padi sawah. Semenjak digulirkannya dana BLM-PUAP kepada anggota LKM-A Agro Floris Prima, dana tersebut mengalami perkembangan sebagaimana ditunjukkan pada Lampiran 6, perkembangan modal usaha yang dikelola sampai bulan Mei 2012 sebanyak Rp.279.860.000,- termasuk didalamnya dana program BLM-PUAP sebesar Rp.100.000.000,-.

Adanya keterbatasan modal yang dialami oleh petani kecil merupakan sebuah tantangan besar yang harus ditangani. Dimana modal merupakan hal penting dalam pertanian, selama ini petani cenderung kekurangan modal untuk menjalankan usahanya. Di lain pihak, kondisi petani dengan segala keterbatasan membuatnya sulit mendapatkan bantuan kredit dari lembaga keuangan formal. Selain itu mekanisme peminjaman di lembaga keuangan formal dirasa terlalu berbelit belit oleh petani. Dengan adanya BLM-PUAP yang dikelola oleh LKM-A, maka LKM-A dapat memberikan kredit dengan syarat yang lebih mudah dan longgar kepada petani karena sifat LKM-A yang langsung berada di dekat petani, didirikan oleh petani, dikelola

oleh petani dan melayani petani, sehingga berperan sebagai lembaga alternatif untuk penyedia modal petani.

Berdasarkan uraian dan kondisi tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian guna mengetahui:

1. Apa saja aktivitas LKM-A Agro Floris Prima dalam melaksanakan BLM-PUAP ?
2. Sejauh mana manfaat BLM-PUAP yang dilaksanakan oleh LKM-A bagi usahatani padi sawah?

Untuk menjawab persoalan tersebut maka perlu dilakukan penelitian tentang **"Analisis Manfaat Pelaksanaan BLM-PUAP oleh Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis terhadap Usahatani Padi Sawah Anggota (Studi kasus: LKM-A Agro Floris Prima Gapoktan Agro Floris Kec. Koto Tangah Kota Padang)"**.

1.3. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah menganalisis manfaat yang dijalankan LKM-A Agro Floris Prima sebagai salah satu unit usaha otonom Gapoktan Agro Floris dalam mengelola dana BLM-PUAP bagi usahatani padi sawah anggota.

Secara rinci tujuan penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan simpan pinjam BLM-PUAP oleh LKM-A Agro Floris Prima.
2. Menganalisis manfaat BLM-PUAP yang dilaksanakan oleh LKM-A bagi usahatani padi sawah.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat yang berguna bagi :

1. Pemerintah, sebagai bahan evaluasi terhadap program yang sedang dijalankan, juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat dan

menetapkan program-program dimasa yang akan datang, khususnya program-program penguatan modal atau pembiayaan pertanian, serta penumbuhkembangan dan memberdayakan LKM-A.

2. LKM-A Agro Floris Prima dan Gapoktan Agro Floris, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam menjalankan usaha-usahanya, sehingga kelompok tersebut dapat lebih berkembang dan mandiri dengan adanya bantuan dari pemerintah.
3. Mahasiswa dan atau peneliti selanjutnya, penulis juga berharap penelitian ini dapat menambah bahan referensi dalam membahas lebih dalam tentang pembiayaan pertanian dan LKM-A.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kredit Mikro

Menurut Hamid (1986) istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan (*truth atau faith*), oleh karena itu dasar kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan, apa yang telah dijanjikan itu berupa barang, uang, atau jasa.

Menurut Mashudi (2003) dimaksud kredit adalah: "Penyediaan uang atas tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditentukan".

Dalam buku *Seluk Beluk Kredit Berdokumen Dan Peraturan Devisa* dijelaskan pengertian kredit menurut Undang-Undang Pokok Perbankan RI Tahun 1992 Tentang Perbankan, definisi kredit adalah: "Penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan yang telah ditetapkan" (Wijono, 2005).

Selanjutnya Rudy Trisanto dalam buku *Manajemen Perbankan Dasar Dan Kunci Keberhasilan Perekonomian*, mengemukakan bahwa: "Kredit adalah semua jenis pinjaman uang atau barang wajib dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam, pembayarannya bisa cicilan maupun sekaligus. Hal tersebut tergantung pada perjanjian yang telah disepakati oleh kreditur dan debitur". (Trisantoso, 1997:24).



Keuangan mikro dalam pengalaman tradisional masyarakat Indonesia seperti lumbung desa, lumbung pitih nagari dan sebagainya menyediakan pelayanan keuangan yang beragam seperti tabungan, pinjaman, simpanan, deposito maupun asuransi. Kedua, melayani masyarakat miskin karena memang pada awalnya keuangan mikro muncul dan berkembang akibat dari permasalahan mengenai sulitnya masyarakat kelas menengah kebawah untuk mengakses modal dari lembaga keuangan konvensional. Ketiga, menggunakan prosedur dan mekanisme yang fleksibel. Hal ini merupakan konsekuensi dari masyarakat yang dilayani, sehingga prosedur dan mekanisme yang dikembangkan oleh sistem keuangan mikro akan selalu kontekstual dan fleksibel (Sudaryanto, 2000).

Selanjutnya, menurut Ashari (2006) bentuk LKM dapat berupa: (1) lembaga formal misalnya bank desa dan koperasi, (2) lembaga semiformal misalnya organisasi non pemerintah, dan (3) sumber-sumber informal misalnya pelepas uang atau rentenir. Hal lain yang perlu diperhatikan dari LKM adalah LKM dikembangkan berdasarkan semangat untuk membantu dan memfasilitasi masyarakat miskin, baik untuk kegiatan konsumtif ataupun kegiatan yang produktif keluarga miskin tersebut. Berdasarkan fungsinya, maka jasa keuangan mikro yang dilaksanakan oleh LKM memiliki ragam yang luas yaitu dalam bentuk kredit dan pembiayaan lainnya.

Lembaga keuangan mikro memiliki kelebihan yang paling nyata, yaitu prosedurnya yang sederhana, tanpa agunan, hubungannya yang cair (*personal relationship*), dan waktu pengembalian kredit yang fleksibel (*negotiable repayment*). Karakteristik itu sangat sesuai dengan ciri pelaku ekonomi di pedesaan (khususnya di sektor pertanian) yang memiliki aset terbatas, tingkat pendidikan rendah dan siklus pendapatan yang tidak teratur (bergantung panen). Karakter perdesaaan seperti itulah yang ditangkap dengan baik oleh pelaku lembaga keuangan mikro, sehingga eksistensinya mudah diterima oleh masyarakat kecil. Tetapi kelemahan utama dari lembaga keuangan mikro, yakni tingkat bunga kredit yang sangat tinggi, harus diperbaiki sebab keberadaannya cenderung mengeksploitasi masyarakat miskin. Pemerintah dapat mendesain regulasi dengan jalan membatasi tingkat suku bunga, atau memperluas akses masyarakat miskin kepada kredit formal sehingga dalam

jangka panjang tingkat bunga lembaga keuangan mikro akan tertekan. Model inilah yang harus diadopsi agar kepentingan masyarakat kecil tidak dirugikan (Ismawan, 2010).

Keperluan kredit masyarakat pedesaan di satu pihak tidak pernah terpenuhi, sedangkan dipihak lain badan-badan kredit formal dalam kenyataannya menyediakan sebagian kecil saja dari keperluan akan kredit tersebut. Sudah banyak dilaporkan bahwa salah satu sebabnya pemberian kredit kepada petani dinegara-negara yang sedang berkembang adalah karena kredit pertanian lebih sedikit bagi keperluan produksi dan lebih banyak untuk keperluan konsumsi. Dalam hal demikian maka tidak mengherankan bahwa yang paling mudah bagi lembaga perkreditan adalah menolak pemberian kredit tersebut (Mubyarto, 1973).

Ada kriteria lazim yang biasa digunakan oleh bank sebelum memutuskan untuk memberikan kredit. Kriteria tersebut dikenal dengan istilah 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition of economy and Collateral*.

1. *Character* (karakter atau kepribadian)

Kredit bisa diberikan kepada calon nasabah yang mempunyai kepribadian baik seperti jujur, bertanggung jawab, memegang teguh janji, tidak boleh berpredikat sebagai penjudi, pencuri dan pemabuk. Informasi tentang karakter ini bisa didapat dari teman, tetangga, wali jorong, dan wali nagari serta camat.

2. *Capacity* (kemampuan)

Untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membayar pinjamannya dapat kita lihat dari kinerja usaha yang akan dijalankan. Hal ini bisa dilihat dari studi kelayakan usaha, laporan keuangan, kemampuan manajemen dan administrasi usaha, tingkat SDM dan rekomendasi dari instansi teknis.

3. *Capital* (modal)

Dengan melihat perbandingan antara jumlah utang dengan modal keseluruhan (*Debt to Equity Ratio*), maka bank bisa menilai apakah kredit layak diberikan atau tidak. Semakin rendah DER, berarti semakin rendah komposisi utang dibandingkan modal, semakin lemah dan tidak kompetitif suatu perusahaan. Yang bisa masuk

kedalam kategori modal adalah uang tunai, harta lainnya yang mudah dicairkan dan yang sukar dicairkan.

4. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Beberapa kondisi ekonomi yang mempengaruhi pertimbangan pemberian kredit adalah: (a) periode siklus ekonomi, (b) peraturan pemerintah, (c) selera pasar dan (d) waktu pemberian kredit khususnya untuk usaha pertanian.

5. *Collateral* (Jaminan)

Jaminan yang dimaksud adalah jaminan dalam arti luas. Jaminan bisa berbentuk harta benda, kelayakan usaha (*projected collateral*), jaminan pasar (kontrak pembelian) dan jaminan personal (*personal guarantee*).

2.1.1. Kredit Mikro pola Grameen Bank

Grameen Bank (bank untuk kaum miskin) adalah sebuah organisasi kredit mikro yang dimulai di Bangladesh yang memberikan pinjaman kecil kepada orang yang kurang mampu tanpa membutuhkan *collateral*. Sistem ini berdasarkan ide bahwa orang miskin memiliki kemampuan yang kurang digunakan. Yang berbeda dari kredit ini adalah pinjaman diberikan kepada kelompok perempuan produktif yang masih berada dalam status sosial miskin. Pola *Grameen Bank* ini telah diadopsi oleh hampir 130 negara didunia (sebagian besar dinegara Asia dan Afrika). Jika diterapkan dengan konsisten, pola *Grameen Bank* ini dapat mencapai tujuan untuk membantu perekonomian masyarakat miskin melalui perempuan (Thoha, 2000).

Dengan konsep *Grameen Bank*-nya, Yunus mengembangkan konsep kredit mikro yaitu memberi pinjaman skala kecil tanpa agunan untuk usahawan miskin yang tidak mampu meminjam dari bank umum. Untuk menjamin pembayaran utang, *Grameen Bank* menggunakan sistem kelompok "solidaritas". Kelompok-kelompok itu mengajukan permohonan pinjaman bersama-sama, dan setiap anggotanya berfungsi sebagai penjamin anggota lainnya, sehingga mereka dapat berkembang bersama-sama.

Penerapan sistem *Grameen Bank* menggunakan prinsip antara lain tanpa surat perjanjian. Kepercayaan adalah hal utama dalam pelaksanaannya dan tidak ada

pemberlakuan sanksi. Sistem *Grameen Bank* bertujuan untuk membuat sistem perbankan yang adil, pro terhadap rakyat miskin, dan pro terhadap perempuan. Sebagaimana dimaklumi bahwa akses orang-orang miskin terhadap kredit dari perbankan konvensional adalah sangat kecil atau bahkan tertutup sama sekali. Berdasarkan kenyataan tersebut, *Grameen Bank* di bangun atas dasar empat karakteristik berikut: (i) bantuan kredit diberikan tidak perlu ada jaminan (agunan) dan penjamin, (ii) tidak ada sanksi hukum bila anggota tidak bisa mengembalikan pinjaman dan kredit tersebut dihibahkan bila anggota meninggal dunia, (iii) anggota tidak perlu datang ke kantor untuk mengurus pinjamannya, tetapi justru petugas yang mendatangi mereka dalam pertemuan rembug pusat, dan (iv) prosedur perkreditan dibuat sesederhana mungkin, dengan tidak menggunakan banyak formulir yang tidak dimengerti oleh anggota (Thoha, 2000).

Perbankan tidak bersedia melayani kebutuhan kredit masyarakat kecil atau orang-orang miskin karena :

- a. Orang-orang miskin tidak mempunyai barang-barang atau kekayaan yang dapat dijadikan agunan pinjamannya.
- b. Mereka tidak dapat mengisi berbagai formulir yang rumit karena sebagian besar dari mereka tidak dapat membaca dan menulis.
- c. Perbankan lebih suka melayani kebutuhan kredit berskala besar daripada yang kecil-kecilan yang banyak jumlahnya, sehingga memerlukan banyak pekerjaan dan mengandung resiko tinggi.
- d. Perbankan takut bunga pinjaman yang diterima tidak dapat menutup biaya pelayanan pinjaman kecil yang banyak jumlahnya tersebut.

Di negara mana pun, institusi perbankan tidak mungkin bisa melepaskan kredit tanpa adanya jaminan yang cukup dari nasabah. Di Bangladesh jaminan kredit yang paling lazim digunakan adalah aset tanah. Padahal kelompok sasaran yang dituju oleh Yunus adalah penduduk termiskin yang praktis tidak mempunyai tanah. Bagi Yunus, persyaratan adanya jaminan bagi orang miskin sama juga bohong. Inilah keistimewaan *Grameen Bank*, tidak adanya persyaratan agunan.



Suku bunga yang diterapkan juga tidak mencekik. *Grameen Bank* menerapkan suku bunga yang sama dengan suku bunga komersial, yaitu 20% per tahun. Bandingkan dengan rentenir yang bisa menetapkan bunga samapai 10% per bulan bahkan sampai 10% per hari. Ciri mendasar terakhir adalah tidak melakukan ekspansi besar-besaran seperti layaknya rentenir. Meskipun menyebar cabang di mana-mana tetapi *Grameen Bank* tetap menjaga plafon kredit bagi setiap peminjam. Ini bedanya dengan rentenir yang berekspansi besar-besaran hanya untuk meraih untung besar (Yunus, 2008).

2.1.2. Kredit Mikro Pola BMT

Menurut Madjid dan Syaifuddin (2000), *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu merupakan penggabungan dua lembaga yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. Yang secara terminologis merupakan suatu lembaga usaha ekonomi kerakyatan yang mampu melayani nasabah usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan sistem bagi hasil dan jual beli dengan memanfaatkan potensi jaminan dalam lingkungan sendiri.

BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) biasa disebut juga dengan Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah Lembaga keuangan mikro yang dioperasionalkan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.

Kegiatan *Baitul Tamwil* mengutamakan kegiatan-kegiatan investasi yang produktif, dengan sasaran usaha ekonomi yang dalam pelaksanaannya saling mendukung untuk pembangunan usaha kesejahteraan masyarakat. Sedangkan *Baitul Maal* mengutamakan kegiatan kesejahteraan, bersifat nirlaba yang diharapkan mampu mengumpulkan zakat, infaq, *shadaqah*, yang pada gilirannya mendukung kemungkinan-kemungkinan resiko yang terjadi dalam kegiatan ekonomi usaha kecil-bawah tersebut.

Menurut Ashari (2005), implementasi pembiayaan syariah untuk kegiatan usaha pertanian/agribisnis di pedesaan memiliki prospek yang positif. Hal ini dilandasi oleh (a) karakteristik pembiayaan syariah sesuai dengan kondisi bisnis pertanian, (b)

beberapa skim pembiayaan syariah sudah dipraktekkan masyarakat petani bahkan telah melembaga, (c) luasnya cakupan usaha bidang pertanian, (d) mengandung nilai-nilai universal, (e) petani memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap perjanjian, (f) adanya komitmen yang tinggi perbankan syariah untuk UKM, serta (g) usaha di sektor pertanian termasuk kegiatan bisnis riil yang relevan dengan misi lembaga pembiayaan syariah.

Pembiayaan modal kerja syariah yang diberikan bukan dalam bentuk pinjaman tapi dengan menjalin hubungan kemitraan dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul mal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*), skema pembiayaan semacam ini disebut *mudharabah (trust financing)*. Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang telah disepakati (Antonio, 2001).

2.2. Tinjauan Tentang Kredit Pertanian

Kata kredit sering diartikan dengan pengertian modal (*capital*) dan terkadang juga diartikan dengan usaha yang biasanya dikaitkan dengan pemberian kredit. Pengertian kredit sebenarnya tidaklah sama dengan modal, tetapi kredit tersebut memang dapat digunakan untuk keperluan pembelanjaan dalam usaha/bisnis dan dapat pula dipergunakan untuk membeli barang-barang konsumsi maupun barang input untuk tujuan produksi (Mashudi, 2003).

Menurut (Hadinoto, 2005), kredit merupakan transaksi modal yang disertai kepercayaan, seringkali dengan jaminan bahwa akan dikembalikan setelah jangka waktu tertentu. Perkreditan tersebut timbul karena kekurangan modal dan terjadi bila penghasilan yang diperoleh tidak mencukupi untuk pengeluaran yang harus dilakukan, baik untuk produksi, konsumsi, maupun keperluan rumah tangga lainnya.

Menurut Sediono (1988), disamping pentingnya sektor pertanian di bidang ekonomi, beberapa faktor lain menunjukkan bahwa kredit pertanian memegang peranan penting dalam pembangunan. Kebutuhan kredit dalam proses pembangunan memang tidak perlu dipersoalkan lagi. Kemajuan teknologi membutuhkan investasi dan peningkatan alokasi sarana produksi. Dalam sektor pertanian yang masih

berorientasi pada cara subsistem, pengeluaran tersebut kadang tidak dapat dibiayai tanpa fasilitas kredit. Sistem kredit tradisional yang dapat memenuhi kebutuhan kredit dalam suasana pembangunan ekonomi saat ini pada umumnya tidak dapat memenuhi permintaan untuk proses pembaharuan yang luas. Hanya sistem kredit yang didukung oleh lembaga resmi yang dapat mengatasi kebutuhan-kebutuhan kredit tambahan ini secara efektif.

Sistem kredit pertanian yang ada pada umumnya dapat dikelompokkan dalam 4 kategori :

1. Sistem yang berdasarkan bank komersil.
2. Sistem yang dikelola Negara.
3. Badan koperasi.
4. Sistem non lembaga.

Sesuai dengan prinsip prinsip perkreditan yang sehat, kredit mikro memiliki esensi yang berbeda dengan kredit komersial, yaitu kredit mikro harus merupakan bagian dari suatu proses pemupukan dana jangka panjang yang disebut modal, bagi peminjam. Prinsip ini mutlak menjadi landasan bagi kebijakan peminjaman yang harus dikembangkan oleh setiap lembaga pembiayaan mikro. Sedangkan kemampuan pemupukan dana jangka panjang (*capital formation*) tergantung pada kemampuan seseorang dalam mengelola dana pinjaman untuk usaha usaha produktif, sehingga hasilnya bukan saja mampu mengembalikan pokok pinjaman dan bunga serta biaya biaya lain, tapi peminjam memiliki surplus yang akan menambah modal atau dana yang telah dimiliki (Widyawan, 2006).

Sektor pertanian pada dasarnya memerlukan empat unsur pokok yang harus selalu ada, dikenal dengan faktor-faktor produksi yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan pengelolaan manajemen. Tujuan dari kredit pertanian, khususnya kredit program yaitu untuk melindungi golongan ekonomi lemah. Kredit program mempunyai tujuan ganda, yaitu selain untuk meningkatkan produksi melalui introduksi teknologi dalam rangka swasembada pangan juga ditujukan untuk meningkatkan pendapatan petani dan mengurangi kemiskinan (Ashari, 2006)

Sebagian besar kredit di pedesaan pada negara-negara berkembang diperoleh dari sumber-sumber non-kelembagaan. Sistem bank komersial adalah yang paling tidak sesuai untuk penyediaan kredit pertanian bagi para petani kecil. Bank pertanian negara sering kali terbukti tidak efisien, tidak luwes dan tidak terlalu birokratis, serta tidak memberikan cukup perhatian pada penerahan tabungan. Dalam banyak negara, kebijaksanaan yang sering ditekankan pemerintah tentang tingkat bunga yang rendah menyebabkan lembaga-lembaga menjadi lemah keuangannya dan bertambah ketergantungan kepada subsidi, sedangkan pada saat yang sama terjadi pengikisan modal (Sediono, 1988).

Dalam perkredit pertanian, kebijaksanaan pemberian tingkat bunga yang rendah tidak dapat dibenarkan baik dari segi pertumbuhan maupun dari segi pemerataan, selain itu kebijaksanaan itu menghalangi perkembangan lembaga pemberi kredit pertanian yang bebas. Dalam persyaratan kredit yang lain seperti tenggat waktu dan pembayaran serta akumulasi pembayaran bunga harus dibuat lebih luwes, supaya dapat disesuaikan dengan kebutuhan biaya dan investasi. Lembaga kredit pertanian dapat membuka lebih banyak jalur kredit bagi para petani kecil dengan mendasarkan keputusan pemberian kredit lebih banyak pada keuntungan dan produktivitas investasi daripada jaminan atau keamanan (Sediono, 1988).

Pada kenyataannya, lembaga formal pembiayaan mikro di pedesaan lebih diakses oleh golongan petani yang menguasai lahan luas dan pedagang secara individual. Sedangkan para petani yang menguasai lahan sempit mengalami kesulitan mengakses lembaga formal tersebut yang antara lain disebabkan belum memiliki aset yang dapat dijadikan jaminan (seperti sertifikat pemilikan tanah, BPKB kendaraan bermotor dsb.). Bahkan sebagian besar di antara mereka, walaupun telah memiliki surat-surat tersebut tetapi masih takut dan enggan menjadikannya sebagai penjamin pinjaman. Sementara, penyaluran kredit melalui kelompok dinilai tidak praktis, selain kepercayaan atas kemampuan dan kejujuran pengurus kelompok tidak sepenuhnya dapat diandalkan (Mashudi, 2003).

2.3. Tinjauan Tentang Simpan Pinjam

Usaha simpan pinjam merupakan salah satu usaha yang telah berakar dan dikenal secara luas oleh masyarakat di Indonesia. Usaha ini adalah salah satu usaha lembaga keuangan non-bank dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya dari, untuk anggota, dan calon anggota. Pada umumnya usaha simpan pinjam di Indonesia tumbuh karena sulit mendapatkan bantuan permodalan melalui sistem pemberian perkreditan kredit dari perbankan (Sabirin, 2001).

Pengertian USP menurut Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1995 adalah salah satu unit kegiatan yang melayani jasa penyimpanan dana dan pemberian pinjaman dana bagi anggotanya sebagai bagian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasi tersebut. Kegiatan utama dari USP adalah menghimpun dana dari anggota dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit kepada anggotanya.

Perkembangan usaha simpan pinjam tidak terlepas dari kondisi perkreditan yang dikembangkan di Indonesia. Sejak pemerintah menerapkan program pembangunan yang terencana, lembaga perbankan mempunyai peranan aktif dalam pembangunan melalui penyediaan kredit, baik kredit jangka pendek, menengah maupun jangka panjang (Wijono, W. 2005).

Menurut Hamid (1986), kredit prioritas tinggi mencakup penyediaan kredit untuk pengusaha lemah dan petani. Penyebab belum berhasilnya lembaga perbankan mendukung pendanaan kepada sektor riil termasuk koperasi dan lembaga mikro simpan pinjam adalah (1) pendirian lembaga perkreditan yang ada di *drop* dari atas dengan pola pengelolaan dari atas tanpa melihat situasi, kondisi dimana lembaga tersebut berdiri, (2) jangkauan dari nasabah juga terbatas ini terjadi karena pola kerja dari pengelola badan kredit itu terbawa oleh pola birokrasi, (3) pada umumnya bank-bank pelaksana menerapkan peraturan yang ketat dan kaku seperti yang dipersyaratkan oleh bank modern, (4) prosedur yang berbelit-belit, persyaratan administrasi yang menjengkelkan, jaminan kekayaan yang harus tersedia untuk mendapatkan kredit, (5) lokasi lembaga perkreditan yang jauh dari tempat penduduk, (6) pengawasan yang lemah dari Pemerintah dalam sistem perkreditan mengakibatkan kredit dapat dimanfaatkan oleh pihak pelaku maupun pihak luar yang seharusnya

tidak berhak mendapatkan kredit, (7) sistem perkreditan formal yang dirancang melibatkan banyak pihak birokrasi yang dapat memanfaatkan kredit secara ilegal, dan (8) walaupun tingkat suku bunga tinggi di pedesaan dari badan kredit non-formal namun adanya faktor-faktor pembatas yang disebut dimuka menyebabkan masyarakat dipedesaan kurang terdorong untuk memanfaatkan kredit formal yang disediakan Pemerintah.

Kegiatan usaha simpan pinjam yang benar -benar berhasil diharapkan kelangsungan keberadaannya. Kelangsungan keberadaan usaha simpan pinjam harus didasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas. Prinsip efisiensi dan efektivitas dapat terwujud jika para pengelola dalam hal ini pengurus, manajer betul-betul mengarahkan usaha simpan pinjam untuk kepentingan anggota. Keberhasilan usaha simpan pinjam bukan hanya tergantung kepada besarnya modal yang diusahakan melainkan pelaksanaannya lebih mendekati adanya saling percaya antar anggota dengan para pengurus dan saling percaya antar anggota. Artinya, didalam usaha simpan pinjam anggota saling memberi dan menerima untuk kepentingan bersama Usaha Simpan Pinjam yang berkembang akan meningkatkan Sisa Hasil Usaha (SHU). Jika SHU meningkat terjadi perkembangan modal yang dapat dimanfaatkan anggota kembali (Sudaryanto, T. 2000).

2.4. Lembaga Keuangan Mikro dan Manfaatnya

Lembaga keuangan mikro adalah semua badan yang melalui kegiatan kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat. Lembaga-lembaga keuangan berfungsi sebagai lembaga yang mempercepat penyaluran dana dari *Surplus Spending Unit*(SSU) ke *Defisit Spending Unit* (DSU). Fungsi ini dikenal sebagai fungsi perantara finansial (*Finansial Intermediation*). Selain fungsi tersebut masih ada lagi fungsi atau peran lain yang hampir identik dengannya, yaitu sebagai *agent of development*. Lembaga keuangan dapat memobilisasi dana dari masyarakat dari luar daerah yang kemudian disalurkan kembali kedalam perekonomian dalam bentuk kredit (Ismawan, 2010).

Keterbatasan modal merupakan permasalahan yang diatasi dengan kemampuan fiskal pemerintah yang semakin berkurang, menurut Ashari (2006). Pemerintah perlu lebih mengoptimalkan potensi lembaga keuangan yang dapat menjadi alternatif sumber dana bagi petani dan masyarakat pedesaan. Salah satu lembaga keuangan yang dapat dimanfaatkan dan didorong untuk membiayai kegiatan perekonomian di pedesaan yang mayoritas usaha penduduknya masuk dalam segmen mikro adalah Lembaga keuangan mikro.

LKM ini merupakan lembaga keuangan yang mengikuti prinsip prinsip perbankan dan didalam penyelenggaraannya merupakan prinsip kebersamaan (kooperatif). Dalam perkembangan selanjutnya LKM dapat berbadan hukum koperasi (mengikuti undang undang koperasi) berbadan hukum bank (mengikuti undang undang perbankan) (Mashudi, 2003).

Umumnya LKM memberikan jasa keuangan dalam bentuk kredit, pengiriman uang (*transfer*), atau bentuk pembiayaan lain. Berkaitan dengan hal tersebut LKM kemudian dapat menghimpun dana masyarakat, bahkan pada banyak LKM, kegiatan penghimpun dana (*saving*) menjadi prasyarat bagi adanya layanan pembiayaan (kredit), walaupun perlu pula dicatat bahwa pada akhirnya seringkali jumlah layanan pembiayaan yang diberikan lebih besar dari dana yang berhasil dihimpun (Hadinoto, 2005).

Menurut Krishnamurti (2005) dalam Ashari (2006), walaupun terdapat banyak definisi keuangan mikro, namun secara umum terdapat tiga elemen penting dari berbagai definisi tersebut. *Pertama*, menyediakan beragam jenis pelayanan keuangan. Keuangan mikro dalam pengalaman masyarakat tradisional Indonesia seperti lumbung desa, lumbung *pitih* nagari dan sebagainya menyediakan pelayanan keuangan yang beragam seperti tabungan, pinjaman, pembayaran, deposito, maupun asuransi. *Kedua*, melayani masyarakat miskin. Keuangan mikro hidup dan berkembang pada awalnya memang untuk melayani masyarakat yang terpinggirkan oleh sistem keuangan formal yang ada, sehingga memiliki karakteristik konstituen yang khas. *Ketiga*, menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel. Hal ini merupakan konsekuensi dari kelompok masyarakat yang dilayani,

sehingga prosedur dan mekanisme yang dikembangkan untuk keuangan mikro akan selalu kontekstual dan fleksibel. Keuangan mikro kini dianggap sebagai terobosan institusional untuk melayani pembiayaan masyarakat pedesaan, perkotaan dan para pengusaha mikro. Keuangan mikro supaya terfokus, profesional dan efektif secara luas dalam melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang betul-betul membutuhkan.

Kredit Program memiliki beberapa manfaat sebagai berikut: (1) membantu mengatasi masalah permodalan petani; (2) menghilangkan/mengurangi ketergantungan petani kepada tengkulak/rentenir; (3) tingkat kerjasama petani semakin kuat dalam wadah gapoktan; (4) petani semakin mudah dalam memperoleh pupuk bersubsidi; (5) gapoktan dijadikan sebagai tempat studi banding bagi petani yang lain; (6) usaha agribisnis semakin berkembang di lokasi desa dan (7) beberapa gapoktan telah berhasil dalam menumbuhkan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (Kasmadi, 2005).

Lembaga keuangan mikro (LKM) mempunyai fungsi sebagai lembaga perantara atau *intermediary* antara para pemilik modal (uang) dengan para pihak yang memerlukan modal ditingkat pedesaan, sehingga lembaga ini mempunyai manfaat yang sangat besar antara lain :

1. Dapat membantu penduduk desa yang kelebihan uang untuk sementara disimpan di LKM atau mendidik masyarakat untuk menabung,
2. Memberikan pinjaman modal kerja kepada petani, pengrajin, pedagang dan atau penduduk desa lainnya yang mempunyai penghasilan
3. Membantu pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pemerataan kesempatan berusaha, memberikan atau menciptakan tambahan lapangan kerja baru, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di pedesaan (Ashari, 2006).

2.5. Penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A)

Menurut Departemen Pertanian (2005) Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) adalah lembaga keuangan mikro yang didirikan dan dimiliki oleh petani/

masyarakat tani di pedesaan guna memecahkan masalah akses terhadap pelayanan keuangan. LKM-A akan melaksanakan fungsi pelayanan dan simpanan di lingkungan petani dan pelaku usaha agribisnis.

Karakteristik LKM-A dalam memberikan pelayanan keuangan yaitu:

1. Tidak menggunakan pola keuangan perbankan konvensional
2. Mempersyaratkan adanya penjaminan non-anggungan
3. Menerapkan proses administrasi yang sederhana dan bertanggung jawab

2.5.1. Dasar Hukum LKM-A

Dasar hukum dalam pelaksanaan LKM-A adalah berdasarkan Undang-Undang No.25/1992. Untuk legalitas operasional LKM-A, diperlukan surat keputusan (SK) dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh Dinas Lingkup Pertanian.

2.5.2. Prinsip Umum LKM-A

1. Modal awal LKM-A haruslah bersumber dari pendiri dan anggota pendiri melalui pola penghimpunan dana dari simpanan pokok pendiri.
2. Modal usaha bersumber dari dana penguatan modal usaha terutama BLM-PUAP yang saat ini dikelola.
3. Modal LKM-A secara otomatis akan bertambah dari simpanan pokok calon anggota, simpanan wajib, simpanan sukarela, dll. Disamping itu LKM-A dapat mengumpulkan dana masyarakat diluar anggota dalam bentuk simpanan
4. Pelayanan pembiayaan dan simpanan hanya diberikan kepada anggota LKM-A dan calon anggota
5. Pengelola LKM-A akan dilatih oleh dinas terkait (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang difasilitasi oleh Departemen Pertanian

2.5.3. Karakteristik LKM-A

- a. Profesional: (i) dikelola dengan penuh waktu (*full time*), bukan pekerjaan sampingan, (ii) adanya fasilitas pendampingan dan pelatihan berjenjang, dilengkapi dengan modul-modul aplikatif (*continuous training and technical assistance*), (iii)

- produk simpanan dan pembiayaan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat (*demans driven*), (iv) menerapkan sistem, prosedur administrasi dan akuntansi standar lembaga keuangan yang dirancang sederhana, efisien dan efektif, (v) pengelolaan dan pelaporan keuangan secara terbuka.
- b. Mandiri yaitu swadaya dan mampu membiayai usahanya sendiri (*cost recovery*)
 - c. Mengakar di masyarakat, artinya inisiatif, dimiliki dan dikelola oleh masyarakat setempat, sehingga tumbuh rasa memiliki dan tanggung jawab (BPTP Sumatera Barat, 2009).

2.6. Sistem Pengelolaan Dana di LKM-A

2.6.1. Pengelola LKM-A

Menurut Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Barat (2009) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PUAP di Sumatera Barat, dipaparkan bahwa sistem pengelolaan dana di LKM-A adalah sebagai berikut:

a. Manajer Umum

- a. Manajer umum bertanggung jawab atas perencanaan, koordinasi dan pengarahan dari semua aktifitas operasional LKM-A guna mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan.
- b. Bertanggung jawab untuk operasional yang menguntungkan dalam rangka kebijaksanaan, sasaran dan anggaran-anggaran yang dibuat bersama staf manajemen.
- c. Tanggung jawab manajer umum juga menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan produk, pemasaran dan penerapan dari sistem manajemen, administrasi kepegawaian, keuangan dan akuntabilitas keuangan pada pengurus gapoktan.

b. Bagian Keuangan dan Administrasi

Kewenangan bagian ini adalah menangani administrasi dan keuangan, menyusun dan melaporkan keuangan.

Tugas-tugas:

1. Mengerjakan jurnal buku besar

2. Membantu manajer dalam hal pembuatan arus kas dan budgeting.
3. Menyusun neraca dan laporan rugi/laba secara periodik.
4. Melakukan pengalokasian pendayagunaan dana.

c. Bagian Pembiayaan

Bagian ini berwenang dalam melakukan kegiatan pelayanan kepada peminjam, serta melakukan pembinaan agar pembiayaan yang diberikan tidak macet.

Tugas-tugas:

1. Menyusun rencana pembiayaan
2. Menerima analisa pembiayaan
3. Melakukan analisa pembiayaan
4. Mengajukan pembiayaan kepada komite
5. Melakukan pembinaan nasabah/anggota
6. Membuat laporan perkembangan pembiayaan.

d. Penggalangan Dana

Kewenangan bagian ini adalah melakukan kegiatan pengerahan tabungan anggota/masyarakat sebagai pembangkit modal LKM-A.

Tugas-tugas:

1. Menyusun rencana pengerahan tabungan
2. Merencanakan produk-produk tabungan
3. Melakukan analisa data tabungan
4. Melakukan pembinaan nasabah/anggota
5. Membuat laporan perkembangan tabungan

e. Kasir

Kasir berwenang sebagai penerima dan juru bayar.

Tugas-tugas:

1. Menerima/menghitung uang dan membuat bukti penerimaan.
2. Melakukan pembayaran sesuai dengan perintah manajer
3. Melayani dan membayar pengambilan tabungan.
4. Membuat buku kas harian

5. Setiap akhir jam kerja menghitung uang yang ada dan meminta pemeriksaan dari manajer (BPTP Sumatera Barat, 2009).

2.6.2. Syarat untuk Menjadi Pengelola LKM-A

Pengelola LKM-A adalah mereka yang bekerja penuh (sepanjang waktu dan hati) untuk LKM-A. Syarat-syaratnya adalah:

- a. Memiliki semangat dan komitmen yang kuat membela kaum dhu'afa, orang yang lemah, yang diniatkannya sebagai ibadah;
- b. Amanah, jujur dan berpotensi bekerja secara profesional;
- c. Memiliki landasan iman dan sikap keikhlasan, mampu bekerjasama dalam tim, khususnya dalam menumbuhkembangkan LKM-A;
- d. Memiliki keahlian dalam bidang keuangan mikro (BPTP Sumatera Barat, 2009).

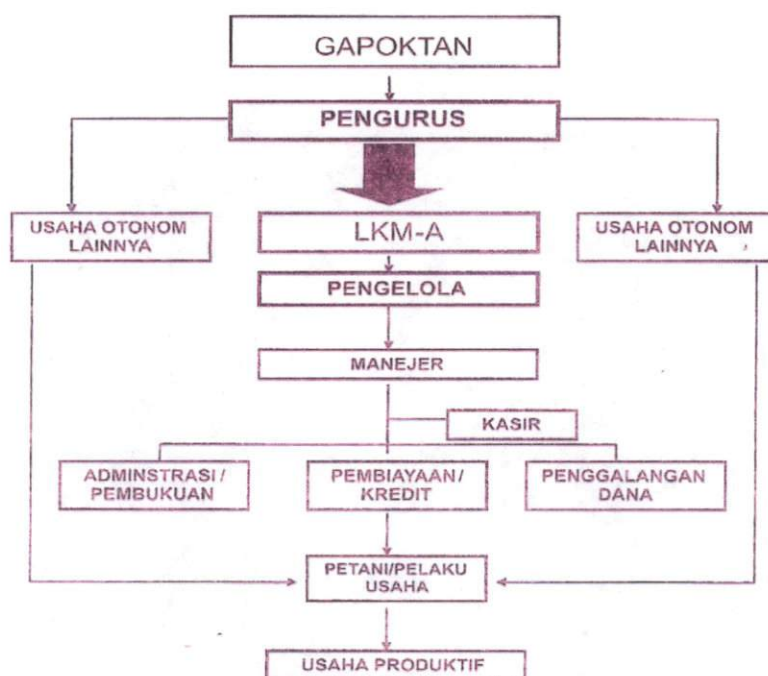
2.7. Kedudukan dan Fungsi LKM-A dalam Lembaga Gapoktan

Menurut Departemen Pertanian (2005), Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) adalah lembaga mikro yang didirikan dan dimiliki oleh petani/masyarakat tani di pedesaan guna memecahkan masalah akses untuk mendapatkan pelayanan keuangan. LKM-A akan melaksanakan fungsi pelayanan pembiayaan dan simpanan di lingkungan petani dan pelaku agribisnis.

LKM-A adalah salah satu unit usaha otonom yang didirikan dan dimiliki oleh anggota kelompok tani yang tergabung dalam gapoktan. LKM-A bergerak dalam bidang pembiayaan bagi para petani dalam wilayah gapoktan. Sebagai unit usaha gapoktan, kedudukan LKM-A sejajar dengan unit usaha lainnya yang ada pada gapoktan tersebut. Pengurus unit usaha LKM-A adalah pengurus gapoktan sesuai dengan kesepakatan bersama yang tertuang dalam AD/ART gapoktan. Sedangkan yang mengelola LKM-A adalah beberapa orang yang ditunjuk oleh pengurus LKM-A (Gambar 1). Pengurus LKM-A mengeluarkan surat penunjukan atau pengangkatan tenaga pengelola LKM-A sesuai struktur organisasi LKM-A tersebut (BPTP Sumatera Barat, 2009).

Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pengurus dan pengelola LKM-A terkait dengan kedudukannya dalam gapoktan adalah:

1. Pengelola LKM-A terdiri dari: (i) manajer, (ii) bagian administrasi/pembukuan, (iii) kasir, (iv) bidang pembiayaan, (v) penggalangan dana.
2. Sistem rekrutmen tenaga pengelola ditentukan dan diangkat oleh pengurus gapoktan dengan memperhatikan kriteria: (i) mempunyai motivasi kerja yang tinggi, (ii) tenaga pengangguran di nagari, (iii) pendidikan yang memadai.
3. LKM-A dapat lebih berfungsi dalam menggulirkan dana program BLM-PUAP, karena itu perlu dilakukan penguatan LKM-A menuju lembaga keuangan yang profesional (memenuhi persyaratan pendirian LKM).
4. Dana penguatan modal (BLM-PUAP) Rp. 100.000.000,- per nagari/kelurahan dapat dijadikan sebagai modal dasar disamping sumber dana lainnya untuk menumbuhkembangkan sebuah lembaga keuangan mikro di nagari.
5. Untuk lebih memfokuskan pengelolaan dana dalam lembaga gapoktan, maka gapoktan membentuk sebuah LKM-A yang mendukung pembiayaan usaha agribisnis petani kecil di wilayah kerja gapoktan. Secara bertahap LKM-A berkembang menuju lembaga keuangan mikro yang profesional dan berbadan hukum koperasi (Badan Hukum KSP) yang berada di nagari.
6. LKM-A diharapkan dapat berkembang menjadi lembaga keuangan mikro nagari dengan tujuan mendukung pembangunan ekonomi nagari (BPTP Sumatera Barat, 2009).



Gambar 1: Kedudukan LKM-A dan usaha otonom lainnya dalam Gapoktan

2.8. Program Bantuan Langsung Masyarakat untuk Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLM-PUAP)

2.8.1. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

Tahun 2002 pemerintah melalui Departemen Pertanian RI mengeluarkan kebijakan baru dalam upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam berusaha. Kebijakan tersebut dituangkan dalam bentuk program fasilitasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Program BLM ini diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat yang mencakup bantuan modal untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi produktif; bantuan sarana dan prasarana dasar yang mendukung kegiatan sosial ekonomi; bantuan pengembangan sumberdaya manusia untuk mendukung penguatan kegiatan sosial ekonomi; bantuan penguatan kelembagaan untuk mendukung pengembangan proses hasil-hasil kegiatan sosial ekonomi secara berkelanjutan melalui penguatan kelompok masyarakat dan unit pengelola keuangan; dan bantuan

pengembangan sistem pelaporan untuk mendukung pelestarian hasil-hasil kegiatan sosial ekonomi produktif (Kasmadi, 2005).

2.8.2. Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).

Seiring dengan perkembangan dan perubahan kepemimpinan di pemerintahan, maka kebijakan penguatan modal di bidang pertanian pun ikut berubah dan dimodifikasi lagi agar lebih baik. Pada tahun 2008 pemerintah melalui Departemen Pertanian RI mencanangkan program baru yang diberi nama Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).

Sasaran pemberdayaan pertanian PUAP yaitu :

- a. Berkembangnya usaha agribisnis di 462 nagari miskin/ tertinggal pada 12 kabupaten dan 3 kota di Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan potensi pertanian di masing-masing nagari/ kelurahan.
- b. Berkembangnya 462 gapoktan yang dimiliki dan dikelola oleh petani.
- c. Bergulirnya dana PUAP yang dikelola LKM-A pada 204 nagari yang memperoleh dana PUAP tahun 2008 dan tersalurnya dana PUAP pada tahun 2009 untuk 258 nagari/kelurahan sebesar Rp 25,8 milyar yang dimanfaatkan oleh rumah tangga tani miskin, petani/peternak (pemilik/penggarap) skala kecil, buruh tani.
- d. Berkembangnya usaha pelaku usaha agribisnis yang mempunyai usaha harian, mingguan, maupun musiman (Departemen Pertanian, 2008).

Pola dasar PUAP dirancang untuk meningkatkan keberhasilan penyaluran dana BLM PUAP kepada gapoktan dalam mengembangkan usaha produktif petani skala kecil, buruh tani dan rumah tangga tani miskin. Komponen utama dari pola dasar pengembangan PUAP adalah; 1) keberadaan Gapoktan; 2) keberadaan Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani; 3) Pelatihan bagi petani, pengurus Gapoktan, dll; dan 4) penyaluran BLM kepada petani (pemilik dan atau penggarap), buruh tani dan rumah tangga tani (Departemen Pertanian, 2008).

Menurut Deptan (2008), strategi dasar PUAP adalah:

1. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PUAP.
2. Optimasi potensi agribisnis di desa miskin dan tertinggal.

3. Penguatan modal petani kecil, buruh tani, dan rumah tangga tani miskin kepada sumber permodalan.
4. Pendampingan bagi gapoktan (Departemen Pertanian, 2008).

Indikator keberhasilan output pemberdayaan masyarakat melalui PUAP, Deptan (2008) adalah :

- a. Tersalurkannya BLM-PUAP kepada petani, buruh tani dan rumah tangga tani miskin dalam melakukan usaha produktif pertanian.
- b. Terlaksananya fasilitas penguatan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia pengelola gapoktan, penyuluh pendamping dan penyelia mitra tani (Departemen Pertanian, 2008).

Indikator keberhasilan *outcome* pemberdayaan masyarakat melalui PUAP antara lain :

- a. Meningkatnya kemampuan gapoktan dalam memfasilitasi dan mengelola bantuan modal usaha untuk petani anggota baik pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga petani.
- b. Meningkatnya jumlah petani, buruh tani dan rumah tangga tani yang mendapatkan bantuan modal usaha.
- c. Meningkatnya aktivitas kegiatan agribisnis di nagari/kelurahan.
- d. Meningkatnya pendapatan petani (pemilik dan atau penggarap), buruh tani dan rumah tangga tani dalam berusaha tani sesuai dengan potensi daerah (Departemen Pertanian, 2008).

Sedangkan indikator *benefit and impact* PUAP antara lain :

- a. Berkembangnya usaha agribisnis dan usaha ekonomi rumah tangga tani di lokasi nagari/kelurahan PUAP.
- b. Berfungsinya gapoktan sebagai lembaga ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh petani di nagari/kelurahan.
- c. Berkurangnya jumlah petani miskin dan pengangguran di nagari/kelurahan.

Strategi operasional dari PUAP adalah :

1. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PUAP dilaksanakan melalui :
 - a. Pelatihan bagi petugas pembina dan pendamping PUAP

- b. Rekrutmaen dan pelatihan bagi Penyelia Mitra Tani
- c. Pelatihan bagi pengurus gapoktan
- d. Pendampingan bagi petani oleh penyuluh pendamping
- 2. Optimalisasi potensi agribisnis di desa miskin dan tertinggal, melalui :
 - a. Identifikasi potensi desa
 - b. Penentuan usaha agribisnis (budidaya dan hilir) unggulan
 - c. Penyusutan pelaksanaan RUB berdasarkan usaha agribisnis unggulan.
- 3. Penguatan modal bagi petani kecil, buruh tani dan rumah tangga tani miskin kepada sumber permodalan, melalui :
 - a. Penyaluran BLM PUAP kepada pelaku agribisnis melauai gapoktan
 - b. Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan sumber permodalan lainnya
- 4. Pendampingan gapoktan dilaksanakan melalui :
 - a. Penempatan dan pengurusan Penyuluh Pendamping di setiap gapoktan
 - b. Penempatan dan penugasan PMT di setiap kabupaten atau kota (Departemen Pertanian, 2008).

2.8.3. Pembinaan dan Pengendalian PUAP

Pembinaan dan Pengendalian Tim Pusat antara lain :

- 1. Mengembangkan *operation room* sebagai pusat pengendali PUAP.
- 2. Mengembangkan *data base* PUAP (Gapoktan, Penyuluh Pendamping, PMT dan Usaha Agribisnis Gapoktan)
- 3. Melakukan pertemuan reguler dan kunjungan lapangan ke provinsi dan kabupaten atau kota untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan.

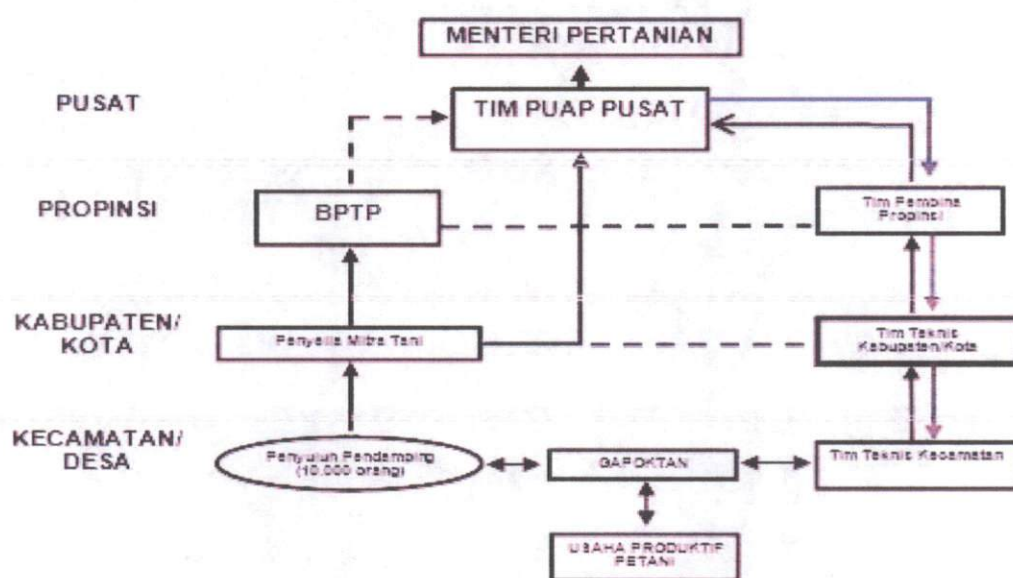
Pembinaan dan Pengendalian Tim Propinsi antara lain :

- 1. Gubernur diharapkan dapat membentuk *operation room*.
- 2. Tim Pembina PUAP dapat memanfaatkan *data base* yang dikembangkan Tim Pusat sebagai bahan penyusunan laporan.
- 3. Melakukan pertemuan reguler dan kunjungan lapangan ke kabupaten atau kota dan kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan.

Pembinaan dan Pengendalian Tim Kabupaten atau Kota antara lain :

1. Bupati atau Walikota diharapkan dapat membentuk *operation room*.
2. Tim Teknis Kabupaten atau Kota dapat memanfaatkan *data base*, serta perangkat keras dan lunak komputer.
3. Melakukan pertemuan reguler dan kunjungan lapangan ke kecamatan dan desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan (Departemen Pertanian, 2008).

Secara rinci alur pembinaan dan pengendalian PUAP dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 2. Alur Pembinaan dan Pengendalian PUAP

Keterangan:

- > Kunjungan Kerja
- > Pelaporan
- > Koordinasi
- =====> Pendampingan

(Departemen Pertanian, 2008).

2.9. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian Rusbina (2010) dengan judul "*Analisis Komparatif Sistem Usahatani Antara Pra Puap Dan Masa Puap Petani Padi Sawah Gapoktan Sinamar*"

Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota” dijelaskan bahwa kegiatan usahatani anggota Gapoktan Sinamar sebelum dan masa PUAP tidak mengalami perbedaan. Hanya pada penggunaan bibit setelah mendapat bantuan dana PUAP, petani sudah memakai benih yang bersertifikat, sedangkan penggunaan teknologi belum terlihat adanya kemajuan. Jika diuji secara statistik, belum terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan dan keuntungan yang diterima petani pada pra PUAP dan masa PUAP, karena lahan petani yang masih relatif kecil.

Hasil penelitian Wijono (2005), yang berjudul “*Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan*” menjelaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan memutus mata rantai kemiskinan itu sendiri, antara lain dengan memperluas akses Usaha Kecil dan Mikro (UKM) dalam mendapatkan fasilitas permodalan yang tidak hanya bersumber dari lembaga keuangan formal tapi juga dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Potensi yang cukup besar tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal, karena LKM masih menghadapi berbagai kendala dan keterbatasan antara lain aspek kelembagaan yang an ini jugatumpang tindih, keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan LKM dan kecukupan modal.

Dalam penelitian ini persamaan dengan penelitian terdahulu adalah melihat tentang pelaksanaan program BLM-PUAP dan keberadaan lembaga keuangan mikro dalam mengelola kredit untuk pertanian. Sedangkan perbedaan dengan skripsi terdahulu selain melihat hal diatas penelitian ini juga melihat pelaksanaan BLM-PUAP yang difokuskan pada sistem simpan pinjam dan penetapan bunga kreditnya oleh Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) selain itu penelitian ini juga melihat manfaat yang diperoleh oleh anggota Gapoktan yang menggunakan dana BLM-PUAP, khususnya pada anggota yang mengusahakan usahatani padi sawah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada LKM-A Agro Floris Prima yang merupakan salah satu unit usaha Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Agro Floris. LKM-A ini terletak di Kelurahan Lubuk Minturun Sungai Lareh Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Pemilihan tempat ini dilakukan secara sengaja (*Purposive*), berdasarkan pertimbangan bahwa Gapoktan Agro Floris Prima merupakan salah satu dari 7 gapoktan di Kota Padang yang menerima bantuan dana program BLM PUAP tahap I Tahun Anggaran 2009 sesuai Surat Keputusan Wali Kota Nomor 589 tahun 2009 tentang Penetapan Penyuluh Pertanian Pendamping dan Gabungan Kelompok Tani Penerima Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Kota Padang Tahun Anggaran 2009 (Lampiran 2).

Pemilihan LKM-A ini sebagai tempat penelitian juga dikarenakan kemudahan dalam memperoleh data-data, dimana Gapoktan penerima dana program BLM PUAP tahap I ini telah membentuk LKM-A dan sudah beroperasi setelah cairnya dana program BLM-PUAP. Kemudian LKM-A sudah mempunyai data-data dan laporan yang lebih baik dibandingkan penerima tahap II. Disamping itu, menurut penilaian PMT Kota Padang, Gapoktan Agro Floris termasuk baik dalam pengelolaan dana BLM PUAP di Kota Padang, dimana sampai dengan bulan Mei 2012 perkembangan dana yang dikelola oleh LKM-A Agro Floris Prima sudah mencapai Rp. 279.860.000,-. Waktu penelitian ini dilakukan selama dua bulan terhitung dari bulan Juni-Juli 2012.

3.2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Sedangkan jenis penelitian deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus (*case study*). Penelitian studi kasus ini adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari

keseluruhan personalitas. Pengelolaan dana program BLM-PUAP di Sumatera Barat dilakukan secara khusus dan berbeda dengan provinsi lain di Indonesia, dimana setiap gapoktan penerima dana PUAP harus membentuk dan mengfungsikan LKM-A sebagai pengelola dana program BLM-PUAP yang dikucurkan kepada gapoktan tersebut. Gapoktan Agro Floris merupakan salah satu gapoktan penerima dana program BLM-PUAP tahun 2008. Untuk pengelolaan dana tersebut, Gapoktan Agro Floris membentuk dan mengfungsikan unit usaha otonomnya yaitu LKM-A Agro Floris Prima.

Metode deskriptif ini merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidik. Sedangkan tujuan digunakannya metode deskriptif jenis studi kasus (*case study*) ini adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus ataupun status dari individu, yang kemudian dari sifat-sifat khas di atas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum. Penelitian studi kasus juga ditujukan untuk mendapatkan keterangan yang terperinci dan mendapatkan informasi mengenai variabel – variabel yang diamati (Nasir, 2003).

Hal-hal yang dideskripsikan diantaranya adalah gambaran umum, profil LKM-A Agro Floris Prima, aktivitas pelaksanaan sistem simpan pinjam dalam menjalankan BLM-PUAP, dan manfaat yang ditimbulkan bagi usahatani padi sawah anggota.

3.3. Teknik Pengambilan Responden

Pemilihan responden dalam penelitian ini berdasarkan atas keterlibatan dan pengetahuan masing-masing responden terhadap pelaksanaan BLM-PUAP yang dikelola oleh LKM-A Agro Floris Prima. Responden dari gapoktan yaitu pengurus gapoktan yang berkaitan dengan pelaksanaan BLM-PUAP, seperti ketua, sekretaris, dan bendahara, sedangkan responden dari pengelola LKM-A seperti manajer LKM-

A, bagian administrasi, pembiayaan dan keuangan, penggalangan dana, kasir/*teller* yang berkaitan dengan pelaksanaan BLM-PUAP.

Pada pengambilan responden dari anggota LKM-A, sampel diambil secara *purposive*, dimana populasi diambil dari anggota Gapoktan Agro Floris yang mengusahakan tanaman padi sawah, sementara anggota yang dijadikan sampel penelitian adalah anggota LKM-A yang meminjam dana BLM-PUAP. Pengambilan sampel petani padi sawah dikarenakan rata-rata anggota LKM-A yang meminjam adalah petani padi sawah, karena pada Gapoktan Agro Floris ini banyak kelompok tani yang tergabung dalam keanggotaan gapoktan mengusahakan tanaman padi sawah, selain itu menurut ketua Gapoktan Agro Floris dari hasil kesepakatan bersama, dana BLM-PUAP ini memang diprioritaskan untuk membantu permodalan anggota yang mengusahakan tanaman padi sawah, karena untuk jenis tanaman dan usaha lain, seperti tanaman hias, telah banyak bantuan pemerintah terkait pengembangan usaha tanaman hias di Gapoktan Agro Floris.

Tabel 1. Rincian Sampel

No	Kelompok Tani	Ketua	Petani Padi Sawah Pengguna BLM-PUAP	Sampel
1	Telaga biru	Jamaris ,SP	16	5
2	Bougenvile	Fitri Yani	13	4
3	Pertiwi Nurseri	Darniwilis	17	5
4	Lubuk Ramang	Firdaus Kader	16	4
5	Al-Fitrah	Mustapa	9	3
6	Prima Lestari	Destina Elita	8	3
7	Perindu	Rustam	6	3
8	Budi Sepakat	Muslim Adang	11	3
Jumlah			96	30

Dalam penelitian ini jumlah populasi adalah sebanyak 96 orang yang berasal dari 8 kelompok tani pengguna dana BLM-PUAP dan mengusahakan tanaman padi sawah. Responden penelitian diambil dengan metoda *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan sampel yang dilakukan secara sengaja dengan memilih individu

tertentu dari populasi. Dimana yang dijadikan sampel adalah petani padi sawah yang meminjam dana BLM-PUAP pada bulan Januari sampai dengan Mei 2012, yaitu sebanyak 30 orang petani yang diambilkan dari tiap-tiap kelompok tani.

Tabel 2. Rincian Informan Kunci

No	Rincian informan kunci	Responden (orang)
1	Pengurus Gapoktan Agro Floris	1
2	Pengelola LKM-A Agro Floris Prima	1
3	Penyelia Mitra Tani	1
4	Penyuluh Pendamping	1
Jumlah		4

Untuk memperkaya data, maka dilakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait sebagai *key informan* yang dipilih secara sengaja (*purposive*). Informan kunci yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengurus Gapoktan Agro Floris, Pengelola LKM-A Agro Floris Prima, Penyuluh Pendamping dan PMT (Penyelia Mitra Tani). Pengurus Gapoktan Agro Floris dijadikan informan kunci karena dirasa dapat memberikan informasi tentang profil (*internal*) Gapoktan Agro Floris secara umum, khususnya mengenai program kegiatan, keanggotaan, keuangan, hubungan dengan pihak eksternal dan dalam pengambilan keputusan.

Pengelola LKM-A Agro Floris Prima dijadikan responden (*key Informan*), karena dirasa dapat memberikan informasi tentang pengelolaan keuangan Gapoktan Agro Floris secara umum dan pengelolaan dana program BLM PUAP, dapat diperoleh dari pengelola LKM-A tersebut. Penyuluh Pendamping yang dijadikan *key informan* adalah penyuluh yang bertugas di Gapoktan Agro Floris, sedangkan PMT yang dijadikan *key informan* adalah PMT Kota Padang yang wilayah kerjanya termasuk Kecamatan Koto Tangah.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Rincian data-data yang dikumpulkan beserta sumbernya dapat dilihat sebagaimana Tabel 3.

Tabel 3. Jenis Data, Teknik dan Sumber Data

No.	Kriteria	Teknik Pengumpulan Data	Sumber Data
1.	Data Primer	Wawancara langsung dan observasi, dengan menggunakan daftar wawancara dan kuisioner	Pengelola LKM-A, PMT, Pengurus Gapoktan, Penyuluh Pendamping, petani anggota Gapoktan, dan LKM-A
2.	Data Sekunder	Studi Kepustakaan terhadap: laporan-laporan kegiatan dan keuangan serta dokumen-dokumen lain.	Gapoktan Agro Floris, LKM-A Agro Floris Prima, PMT, Sekretariat PUAP, Penyuluh Pendamping Internet dan Badan Pusat Statistik (BPS)

Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan kunci (*key Informan*). *Key Informan* tersebut adalah pengelola LKM-A Agro Floris Prima, Penyelia Mitra Tani (PMT) Kota Padang, pengurus Gapoktan Agro Floris, Petugas Penyuluh Pendamping Kecamatan Koto Tangah, anggota Gapoktan yang juga sebagai anggota LKM-A Agro Floris Prima. Sedangkan data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder yang dikumpulkan berupa laporan-laporan kegiatan, laporan-laporan mengenai keuangan maupun dokumen-dokumen lain. Data-data sekunder ini diperoleh dari Sekretariat Tim PUAP Sumatera Barat, Sekretariat Tim PUAP Kota Padang, Gapoktan Agro Floris, LKM-A Agro Floris Prima, PMT, Penyuluh Pendamping, BPS, dan sumber-sumber lain yang terkait dengan penelitian.

3.5. Variabel yang Diamati

Berdasarkan tujuan penelitian ini maka variabel-variabel yang diamati penulis rinci sebagai berikut:

- A. Pada tujuan pertama yaitu untuk mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan simpan pinjam BLM-PUAP oleh LKM-A Agro Floris Prima, maka variabel yang diamati adalah:
 1. Profil LKM-A Agro Floris prima, mencakup data tentang:
 - a. Gambaran umum wilayah kerja LKM-A Agro Floris Prima
 - b. Sejarah dan Tujuan berdiri
 - c. Organisasi
 - d. Permodalan
 - e. Keanggotaan
 - f. Usaha dan perkembangannya.
 2. Pelaksanaan simpan pinjam dana BLM-PUAP di LKM-A Agro Floris Prima yang merujuk dari jutlak PUAP, maka variabel yang diamati adalah:
 - a. Penetapan prosedur dan persyaratan simpan pinjam
 - b. Penetapan bunga pinjaman
 - c. Pelaksanaan simpan pinjam
 - d. Rencana dan realisasi pencairan dan penggunaan dana BLM-PUAP kepada anggota
 - e. Hambatan pelaksanaan simpan pinjam BLM-PUAP
 - f. Pencatatan dan pelaporan keuangan oleh LKM-A Agro Floris Prima
- B. Pada tujuan kedua, yaitu menganalisis manfaat BLM-PUAP yang dilaksanakan LKM-A bagi aktivitas usahatani padi sawah petani anggota Gapoktan Agro Floris. Merujuk pada pedoman umum BLM-PUAP terkait indikator *benefit* dan *impact* (Departemen Pertanian, 2008), maka variabel yang diamati adalah :
 - a. Jumlah pinjaman yang diberikan
 - b. Penggunaan dana pinjaman
 - c. Waktu penyaluran pinjaman

3.6. Analisa Data.

Analisis dilakukan berdasarkan kepada tujuan yang ingin dicapai yaitu:

- A. Pada tujuan pertama yaitu untuk mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan simpan pinjam BLM-PUAP oleh LKM-A Agro Floris Prima.

Data-data yang diperoleh untuk pencapaian tujuan pertama dianalisa secara deskriptif kualitatif. Hal ini ditujukan untuk mengetahui dan memaparkan tentang profil LKM-A Agro Floris Prima, dan selanjutnya aktivitas yang dilaksanakan oleh LKM-A Agro Floris Prima dalam menjalankan BLM-PUAP diinterpretasikan sesuai data yang diperoleh. Analisa dan pemaparan tentang profil LKM-A Agro Floris Prima ditujukan untuk memberikan gambaran umum tentang LKM-A Agro Floris Prima, terutama terkait dengan Gapoktan Agro Floris dan program BLM-PUAP. Selanjutnya, deskripsi pelaksanaan simpan pinjam BLM-PUAP di LKM-A Agro Floris Prima, dimaksudkan untuk memaparkan aktivitas yang dijalankan oleh LKM-A Agro Floris Prima dalam pelaksanaan BLM-PUAP, terutama pada tahap penetapan prosedur dan persyaratan pinjaman, bunga pinjaman, biaya operasional LKM-A, rencana dan realisasi pencairan dan penggunaan dana tersebut. Hasil pelaksanaan BLM-PUAP di LKM-A Agro Floris Prima ini selanjutnya dibandingkan dengan beberapa petunjuk, pedoman dan panduan pengelolaan dana di LKM-A.

- B. Pada tujuan kedua, yaitu menganalisis manfaat BLM-PUAP di LKM-A bagi aktivitas agribisnis pedesaan.

Untuk mendapatkan jawaban dari tujuan kedua, maka analisa yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Untuk melihat manfaat BLM-PUAP bagi aktivitas usaha padi sawah digunakan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh dengan melalui panduan kuesioner yang telah disiapkan. Selain itu sumber data juga diperkuat dengan melakukan observasi lapangan terhadap perkembangan kegiatan usaha petani padi sawah di wilayah penelitian. Semua informasi yang diperoleh akan didokumentasikan dalam bentuk catatan harian dan data disajikan dalam tabel distribusi frekuensi kualitatif.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Umum Kecamatan Koto Tangah Kelurahan Lubuk Minturun Sungai Lareh

Kelurahan Lubuk Minturun Sungai Lareh berada di Kecamatan Koto Tangah, mempunyai luas wilayah 23,29 Km² terdiri atas dataran sebesar 26,07% dan 73,93% merupakan daerah perbukitan/pergunungan. Ketinggian tanah dari permukaan laut adalah 22 m dpl dan suhu rata-rata 33°C. Kelurahan Lubuk Minturun Sungai Lareh mempunyai topografi wilayah datar sampai berbukit. Tipe penggunaan lahan adalah untuk sawah irigasi, kebun campuran, permukiman dan pekarangan, belukar, serta hutan. Jenis tanah pada lahan sawah adalah *Typic endoaquepts* dan pada lahan kering *Typic dystrodepts*.

Adapun batas administrasi Kelurahan Lubuk Minturun Sungai Lareh adalah :

Sebelah Utara	:	Batang Air Dingin
Sebelah Selatan	:	Kelurahan Gunung Sarik
Sebelah Barat	:	Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto
Sebelah Timur	:	Kabupaten Solok

4.1.1 Penduduk di Kelurahan Lubuk Minturun Sungai Lareh

Kelurahan Lubuk Minturun Sungai Lareh mempunyai jumlah penduduk sebesar 7.237 jiwa dan kepadatan penduduk sebesar 311 jiwa/Km². Jumlah penduduk terbesar terdapat pada usia 5 – 9 tahun yakni sebesar 12,13%, diikuti dengan usia 10-14 tahun dengan 11%. Sementara untuk jumlah penduduk di usia produktif rata-rata berkisar antara 6 – 9 % dari total keseluruhan penduduk Kelurahan Lubuk Minturun. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4 mengenai jumlah penduduk menurut kelompok umur.

Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kelurahan Lubuk Minturun Sungai Lareh Tahun 2011

No.	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)	%
		Laki-Laki	Perempuan		
1	0 - 4 Tahun	403	347	750	10.36
2	5 - 9 Tahun	416	462	878	12.13
3	10 - 14 Tahun	410	386	796	11.00
4	15 - 19 Tahun	377	360	737	10.18
5	20 - 24 Tahun	366	314	680	9.40
6	25 - 29 Tahun	354	310	664	9.18
7	30 - 34 Tahun	248	281	529	7.31
8	35 - 39 Tahun	244	254	498	6.88
9	40 - 44 Tahun	249	243	492	6.80
10	45 - 49 Tahun	203	184	387	5.35
11	50 - 54 Tahun	138	128	266	3.68
12	55 - 59 Tahun	73	58	131	1.81
13	60 - 64 Tahun	71	88	159	2.20
14	65 - 69 Tahun	50	41	91	1.26
15	70 - 74 Tahun	52	55	107	1.48
16	> 75 Tahun	30	42	72	0.99
	Jumlah	3,684	3,553	7,237	100.00

Sumber : Profil Kelurahan Lubuk Minturun Sungai Lareh, 2011

4.1.2 Mata Pencaharian di Kelurahan Lubuk Minturun Sungai Lareh

Mata pencaharian penduduk Kelurahan Lubuk Minturun Sungai Lareh beragam yaitu pegawai negeri sipil, ABRI, polisi, swasta, petani, tukang, pensiunan, dan lainnya. Jumlah penduduk dengan mata pencaharian dominan yaitu sebesar 451 jiwa petani dan 329 jiwa sebagai buruh tani. Hal ini didukung dengan luasnya lahan pertanian yang tersedia dan banyaknya ditemui usaha pertanian masyarakat yang tersebar di sepanjang Jalan Lubuk Minturun Sungai Lareh. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 5 mengenai mata pencaharian penduduk di Kelurahan Lubuk Minturun.

Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Kelurahan Lubuk Minturun Sungai Lareh Tahun 2011

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)
1	Karyawan	
	a. Pegawai Negeri Sipil	109
	b. ABRI	59
	c. Polisi	76
	d. Swasta	352
2	Tani	451
3	Pertukangan	50
4	Buruh Tani	329
5	Pensiunan	49
6	Nelayan	315
	Jumlah	1790

Sumber : Profil Kelurahan Lubuk Minturun Sungai Lareh, 2011

4.1.3. Sarana Pendidikan, Kesehatan dan Peribadatan di Kelurahan Lubuk Minturun Sungai Lareh

Untuk kelengkapan sarana di Kelurahan Lubuk Minturun sudah cukup memadai. Dari sarana pendidikan, ketersediaan jenis pendidikan yang ada di Kelurahan Lubuk Minturun Sungai Lareh adalah Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar dan SLTP, sedangkan SLTA dan Perguruan Tinggi tidak terdapat di kelurahan ini. Agar dapat mengakses sarana pendidikan tingkat SLTA penduduk Kelurahan Lubuk Minturun Sungai Lareh bersekolah di Kecamatan Koto Tangah. Untuk Pelayanan kesehatan sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan tenaga medisnya. Oleh karena itu, perlu diperhatikan kuantitas dan kualitas sarana tersebut, karena keberadaannya sangat membantu dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta dapat mengendalikan perkembangan dan pertumbuhan penduduk. Di Kelurahan Lubuk Minturun Sungai Lareh terdapat 9 unit pelayanan kesehatan masyarakat. Terakhir, untuk ketersediaan sarana peribadatan harus menjadi perhatian karena sarana peribadatan merupakan tempat melakukan hubungan antara manusia dengan Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Di Kelurahan Lubuk Minturun Sungai Lareh terdapat 23 unit sarana peribadatan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 6 mengenai Sarana di kelurahan Lubuk Minturun Sungai Lareh.

Tabel 6. Jumlah Sarana Pendidikan, Kesehatan dan Peribadatan di Kelurahan Lubuk Minturun Sungai Lareh Tahun 2011

No.	a. Sarana Pendidikan	Jumlah (Unit)
1	Taman Kanak-Kanak	3
2	Sekolah Dasar	5
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	1
4	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	1
5	Perguruan Tinggi	0
Jumlah		10
No.	b. Sarana Kesehatan	Jumlah (Unit)
1	Puskesmas	0
2	Puskesmas Pembantu	1
3	Posyandu	8
4	Toko Obat/Apotek	0
Jumlah		9
No.	c. Sarana Peribadatan	Jumlah (Unit)
1	Mesjid	9
2	Mushalla	14
3	Lainnya	0
Jumlah		23

Sumber : Profil Kelurahan Lubuk Minturun Sungai Lareh, 2011

4.1.4. Pertanian

Perekonomian Kelurahan Lubuk Minturun Sungai Lareh juga didasarkan pada sektor pertanian. Kegiatan pertanian yang ada berupa sawah, tegalan, ladang, dan usaha perkebunan. Kegiatan pertanian lainnya adalah tanaman buah-buahan (seperti rambutan dan durian), sayur-sayuran (seperti bayam, kangkung, dan lain-lain), dan tanaman hias. Untuk buah-buahan dan sayur-sayuran, pemasarannya telah sampai ke luar Kota Padang seperti Sicincin, Pariaman, Padang Panjang dan lainnya. Sedangkan untuk tanaman hias pemasarannya telah sampai ke luar Provinsi Sumatera Barat, bahkan ada yang diekspor ke Belanda (tanaman Rapis).

4.2 Identitas Petani Sampel

Petani yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah petani anggota Gapoktan dan LKM-A yang mengusahakan tanaman padi sawah dan meminjam dana BLM-PUAP dari LKM-A Agro Floris Prima. Identitas petani responden mencakup berbagai aspek yaitu umur, tingkat pendidikan, luas lahan, status kepemilikan lahan, pengalaman berusahatani, jumlah tanggungan dalam

keluarga, dan sumber modal sebelumnya. Aspek-aspek tersebut akan berpengaruh terkait usahatani yang dijalankan karena dalam usahatani, petani tidak hanya sebagai pekerja namun juga berperan sebagai orang yang berfungsi dalam pengambilan keputusan terkait pelaksanaan usahatani padi sawahnya.

Tabel 7. Identitas Petani Responden Pengguna Dana BLM-PUAP

No.	Uraian	Petani Padi Sawah	
		Jumlah (orang)	(%)
1.	Umur (tahun)		
	a. 20-39	18	60,00
	b. 40-59	9	30,00
	c. ≥ 60	3	10,00
2.	Tingkat Pendidikan		
	a. SD	12	40,00
	b. SMP	10	33,33
	c. SMA	7	23,33
	d. PT	1	3,33
3.	Luas Lahan		
	a. 0,25– 0,75 ha	23	76,66
	b. $> 0,75$ ha	7	23,33
4.	Status Kepemilikan		
	a. Milik Sendiri	18	60,00
	b. Sewa	12	40,00
5.	Pengalaman bertani		
	a. 1-19 tahun	23	76,66
	b. 20 – 39 tahun	6	20,00
	c. ≥ 40 tahun	1	3,33
6.	Jumlah Tanggungan Keluarga		
	a. 1 – 3 orang	18	60,00
	b. 4 – 6 orang	10	33,33
	c. ≥ 7 orang	1	3,33
7.	Sumber Modal Sebelumnya		
	a. Modal sendiri	9	30,00
	b. Rentenir	27	70,00

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan gambaran mengenai umur, tingkat pendidikan, luas lahan, status kepemilikan lahan, pengalaman berusahatani, jumlah tanggungan dalam keluarga, dan sumber modal sebelumnya. Pada Tabel 7 terlihat bahwa petani responden yang menanam padi sawah dan mendapatkan bantuan kredit dari LKM-A kebanyakan berumur 20-39 tahun dengan jumlah petani sebanyak 18 orang (60%), sedangkan untuk responden pada usia 40-59 tahun adalah sebanyak 9 orang (30%), dan untuk responden berusia ≥ 60 adalah

sebanyak 3 orang (10%). Dilihat dari umur responden yang diambil pada penelitian ini. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa petani responden yang ditemui masih berada pada usia yang produktif.

Tingkat pendidikan petani responden dapat dikatakan masih rendah, hal ini terbukti banyaknya responden yang masih berpendidikan sampai SD. Jumlah petani responden yang berpendidikan SD yaitu sebanyak 12 orang (40%), untuk petani responden yang pendidikan SMP adalah sebanyak 10 orang (33,33%), sedangkan untuk yang berpendidikan SMA adalah sebanyak 7 orang (23,33%) dan petani responden ada yang berpendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi yaitu 1 orang (3,33%). Berdasarkan tingkat pendidikan petani responden dalam penelitian ini dapat disimpulkan kalau rata-rata tingkat pendidikan petani responden masih cukup rendah.

Berdasarkan luas lahan petani responden, petani yang memiliki luas lahan 0,25– 0,75 ha adalah sebanyak 23 orang (76,66%) dan untuk petani yang memiliki luas lahan > 0,75 ha adalah sebanyak 7 orang (23,33%). Disini dapat dilihat dari luas lahan petani responden kebanyakan petani memiliki luas lahan antara 0,25-0,75 ha. Jika dilihat dari total luas keseluruhan luas lahan petani responden adalah sebesar 21,1 ha dan rata-rata luas lahan petani responden adalah sebesar 0,703 ha, maka dapat disimpulkan rata-rata lahan yang dimiliki oleh tiap petani disini cukup besar.

Status kepemilikan lahan petani responden terdiri dari lahan milik sendiri dan lahan yang petani sewa dengan sistem bagi hasil. Petani yang memiliki lahan sendiri adalah sebanyak 18 orang (60%) dan petani yang menyewa lahan adalah sebanyak 12 orang (40%). Dilihat dari status lahan petani, cukup berimbang antara petani yang memiliki lahan sendiri dengan petani yang menyewa lahan. Sementara untuk pengalaman dalam berusaha tani, kebanyakan petani responden dalam penelitian ini yang telah berusaha tani selama 1-19 tahun adalah sebanyak 23 orang (76,66), sedangkan yang telah berusahatani antara 20-39 tahun adalah sebanyak 6 orang (20%), diantara responden tersebut juga ada yang pengalaman usahatannya \geq 40 tahun yaitu sebanyak 1 orang (3,33).

Berdasarkan jumlah tanggungan keluarga petani responden, responden yang memiliki jumlah tanggungan 1-3 orang adalah sebanyak 18 orang (60%), sedangkan yang memiliki tanggungan sebanyak 4-6 orang adalah sebanyak 10 orang (33,33%) dan yang memiliki tanggungan ≥ 7 orang hanya 1 orang (3,33%), serta 1 orang responden lagi belum memiliki tanggungan. Terakhir, untuk sumber permodalan sebelumnya, para petani responden rata-rata bergantung dari modal yang diberikan rentenir sebanyak 23 orang (70%) dan hanya 9 orang petani (30%) yang mampu mencukupi kebutuhan usahatannya dari modal mereka sendiri. Ini menunjukkan bahwa selama ini petani cenderung kesulitan dalam memenuhi biaya usahatani mereka dari musim ke musim, mereka cenderung bergantung pada rentenir dalam memenuhi kebutuhan usahatannya. Menurut petani mereka meminjam ke rentenir karena proses peminjaman yang mudah dan tidak ada lagi alternatif tempat meminjam modal bagi petani.

4.3 Profil LKM-A Agro Floris Prima

4.3.1. Sejarah dan Tujuan Pendirian LKM-A Agro Floris Prima

Gapoktan Agro Floris terbentuk atas dasar keinginan masyarakat Kelurahan Lubuk Minturun Kecamatan Koto Tengah yang tergabung dalam beberapa kelompok tani yang ada pada daerah tersebut untuk mengatasi masalah permodalan. Dasar pembentukan LKM-A ini merujuk kepada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 273/KPTS/OT.160/4/2007 tentang Kelembagaan Tani. Pembentukan LKM-A ini juga didasari oleh kebijakan pemerintah agar penyaluran dana program BLM-PUAP yang dimulai pada tahun anggaran 2008 dapat disalurkan melalui Gapoktan, sehingga penyaluran dana BLM-PUAP tepat sasaran dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu peningkatan usaha produktif anggota.

Gapoktan Agro Floris didirikan secara resmi pada tanggal 31 Mei 2007 setelah diadakannya musyawarah antara kelompok-kelompok tani yang ada di Kelurahan Lubuk Minturun Kecamatan Koto Tengah. Wadah ini berdiri atas dasar kemauan dan kesepakatan mereka dan merupakan cermin solusi atas

permasalahan-permasalahan yang dihadapi para petani dengan tujuan untuk meningkatkan perkembangan usaha dan kesejahteraan anggotanya.

Sebagai wujud nyata untuk mencapai tujuan tersebut, maka Gapoktan Agro Floris juga membentuk dan mengaktifkan beberapa unit usaha otonomnya, yaitu unit usaha saprodi, unit pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, unit usaha pembenihan dan unit usaha simpan pinjam. Unit usaha simpan pinjam inilah yang kemudian ditransformasikan menjadi unit usaha LKM-A (Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis) yang diberi nama dengan LKM-A "Agro Floris Prima". LKM-A Agro Floris Prima secara resmi terbentuk pada tanggal 13 April 2008 sebagai unit usaha simpan pinjam dan pengelola keuangan Gapoktan Agro Floris.

4.3.2. Organisasi

Kementerian Pertanian Indonesia (2008), menjelaskan bahwa Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) merupakan organisasi petani dipedesaan yang dibentuk secara musyawarah dan mufakat untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha anggotanya. Untuk membangun gapoktan yang ideal sesuai dengan tuntutan organisasi masa depan, diperlukan dukungan sumberdaya manusia yang berkualitas melalui pembinaan yang berkelanjutan. Proses penumbuhan dan pengembangan gapoktan yang kuat dan mandiri diharapkan secara langsung dapat menyelesaikan permasalahan petani dalam pembiayaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani, pembinaan kelompok tani diarahkan pada penerapan sistem agribisnis, peningkatan peranan, peran serta petani dan anggota masyarakat pedesaan, sehingga dalam mengukur kapasitas dan aspek tata-kelola organisasi dalam sebuah Gapoktan PUAP atau LKM-A, harus memperhatikan variabel-variabel berikut ini:

a. Aturan yang dimiliki.

Aturan yang harus dimiliki oleh LKM-A adalah Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), yang disusun oleh petani anggota gapoktan untuk menentukan arah dan kebijakan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

Sejauh ini LKM-A Agro Floris Prima telah menyusun Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dengan cukup baik, AD dan ART disusun sedemikian rupa agar dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dalam AD dan ART LKM-A Agro Floris Prima terangkum semua aturan-aturan dan kebijakan yang telah disusun oleh pengelola LKM-A, mulai dari keanggotaan, hak dan kewajiban anggota, pemilihan pengurus, tugas dan wewenang pengurus, anggaran belanja, program kerja sampai pada rapat anggota.

b. Pengelola LKM-A.

Pengelola dan pengurus dalam suatu organisasi lembaga keuangan yang sehat sebaiknya terpisah. Secara umum pengurus mempunyai tugas dan fungsi merumuskan kebijakan organisasi, pengawasan, melaporkan perkembangan dan kemajuan organisasi kepada pihak internal dan eksternal. Sedangkan pengelola merupakan pelaksana operasional bisnis keuangan organisasi LKM-A sesuai dengan AD/ART. Pada LKM-A Agro Floris Prima telah diatur tentang cara pengelolaan organisasi yang cukup baik. Pada awal pembentukannya pengurus LKM-A langsung menunjuk beberapa orang anggota yang dianggap mampu untuk dapat mengelola LKM-A, nantinya pengelola akan bekerja bersama-sama dengan pengurus dalam menjalankan LKM-A. Berdasarkan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) tutup buku tahun 2010, Pengurus LKM-A adalah manajer umum, sedangkan Pengelola LKM-A terdiri dari Bagian Penggalangan Dana, Pembukuan, Pembiayaan dan *Teller/Kasir*.

c. Rencana Kerja.

Rencana Kerja organisasi merupakan rencana bisnis yang telah diputuskan melalui rapat anggota dan merupakan dasar bagi pengelola LKM-A dalam pengembangan usaha dan bisnis LKM-A. Pembentukan rencana yang ideal sebaiknya dilakukan secara partisipatif. Dalam menetapkan rencana kerja LKM-A, pengurus telah menetapkannya dengan cukup baik, dimana dalam Anggaran Rumah Tangga juga telah ada penetapan rencana kerja LKM-A, pada Anggaran Rumah Tangga LKM-A rencana kerja terdiri dari rencana kerja jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Namun pada pengaplikasiannya LKM-A selama

ini hanya terpaku pada kegiatan simpan-pinjam saja, rencana kerja dibahas hanya sekali setahun yaitu pada Rapat Anggota Tahunan.

d. Rapat Anggota Secara Berkala.

Pertemuan atau rapat anggota yang dilaksanakan secara berkala dan terjadwal merupakan alat ukur kedinamisan pengelolaan LKM-A sebagai organisasi ekonomi. Selama ini dalam menjalankan LKM-A selalu mengadakan rapat berkala dengan anggotanya terkait perkembangan kegiatan LKM-A. Pengurus mengadakan rapat setiap sekali dalam satu bulan, rapat juga bisa diadakan jika dipandang perlu oleh pengurus, selain itu terdapat Rapat Anggota Tahunan yang diadakan setiap sekali satu tahun untuk membahas tentang perkembangan LKM-A dalam setahun masa kerjanya. Dalam mengadakan rapat, pengurus LKM-A memutuskan sesuatu dengan cara musyawarah dan mufakat. Pada pelaksanaan rapat anggota, yang dibahas adalah program kerja, rencana anggaran belanja dan anggaran rumah tangga.

e. Badan Hukum.

Badan Hukum merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh LKM-A sebagai lembaga keuangan mikro yang mengelola dana petani dan masyarakat. LKM-A disarankan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Koperasi Nomor 25 tahun 1992 dan dalam operasionalnya menggunakan PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi (Departemen Pertanian, 2008).

LKM-A Agro Floris Prima sampai saat ini belum memiliki badan hukum yang sah. Menurut Ketua gapoktan sampai saat ini baru Gapoktan Agro Floris yang sudah memiliki badan hukum. Selain itu pengurus memandang badan hukum yang dimiliki gapoktan sudah cukup untuk sekaligus menaungi LKM-A. Ini dikarenakan LKM-A merupakan unit usaha otonom yang berada dibawah kendali gapoktan.

Organisasi dan manajemen yang baik merupakan tulang punggung keberhasilan suatu kelompok, demikian pula halnya dengan LKM-A. Penyusunan struktur organisasi dan manajemen LKM-A Agro Floris Prima Gapoktan Agro

Floris diarahkan untuk dapat memenuhi kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai oleh LKM-A ini.

4.3.3. Permodalan

Anggaran Rumah Tangga (ART) LKM-A Agro Floris Prima Gapoktan Agro Floris menjelaskan bahwa modal LKM-A terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok anggota, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. Modal pinjaman dapat berasal dari pinjaman anggota, pinjaman dari lembaga keuangan lain, serta dari sumber-sumber lainnya yang sah.

Berdasarkan data pembukuan LKM-A Agro Floris Prima Januari 2012, dapat dilihat bahwa modal yang dimiliki oleh LKM-A Agro Floris Prima setelah adanya dana BLM-PUAP dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Keadaan Modal LKM-A Agro Floris Prima per Januari 2012

No.	Sumber Modal	Jumlah (Rp.)	Porsentase dari keseluruhan Modal (%)
1.	Simpanan Pokok	1.850.000,-	1,48
2.	Simpanan Wajib	1.530.000,-	1,23
3.	Simpanan Sukarela (tabungan)	1.180.000,-	0,95
4.	Dana Prima Tani	20.000.000,-	16,06
5.	Dana BLM- PUAP	100.000.000,-	80,28
	Jumlah	124.560.000,-	100

Sumber: Laporan Tahunan LKM-A Agro Floris Prima,

Berdasarkan Tabel 8 tersebut dapat dilihat bahwa permodalan LKM-A Agro Floris Prima yang berasal dari anggota sendiri hanya 3,66%, sebagian besar adalah modal yang berasal dari dana program BLM-PUAP yaitu sebanyak 80,28% dan sisanya dari dana Prima Tani. Keadaan ini disebabkan karena berdirinya LKM-A ini adalah untuk mengelola dana PUAP yang diperuntukkan kepada Gapoktan Agro Floris, sehingga modal awalnya sebenarnya berasal dari dana PUAP. Namun untuk menunjang permodalan di LKM-A Agro Floris Prima, pengelola juga mengumpulkan modal yang berasal dari simpanan anggota. Selain

itu sebelum adanya BLM-PUAP ini LKM-A juga telah mengelola dana bantuan Prima Tani sebesar Rp.20.000.000,-. Diharapkan dengan adanya BLM-PUAP yang dikelola oleh LKM-A ini, dapat memberikan bantuan pembiayaan usahatani dan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada petani untuk dapat mengakses kredit bagi usahatannya, sehingga tujuan untuk membantu permodalan anggota dalam berusaha tani dapat diwujudkan. Selain itu juga diharapkan agar nantinya setiap anggota dapat lebih aktif di keanggotaan LKM-A dan gapoktan.

Permodalan utama dari LKM-A didominasi oleh bantuan dana program yang berasal dari luar LKM-A, dimana persentase kontribusi pendanaan dari luar LKM-A mencapai 96,34% sementara sisanya dari akumulasi simpanan-simpanan anggota yang hanya 3,66%. Hal ini mengindikasikan bahwa LKM-A dalam menjalankan aktivitasnya terlalu bergantung dana dari luar, jika tidak ada dana-dana tersebut LKM-A tidak dapat menjalankan aktivitasnya dengan maksimal. Dalam sebuah organisasi, tidak baik apabila terlalu menggantungkan sumber permodalan yang berasal dari dana luar. Seharusnya pengurus dan pengelola LKM-A dapat lebih aktif lagi dalam menghimpun dana-dana dari anggota supaya dapat berkontribusi lebih banyak dalam membantu kegiatan-kegiatan LKM-A dan agar LKM-A lebih mandiri lagi dalam menghimpun permodalannya. Jika dana dari dalam LKM-A dapat berkontribusi lebih tentunya nanti akan membantu dalam kelancaran kegiatan-kegiatan LKM-A dan akan lebih banyak lagi petani yang bisa mendapatkan layanan simpan-pinjam.

4.3.4. Keanggotaan

Berdasarkan data bulan Mei 2012, jumlah anggota Gapoktan Agro Floris yang telah memanfaatkan dan tergabung dalam keanggotaan LKM-A Agro Floris Prima sampai dengan bulan Mei 2012 adalah sebanyak 119 orang, yang berasal dari berbagai jenis usaha produktif yang mereka usahakan, jumlah anggota tersebut dapat dirinci sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Jumlah anggota LKM-A Agro Floris Prima Menurut Jenis Usaha Per Mei 2012

No.	Jenis Usaha	Jumlah Anggota	Persentase (%)
1.	Tanaman Pangan	96	80,67
2.	Tanaman Hortikultura	3	2,52
3.	Peternakan	4	3,36
4.	Pemasaran	16	13,45
Jumlah		119	100

Sumber: LKM-A Agro Floris Prima, 2012 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 9 tersebut, dapat dilihat bahwa jenis usaha produktif yang paling banyak anggota peminjamnya adalah bidang usaha tanaman pangan khususnya padi sawah yaitu sebanyak 80,67%. Ini dikarenakan banyak kelompok tani yang tergabung dalam keanggotaan Gapoktan yang mengusahakan padi sawah, selain itu dari kesepakatan bersama, dana BLM-PUAP ini memang diprioritaskan untuk membantu permodalan anggota yang mengusahakan tanaman padi sawah, karena untuk jenis usaha dan tanaman lain seperti tanaman hias, telah banyak bantuan pemerintah terkait pengembangan usaha tanaman hias di Gapoktan Agro Floris.

Kegiatan usahatani padi sawah merupakan kegiatan usahatani yang beresiko cukup tinggi, mulai dari serangan hama sampai pada gagal panen. Namun disini pertimbangan dari pihak LKM-A memprioritaskan membantu anggota tanaman padi sawah juga dikarenakan kesulitan modal yang dialami oleh anggota selama ini. Pihak LKM-A yakin dengan bantuan modal serta penyuluhan dan bimbingan terkait pelaksanaan usahatani yang baik dan benar kegiatan usahatani padi sawah anggota dapat berjalan lancar nantinya. Anggota yang meminjam kredit disini, lebih berorientasi pada individu masing-masing petani yang ingin meminjam. Tidak ada kesepakatan atau aturan dari tiap-tiap kelompok tani yang mengatur dan mengarahkan anggotanya dalam meminjam dana kredit pada LKM-A. Peranan kelompok hanya sebagai pemberi izin dan rekomendasi untuk mendapatkan pinjaman bagi anggota.

Selanjutnya jenis usaha tanaman hortikultura dan peternakan adalah jenis usaha yang anggotanya paling sedikit memanfaatkan pelayanan pembiayaan di LKM-A Agro Floris Prima yaitu sebanyak 5,88%. Terakhir untuk usaha pemasaran, di Gapoktan Agro Floris ini bidang pemasaran yang dikembangkan adalah pemasaran tanaman hias, namun karena bidang usaha tersebut telah banyak mendapatkan bantuan terkait pengembangan usaha dan BLM-PUAP diprioritaskan untuk pembiayaan usaha tani padi sawah, maka baru hanya 16 anggota yang meminjam dana PUAP atau hanya 13,45% dari persentase anggota yang meminjam dana BLM-PUAP.

Menurut petunjuk teknis pelaksanaan PUAP Sumatera Barat, keanggotaan LKM-A dibagi atas tiga pengelompokan, yaitu 1) anggota biasa, anggota ini adalah anggota LKM-A yang berasal dari anggota gapoktan penerima dana PUAP, perorangan, dewasa dan memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur oleh LKM-A, 2) anggota luar biasa, yaitu perorangan yang memanfaatkan layanan tabungan LKM-A dan hanya memiliki hak bicara saja, 3) calon anggota, yaitu perorangan dewasa yang telah mengajukan permohonan menjadi anggota LKM-A serta telah memenuhi kewajiban yang telah disyaratkan, memiliki hak bicara tidak hak suara, dan berhak atas pelayanan pinjaman dari LKM-A.

Agar kegiatan pelayanan keuangan dapat tumbuh menjadi besar dan membantu permodalan anggota, maka anggota harus banyak terdiri dari anggota biasa dan calon anggota yang memerlukan layanan keuangan. Keanggotaan dinyatakan sah bila telah mengajukan permohonan tertulis, mendapat persetujuan dalam rapat pengurus, telah menyetor simpanan pokok dan simpanan wajib serta memperoleh buku anggota. Setiap anggota punya hak dan kewajiban yang sama. Setiap anggota wajib mentaati aturan yang telah disepakati dan berdisiplin. Keanggotaan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain tanpa persetujuan pengurus (BPTP Sumatera Barat, 2009).

4.3.5. Usaha dan Perkembangannya

Dalam pengembangan usahanya, LKM-A Agro Floris Prima juga menciptakan berbagai bentuk produk tabungan. Produk ini bertujuan untuk menggalang dana swadaya disamping dana PUAP. Produk-produk simpanan tersebut adalah 1) Simpanan Masyarakat; 2) Simpanan Idul Fitri; 3) Simpanan Qurban; dan 4) Simpanan Pendidikan. Menurut manajer umum LKM-A Agro Floris Prima, pelaksanaan usaha ini dilakukan dengan cara aktif dimana pengelola LKM-A bergerak aktif untuk menggalang dana produk-produk simpanan tersebut agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Perkembangan usaha pembiayaan dengan modal awalnya adalah dana PUAP ini dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Perkembangan Dana BLM-PUAP di LKMA Agro Floris Prima Januari 2010 sampai dengan Mei 2012

No	Bulan	Jumlah Dana (Rp)	Keterangan
1	Januari 2010	54.000.000	-
2	Februari	70.000.000	Naik 29,63%
3	Maret	98.260.000	Naik 40,37%
4	April	107.260.000	Naik 9,15 %
5	Mei	114.260.000	Naik 6,52 %
6	Juni	127.260.000	Naik 11,37%
7	Juli	142.760.000	Naik 12,18%
8	Agustus	151.260.000	Naik 5,95 %
9	September	152.260.000	Naik 0,66 %
10	Oktober	166.260.000	Naik 9,19 %
11	November	176.260.000	Naik 6,01 %
12	Desember	194.260.000	Naik 10,21%
13	Januari 2011	196.260.000	Naik 1,03 %
14	Februari	196.260.000	-
15	Maret	214.260.000	Naik 9,17 %
16	April	210.260.000	Turun -1,86 %
17	Mei	226.260.000	Naik 7,61 %
18	Juni	224.760.000	Turun -0,66 %
19	Juli	222.260.000	Turun -1,11 %
20	Agustus	250.760.000	Naik 12,82%
21	September	257.260.000	Naik 2,59 %
22	Oktober	262.260.000	Naik 1,94 %
23	November	263.760.000	Naik 0,57 %
24	Desember	263.260.000	Turun -0,19 %
25	Januari 2012	269.300.000	Naik 2,24 %
26	Februari	272.800.000	Naik 1,28 %
27	Maret	275.260.000	Naik 0,89 %
28	April	278.900.000	Naik 1,31 %
29	Mei	279.860.000	Naik 0,34 %

Sumber : Laporan Bulanan Akumulasi LKM-A Agro Floris Prima (data diolah)

Namun karena kendala keterbatasan tenaga, produk-produk simpanan tersebut belum terlaksana sesuai harapan. Selayaknya, untuk pelaksanaan usaha ini membutuhkan tenaga tambahan untuk mengumpulkan simpanan dari nasabah, sehingga saat ini pengelola lebih memfokuskan kegiatan dalam pelaksanaan simpan pinjam dana BLM-PUAP bagi anggota.

Usaha inti dari LKM-A Agro Floris Prima saat ini adalah bidang pembiayaan. Perkembangan usaha ini tak terlepas dari kontribusi dana PUAP yang dikucurkan kepada Gapoktan Agro Floris. Disamping itu, pengelola juga berusaha untuk melakukan kegiatan simpan pinjam selancar mungkin, sehingga dana BLM-PUAP dapat terus digulirkan pada anggota. Hal inilah yang menjadikan LKM-A Agro Floris Prima mampu memberikan pelayanan pembiayaan kepada anggotanya.

Walaupun LKM-A Agro Floris Prima belum berbadan hukum, namun berkat komitmen dan keoptimisan pengelola bersama pengurus Gapoktan yang terus aktif bekerjasama dalam perkembangan usaha ini, maka jumlah aset LKM-A Agro Floris Prima terus meningkat. Perkembangan aset ini berasal dari usaha pembiayaan dengan modal awal dari dana PUAP. Pada Tabel 10 diatas terlihat bahwa pada awal dimulai beroperasinya LKM-A Agro Floris Prima, dana yang telah dijadikan usaha pembiayaan berjumlah Rp.54.000.000,-. Kemudian sampai dengan bulan Mei 2012 dana tersebut meningkat menjadi Rp.279.860.000,-. Peningkatan itu tersebut menjadi motivasi bagi pengelola LKM-A Agro Floris Prima untuk terus mengembangkan usahanya dengan dukungan semua pihak, sehingga LKM-A Agro Floris Prima akan terus dapat berkembang dalam membantu masalah pembiayaan anggota, serta dapat menjadi lembaga alternatif pembiayaan usahatani anggota secara berkelanjutan.

4.4 Pelaksanaan Simpan-Pinjam Dana BLM-PUAP di LKM-A Agro Floris Prima Gapoktan Agro Floris

4.4.1. Penetapan Prosedur dan Persyaratan Simpan-Pinjam

Dalam melaksanakan kegiatan simpan-pinjam dana BLM-PUAP, LKM-A Agro Floris Prima terlebih dahulu telah menetapkan beberapa prosedur dan persyaratan yang mengatur kegiatan simpan-pinjam, sehingga nantinya proses

simpan-pinjam dapat berjalan dengan lancar dan berkesinambungan dalam membantu permodalan anggota. Di Gapoktan Agro Floris petani anggota gapoktan yang akan meminjam di LKM-A harus menjadi anggota LKM-A Agro Floris Prima terlebih dahulu. Berdasarkan hasil musyawarah bersama semua anggota Gapoktan Agro Floris maka ditetapkan keputusan mengenai persyaratan untuk dapat menjadi anggota LKM-A Agro Floris Prima. Dimana syarat yang harus dipenuhi adalah :

1. Membayar uang pendaftaran sebesar Rp.20.000,- /anggota.
2. Membayar Simpanan Pokok Rp.50.000,- /anggota dan Simpanan Wajib sebesar Rp.5.000,- /anggota/bulan.

Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib merupakan salah satu syarat yang dipenuhi setiap anggota gapoktan untuk menjadi anggota LKMA Agro Floris Prima dan ditujukan untuk penambahan kas LKM-A dan pembiayaan kegiatan gapoktan. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib ditujukan kepada setiap anggota tanpa terkecuali, sehingga pengurus harus tegas terhadap anggota apabila ada kemacetan dalam pembayaran simpanan pokok dan simpanan wajib. Apabila ada anggota yang selama 6 bulan berturut-turut tidak menyetorkan simpanan wajib perlu segera mendapatkan penanganan oleh pengurus agar segera diketahui penyebabnya. Sampai pada bulan Mei 2012 jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib anggota yang telah terkumpul di kas LKM-A adalah sebesar Rp12.390.000,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Jumlah Total Simpanan Anggota Per Mei 2012

No	Jenis Simpanan	Jumlah (Rp)
1	Simpanan Pokok	5.850.000,-
2	Simpanan Wajib	6.540.000,-
Jumlah		12.390.000,-

Sumber: Laporan Bulanan LKM-A Agro Floris Prima, 2012

Simpanan wajib dan simpanan pokok tidak dapat diambil oleh anggota, kecuali anggota menyatakan keluar dari keanggotaan. Apabila yang bersangkutan tidak bersedia menyetor simpanan wajibnya walaupun memiliki kemampuan dan setelah diberikan penjelasan oleh pengurus tidak juga bersedia maka

keanggotaannya harus dihentikan dan seluruh tabungannya dikembalikan dengan dikenai biaya administrasi 25% dari jumlah tersebut.

Persyaratan simpan-pinjam yang umum diajukan LKM-A Agro Floris Prima dan harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

1. Terdaftar sebagai anggota LKM-A Agro Floris Prima
2. Mengisi RUA (Rencana Usaha Anggota)
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan pasfoto 3x4 sebanyak 1 lembar
4. Mengisi Surat Rekomendasi (Lampiran 8)
5. Mengisi Surat Persetujuan (Lampiran 9)
6. Mengisi Surat Permohonan Pembiayaan (Lampiran 10)

Sedangkan alur prosedur simpan-pinjam BLM-PUAP yang dilaksanakan di LKM-A Agro Floris Prima adalah sebagai berikut :

1. Anggota yang akan meminjam harus melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan.
2. Manajer LKM-A akan melakukan registrasi dan menganalisa permohonan, serta melakukan wawancara dengan anggota yang akan meminjam, kemudian diputuskan permohonan akan disetujui atau ditolak.
3. Bila disetujui, pengelola LKM-A bidang pembukuan akan membuat akad pembiayaan, kartu pembiayaan, buku angsuran dan membuat kuitansi.
4. Selanjutnya kasir LKM-A akan menerima kwitansi dari bidang pembukuan, memeriksa keabsahan dokumen, dan melakukan pembayaran ke nasabah.
5. Terakhir, nasabah akan menanda tangani kwitansi tanda terima dan menerima buku angsuran.

Pada penetapan prosedur simpan-pinjam, pengelola LKM-A berpatokan pada prosedur permohonan dan pencairan dana LKM-A yang dikeluarkan Departemen Pertanian tahun 2008. Dalam memperoleh pinjaman di LKM-A Agro Floris Prima, prosedur dan persyaratan yang ditetapkan sangat mudah dan ringan, sehingga tidak terlalu membebani petani anggota. Berdasarkan hasil wawancara dengan petani sampel, petani cenderung menginginkan administrasi yang murah, mudah dan singkat dalam memperoleh kredit, penyaluran dana tepat janji, dalam

artian bahwa penyaluran dana harus: 1) tepat waktu, 2) persiapan dana harus ada apabila ada permohonan peminjaman maupun penarikan simpanan.

Semua petani yang tergabung dalam keanggotaan LKM-A mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan simpan-pinjam dana BLM-PUAP pada LKM-A, namun di Gapoktan Agro Floris dan LKM-A Agro Floris Prima ini dalam pendistribusian pinjaman tersebut lebih didahulukan dan diprioritaskan kepada anggota yang mengusahakan tanaman pangan, khususnya padi sawah. Hal ini dikarenakan untuk jenis usaha lain seperti usaha tanaman hias, sudah banyak bantuan pemerintah dan dinas terkait guna pengembangan usahanya. Besarnya jumlah uang yang dipinjamkan tergantung hasil keputusan LKM-A Agro Floris Prima yang didasarkan kepada besarnya modal yang dibutuhkan peminjam dan ketersediaan kas LKM-A Agro Floris Prima. Jumlah kredit yang dapat diajukan peminjam adalah sebesar Rp.500.000,- sampai Rp.5.000.000,-, sedangkan jumlah kredit yang disetujui oleh pihak LKM-A untuk dicairkan adalah juga sebesar Rp.500.000,- sampai dengan Rp.5.000.000,-, dimana tergantung kesepakatan pengelola LKM-A.

Proses pengajuan pinjaman sampai kredit disetujui dan dicairkan membutuhkan waktu yang bervariasi untuk setiap petani anggota LKM-A, yaitu berkisar antara 7 - 20 hari. Pemberian waktu ini dipergunakan oleh pihak LKM-A Agro Floris Prima untuk mensurvei usaha, pendapatan, dan pengeluaran yang telah dituliskan dalam blanko permohonan. Selain itu, pemberian waktu ini juga tergantung pada ketersediaan dana di kas LKM-A Agro Floris Prima. Bila dana tersedia cukup dan persyaratan anggota peminjam telah dipenuhi dan tidak bermasalah maka dana pinjaman bisa cair dalam waktu paling lama 7 hari. Namun, jika dana tidak tersedia meskipun syarat-syarat anggota peminjam cukup, dana pinjaman belum bisa dicairkan dan si peminjam harus menunggu sampai dana tersebut tersedia, biasanya membutuhkan waktu sekitar 15 - 30 hari.

4.4.2. Penetapan Bunga Pinjaman

Dalam melaksanakan kegiatan simpan-pinjam dana BLM-PUAP LKM-A Agro Floris Prima menetapkan bunga sebesar 1,5% per bulan dari jumlah

pinjaman. Penetapan bunga berdasarkan musyawarah dan keputusan bersama seluruh anggota Gapoktan Agro Floris dan LKM-A Agro Floris Prima yang diadakan pada 7 November 2009, dimana saat itu merupakan jadwal pencairan dana BLM-PUAP ke rekening Gapoktan Agro Floris. Dalam penetapan jasa pinjaman ini tidak terdapat kendala karena penetapannya berdasarkan keputusan bersama, sehingga untuk pembayaran bunga pinjaman ini tidak memberatkan anggota-anggota yang akan meminjam pada LKM-A Agro Floris Prima.

Bunga pinjaman yang diterima oleh LKM-A atas pinjaman yang diberikan kepada anggota ini nantinya akan menambah pendapatan LKM-A, digunakan untuk biaya operasional LKM-A dan secara langsung ini akan menambah modal LKM-A. Dengan bertambahnya modal LKM-A Agro Floris Prima, maka akan semakin banyak anggota yang akan mendapatkan bantuan masalah pembiayaan usahanya dari LKM-A dan LKM-A pun dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada anggota.

Selain itu, dari hasil wawancara dengan petani sampel, tingkat suku bunga yang ditetapkan LKM-A Agro Floris Prima tidak terlalu tinggi bahkan tidak memberikan persyaratan agunan atau jaminan seperti yang diterapkan lembaga-lembaga keuangan lainnya, sehingga petani lebih tertarik memanfaatkan keberadaan LKM-A tersebut. Hal ini senada dengan pendapat Ashari (2006) yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsinya LKM memiliki beberapa keunggulan, diantaranya tidak ada persyaratan jaminan seperti diberlakukan pada perbankan formal. Dari segi ekonomi jika dibandingkan dengan suku bunga bank umum yang berlaku saat ini, tingkat suku bunga yang diberikan oleh LKM-A tergolong lebih tinggi dari suku bunga yang ditetapkan bank (Lampiran 13), namun tidak dirasa memberatkan bagi petani karena penetapannya berdasarkan kesepakatan bersama serta petani merasa terbantu karena prosedur yang sederhana dan tidak berbelit-belit, tanpa agunan, serta waktu pengembalian kredit yang lebih fleksibel. Jadi walaupun dari segi ekonomis kredit LKM-A memiliki bunga yang lebih tinggi, namun keunggulan yang diberikan dari segi teknis menjadi nilai lebih yang membuat kredit LKM-A lebih dipilih petani dibanding kredit dari bank umum. Petani berharap keberadaan LKM-A dapat terus secara berkesinambungan

menjadi lembaga alternatif yang membantu petani dalam permodalan usahatani.

4.4.3. Pelaksanaan Simpan-Pinjam

Pada proses pelaksanaan kegiatan simpan-pinjam dana BLM-PUAP di LKM-A untuk dapat mencairkan dana, peminjam harus menandatangani Surat Perjanjian Pinjaman. Didalam Surat Perjanjian Pinjaman akan tertera dengan jelas berapa besarnya pinjaman, besarnya angsuran, jangka waktu pengembalian, besarnya tingkat suku bunga dan besarnya denda yang dikenakan jika terjadi keterlambatan pengembalian angsuran pinjaman (Lampiran 11). Jangka waktu pengembalian pinjaman paling lama 10 bulan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara peminjam dan pengelola LKM-A Agro Floris Prima, dimana jangka waktu pengembalian ini tergantung jenis usaha dan besarnya pinjaman.

Setelah peminjam menyetujui kesepakatan yang tertera di dalam Surat Perjanjian Pinjaman maka pengurus akan memberikan kwitansi pinjaman kepada peminjam sebagai bukti bahwa peminjam telah menerima uang pinjaman dari LKM-A. Selanjutnya pada proses pengembalian pinjaman oleh petani yang meminjam kepada LKM-A Agro Floris Prima adalah melalui angsuran tiap bulan selama jangka waktu pembayaran yang telah disepakati sebelumnya.

LKM-A Agro Floris Prima buka tiap hari Rabu dan Sabtu dari jam 10.30 WIB sampai jam 17.00 WIB, pada waktu inilah LKM-A Agro Floris Prima melayani anggota dalam proses simpan-pinjam, dari pencairan dana pinjaman sampai pada pengembalian pinjaman oleh anggota. Untuk proses pengembalian pinjaman tidak jarang petani anggota yang menggunakan dana BLM-PUAP langsung mengantar pengembalian pinjaman mereka ke rumah pengelola LKM-A, ini dikarenakan keterbatasan waktu dan jam pelayanan LKM-A serta kesibukan masing-masing anggota yang berbeda-beda. Dalam pelaksanaannya proses pengembalian pinjaman setiap jenis usaha yang diajukan berbeda. Usaha perternakan dan pemasaran hasil-hasil pertanian, pengembalian pinjaman dilakukan setiap bulannya sesuai jangka waktu yang disepakati. Namun berbeda dengan usaha tanaman pangan dimana pengembalian pinjaman bisa dilakukan

dengan cicilan setiap bulan ataupun membayar langsung setelah panen. Dimana mayoritas petani yang memanfaatkan dana BLM-PUAP ini adalah petani tanaman pangan, khususnya padi sawah.

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya terutama kegiatan simpan-pinjam, biaya operasional LKM-A berasal dari bunga yang diberlakukan oleh LKM-A yakni sebesar 1,5%. Bunga tersebut nantinya selain menambah pendapatan LKM-A, juga akan digunakan untuk biaya operasional LKM-A dalam menjalankan kegiatan simpan-pinjam, dimana termasuk didalamnya untuk membayar upah kasir LKM-A sebesar Rp.300.000,- per bulannya. Selain itu biaya operasional juga dapat diambilkan dari simpanan-simpanan anggota, terutama simpanan wajib anggota yang dibayarkan rutin setiap bulan oleh anggota LKM-A. Biaya operasional ini penting keberadaannya untuk menopang kelancaran aktivitas yang dilaksanakan oleh LKM-A, bila biaya operasional tersebut tidak mencukupi, maka aktivitas yang dilaksanakan oleh LKM-A dapat terganggu nantinya.

Pada pelaksanaan kegiatan simpan-pinjam kepada anggota, LKM-A Agro Floris Prima menerapkan sanksi bagi anggota yang macet dalam pembayaran pengembalian pinjamannya. Hal ini diterapkan untuk kelancaran arus kas pada LKM-A, sehingga dana yang dihimpun tersebut mampu mencukupi kebutuhan anggota secara merata. Selain itu dikhawatirkan apabila terjadi kredit macet dalam jumlah banyak yang menyebabkan LKM-A kekosongan kas, sehingga mengakibatkan keluhan bagi anggota yang akan meminjam. Oleh karena itu, LKM-A Agro Floris Prima sangat berhati-hati dalam melakukan pembiayaan pinjaman terhadap anggotanya. Tindakan dan sanksi yang diberikan untuk anggota yang macet dalam pengembalian pinjaman yaitu:

1. Bagi peminjam yang jatuh tempo setelah 7 hari dari jangka waktu yang disepakati jika tidak melakukan pembayaran pinjaman akan dikenakan denda sebesar 1% dari besarnya bunga pinjaman.
2. Jika masih mengabaikan kesepakatan maka akan diberikan teguran.
3. Jika teguran diabaikan maka dilakukan pemanggilan.

Pengembalian dana pinjaman BLM-PUAP yang diberikan oleh LKM-A Agro Floris Prima selama ini berjalan dengan lancar karena pengelola LKM-A memberikan pinjaman kepada anggotanya dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat baik, dimana pada saat memutuskan akan memberikan pinjaman pengelola telah melakukan peninjauan terlebih dahulu, sehingga masalah-masalah yang akan terjadi dapat dihindarkan. Dalam pengembalian angsuran pinjaman masing-masing peminjam membayar angsuran pinjamannya tepat waktu sesuai kesepakatan. Meskipun terkadang terdapat beberapa orang yang terlambat beberapa hari dari hari jatuh tempo yang ditetapkan, namun karena tidak melewati batas yang ditetapkan yakni 7 hari setelah jatuh tempo hal tersebut tidak menjadi masalah bagi LKM-A.

Dalam pelaksanaan simpan-pinjam dana PUAP LKM-A Agro Floris Prima melakukan sistem kontrol guna menghindari permasalahan dalam penyaluran dana pembiayaan, salah satunya kemacetan dalam pengembalian pinjaman oleh anggota. Sistem kontrol dilakukan oleh pengurus gapoktan melalui pembinaan kepada anggota kelompok tani yang meminjam di LKM-A Agro Floris Prima, dimana :

1. Bagi anggota yang menunggak, LKM-A Agro Floris Prima bersama pengurus Gapoktan Agro Floris melaksanakan pembinaan usaha anggota agar keluar dari kendala-kendala yang ada, mencari jalan keluar agar anggota tersebut keluar dari kegagalan usaha tersebut.
2. Mengingatkan kepada anggota yang akan jatuh tempo atas pembayarannya, meninjau kembali manajemen, manajerial, dan usaha yang digeluti.
3. Memberi penyuluhan atas usaha yang sedang berjalan kepada usaha yang normal.

Dalam pelaksanaannya sistem kontrol ini telah dilaksanakan oleh LKM-A Agro Floris Prima dengan baik, sehingga pengembalian dana pinjaman di LKMA dapat berjalan cukup lancar karena dalam pembiayaan pinjaman kepada anggota pengelola LKM-A sangat memperhatikan dengan baik karakteristik calon peminjam, sehingga disini dalam menyalurkan dana, pengelola LKM-A sangat

menerapkan unsur kepercayaan kepada calon nasabahnya, sehingga kemacetan pengembalian pinjaman bisa dihindarkan.

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh selama dana BLM-PUAP digulirkan dengan sistem simpan-pinjam, membuktikan bahwa keberadaan LKM-A Agro Floris Prima memiliki potensi yang sangat besar dalam hal pembiayaan usahatani bagi petani anggota. Petani anggota lebih memilih meminjam di LKM-A Agro Floris Prima dibandingkan Lembaga Keuangan Formal atau Mikro lainnya karena memiliki banyak keunggulan, seperti persyaratan yang harus dipenuhi lebih mudah dan tidak dikenakan agunan atau jaminan. Hal ini didukung oleh pendapat Ashari (2006), bahwa potensi yang diperankan oleh Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sangat besar yang dikarenakan oleh: (1) LKM umumnya berada atau minimal dekat dengan kawasan pedesaan, sehingga dapat dengan mudah diakses oleh petani atau pelaku ekonomi di desa, (2) petani atau masyarakat desa lebih menyukai proses yang singkat dan tanpa banyak prosedur, (3) dekatnya lokasi LKM dengan petani memungkinkan pengelola yang juga merupakan masyarakat sekitar memahami betul karakteristik usahatani, sehingga dapat mengucurkan kredit secara tepat waktu dan jumlahnya.

Selanjutnya Ketua Gapoktan Agro Floris menyatakan bahwa dengan adanya kerjasama gapoktan dan LKM-A, serta dengan adanya pembinaan yang berkelanjutan dari Penyuluh Pendamping dan PMT (Penyelia Mitra Tani) seperti memberikan bimbingan teknis usaha agribisnis pedesaan, membantu memecahkan permasalahan usaha petani atau kelompok tani, dan membantu LKM-A dalam membuat laporan perkembangan PUAP, dimana pembinaan yang dilakukan oleh Penyuluh Pendamping dan PMT ini dilaksanakan secara rutin melalui pertemuan reguler setiap hari Rabu dan Sabtu dengan anggota gapoktan dan LKM-A Agro Floris Prima yang diadakan di Sekretariat Gapoktan Agro Floris. Diharapkan di tahun-tahun berikutnya LKM-A Agro Floris Prima dapat lebih berkembang dan menjadi lembaga keuangan alternatif yang membantu masalah permodalan petani dan dapat melayani masyarakat tani yang berada di Kelurahan Lubuk Minturun khususnya.

Sanksi yang diberikan kepada anggota tidak mempermalukan, tetapi bersifat membina, terutama dalam membina usaha yang sedang dijalankan anggota. Kementerian Pertanian (2008) menjelaskan bahwa mekanisme insentif dan sanksi merupakan metode pembinaan karakter, sehingga anggota yang meminjam dapat mengembalikan pinjaman secara teratur dan disiplin. Disamping itu diharapkan juga dapat terjalin hubungan yang baik antara pengelola LKM-A dan anggota. Selanjutnya dengan adanya Studi Kelayakan Usaha anggota calon peminjam, bukan hanya sekedar analisa kelayakan usaha, termasuk didalam studi kelayakan usaha tersebut karakteristik anggota yang merupakan prinsip utama bagi LKM-A dalam menyalurkan pembiayaan, yaitu sistem kejujuran, karena LKM-A Agro Floris Prima tidak mensyaratkan agunan kepada anggota dalam mengajukan permohonan pinjaman modal usaha.

Pada LKM-A Agro Floris Prima selain aspek ekonomis yang ditonjolkan dari kegiatan simpan-pinjam, disini juga terlihat aspek sosial dari keberadaan LKM-A tersebut. Selama ini pengelolaan LKM-A sudah dijalankan dengan cukup baik. Aspek sosial yang terlihat menandakan pengelolaan organisasi sudah berjalan dengan cukup baik. Para pengurus memiliki kesadaran tinggi untuk menjalankan LKM-A dengan semaksimal mungkin dengan bekerjasama satu dengan lainnya, mulai dari manajer umum LKM-A, bagian penggalangan dana, bagian pembukuan, bagian pembiayaan sampai pada kasir LKM-A. Mereka semua dapat bekerja bersama-sama karena mengetahui fungsinya dengan sangat baik.

Selain itu selama ini keberadaan LKM-A dan Gapoktan saling terkait satu sama lain. LKM-A dan gapoktan bekerjasama untuk membantu dan mengayomi petani anggota agar lebih baik lagi dalam melaksanakan kegiatan usahatani. Selain menjalankan dana BLM-PUAP, LKM-A juga aktif rutin mengadakan pertemuan anggota setiap bulannya. Pada pertemuan itu selain membahas tentang kegiatan LKM-A, pengurus dan anggota juga melakukan gotong-royong untuk membersihkan lingkungan disekitar kantor LKM-A. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mempererat rasa kebersamaan dan kerjasama diantara semua anggota. Selain memberikan pinjaman pada anggota, LKM-A juga memberikan bantuan,

apabila ada anggota yang terkena kemalangan atau pun sakit, biaya untuk keperluan tersebut diambil dari simpanan-simpanan anggota. LKM-A Agro Floris Prima memang menjalankan kegiatan utama dalam memberikan pinjaman pada anggota, namun keberadaan LKM-A juga memiliki nilai positif dari aspek sosial. Dimana itu semua dapat terlihat dalam pengelolaan organisasi yang baik sampai pada saat ini, kebersamaan dan kerja sama dalam kelompok, juga rasa solidaritas kepada anggota.

4.4.4. Rencana Realisasi Pencairan dan Penggunaan Dana BLM-PUAP Kepada Anggota

Proses pencairan dana BLM-PUAP di Gapoktan Agro Floris, sehingga dikelola oleh LKM-A Agro Floris Prima, dilakukan dengan mengacu kepada beberapa tahap yang telah ditetapkan oleh petunjuk dan pedoman pencairan dana BLM-PUAP yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. Proses-proses tersebut meliputi pembuatan Rencana Usaha Anggota (RUA), pembuatan Rencana Usaha Kelompok (RUK), dan pembuatan Rencana Usaha Bersama (RUB).

Sesuai dengan Rencana Usaha Bersama (RUB) yang telah disusun oleh Gapoktan Agro Floris sebelum pencairan dana PUAP ke rekening gapoktan (Lampiran 5), dapat dilihat bahwa dana program BLM-PUAP direncanakan penggunaannya untuk empat jenis usaha produktif, lebih dari setengah dana BLM-PUAP ini rencananya dialokasikan untuk pengembangan tanaman pangan, khususnya padi sawah. Penyusunan RUB ini berdasarkan Rencana Usaha Anggota (RUA) dan Rencana Usaha Kelompok. Proses pembuatan rencana-rencana tersebut sebagaimana dilihat dalam Tabel 12.

Tabel 12. Proses Pembuatan Rencana Usaha Gapoktan Agro Floris

No.	Jenis Rencana	Waktu Pembuatan	Rincian Isi Rencana	Pelaksana/pembuat
1	2	3	4	5
1.	Rencana Usaha Anggota (RUA)	Agustus s/d September 2009	Dokumen rencana usaha per-anggota yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Data Anggota - Jenis Usaha - Volume Usaha - Kebutuhan Biaya - Jadwal Pemanfaatan 	RUA ini dibuat oleh anggota masing-masing kelompok tani dan diketahui dan ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani yang bersangkutan.
2.	Rencana Usaha Kelompok (RUK)	September 2009	Rekapitulasi RUA, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Data base Keltan - Nama, tanda tangan dan jenis usaha anggota. - Volume dan Nilai Usaha - Jadwal Pemanfaatan 	RUK ini dibuat oleh Ketua Kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan Agro Floris dan diperiksa dan disahkan oleh PPL.
3.	Rencana Usaha Bersama (RUB)	September 2009	Rekapitulasi RUK dengan batasan dana PUAP, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Data base Gapoktan - Pengurus Gapoktan - Nomor Rekening Gapoktan - Nama dan Alamat Bank - Rincian Jenis Usaha Produktif - Satuan Volume - Nilai/total dana PUAP. 	RUB ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Gapoktan Agro Floris, dan selanjutnya di setujui oleh Ketua Tim Teknis PUAP Kota Padang

Sumber: Profil Gapoktan Agro Floris, 2010.

Petani anggota membuat sendiri RUA berdasarkan tujuan penggunaan dana PUAP yang ditetapkan oleh gapoktan, dan apabila ada keraguan atau kekeliruan, petani bertanya langsung kepada Penyuluh Pendamping. Setelah RUA selesai dibuat, Penyuluh Pendamping memeriksa kembali RUA yang dibuat petani, untuk koreksi akhir sebelum dijadikan bahan untuk pembuatan RUK.

RUK disusun berdasarkan RUA yang telah dibuat oleh petani anggota gapoktan yang mengajukan pinjaman. RUK merupakan gambaran biaya yang

diperlukan oleh keseluruhan anggota masing-masing kelompok yang selanjutnya direkap untuk dijadikan Rencana Usaha Kelompok. Penyusunan RUK dibuat oleh ketua kelompok lalu diperiksa oleh Penyuluh Pendamping dan ditandatangani oleh ketua kelompok dan Penyuluh Pendamping. Berdasarkan hasil keseluruhan RUK, ketua gapoktan bisa membuat RUB yang merupakan syarat gapoktan untuk mendapatkan BLM-PUAP. Rencana pencairan dan penggunaan dana BLM-PUAP tersebut dapat dilihat dalam Tabel 13.

Tabel 13. Rencana dan Realisasi Pencairan dan Penggunaan dana PUAP

No.	Uraian	Rencana	Realisasi
1.	Jadwal Pencairan	November s/d Desember 2009	Januari 2010
2.	Penerima	74 orang	119 orang
3.	Jenis Usaha (penggunaan)	4 jenis usaha: Tanaman Pangan Hortikultura Peternakan Perkebunan	4 jenis usaha: -Tanaman Pangan -Hortikultura -Peternakan -Pemasaran
4.	Jumlah Pencairan	Rp. 100.000.000,-	Rp. 279.860.000,-

Berdasarkan Tabel 13 tersebut, dapat dilihat bahwa rencana pencairan dana BLM-PUAP untuk anggota Gapoktan Agro Floris berkisar dari bulan November 2009 sampai bulan Desember 2009. Namun karena pencairan dana dari Departemen Pertanian baru masuk ke rekening gapoktan pada awal tahun 2010 tepatnya pada bulan Januari, maka realisasinya baru mulai dilaksanakan pada bulan tersebut. Ketidaksiuaian antara rencana dengan realisasi pencairan dan penggunaan dana sebagaimana terlihat diatas, merupakan konsekuensi dari berbagai pertimbangan yang dilakukan oleh pengelola LKM-A Agro Floris Prima dalam memberikan pinjaman kepada anggota. Pengelola LKM-A Agro Floris Prima bersama pengurus Gapoktan Agro Floris menerapkan studi kelayakan usaha

terhadap anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan kepada LKM-A Agro Floris Prima.

Terkait dengan rencana dan realisasi jenis usaha, menurut pengurus Gapoktan Agro Floris, setelah masuknya dana BLM-PUAP ke rekening gapoktan, ketua gapoktan melakukan musyawarah lanjutan terkait penggunaan dana dan diputuskan bahwa dana BLM-PUAP diprioritaskan untuk pengembangan usaha tanaman pangan, karena masih banyaknya petani tanaman pangan yang kesulitan modal dan beberapa usaha sudah terlebih dahulu mendapatkan bantuan yang khususnya untuk pengembangan usaha mereka, karena alasan tersebutlah anggota LKM-A yang menggunakan dana BLM-PUAP mayoritasnya adalah petani tanaman pangan, khususnya padi sawah. Untuk cabang usaha lain, walau pun telah mendapatkan bantuan lain terkait pengembangan usaha pertaniannya, Gapoktan dan LKM-A Agro Floris tetap membina dan membantu dalam menjalankan usaha masing-masing anggotanya.

Berdasarkan Rencana Usaha Anggota (RUA), rencananya jenis usaha tanaman pangan, dana dari LKM-A dimanfaatkan oleh anggota untuk usahatani padi sawah. Sedangkan jenis usaha tanaman hortikultura, dana tersebut rencananya dipergunakan untuk tanaman ketimun. Selanjutnya untuk jenis usaha peternakan, anggota LKM-A Agro Floris Prima berencana memanfaatkan dana tersebut untuk modal ternak sapi. Khusus untuk jenis usaha pemasaran, dana tersebut rencananya dipergunakan oleh anggota sebagai modal untuk menjual hasil-hasil pertanian di pasar-pasar tradisional yang ada di sekitar Kelurahan Lubuk Minturun, untuk bagian pemasaran ini yang paling berkembang adalah tanaman hiasnya. Namun karena jenis usaha lain sudah banyak mendapatkan bantuan pengembangan usaha pertaniannya dari pemerintah, maka berdasarkan kesepakatan bersama dana BLM-PUAP diprioritaskan untuk tanaman pangan, namun tidak tertutup kemungkinan jenis usaha lain dapat mempergunakan dana BLM-PUAP jika anggota yang mengusahakan tanaman pangan sudah tercukupi kebutuhan modalnya dari BLM-PUAP ini.

Menurut BPTP Sumatera Barat (2009), penggunaan dana PUAP adalah untuk mengatasi permasalahan permodalan yang dihadapi oleh petani agar

pendapatan mereka meningkat dan secara bertahap keluar dari garis kemiskinan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penggunaan dana PUAP agar diprioritaskan pada usaha agribisnis yang mampu: 1) memberikan keuntungan relatif baik dan perolehan penerimaan dalam jangka pendek, dan 2) usaha yang memberikan nilai tambah. Usaha non-budidaya seperti kegiatan pengolahan hasil (industri skala rumah tangga), pemasaran skala kecil dan usaha lain terkait sektor pertanian menjadi prioritas, karena usaha demikian bisa merupakan usaha tambahan dan lapangan kerja baru. Usaha budidaya tanaman berumur pendek (musiman) juga dapat dilakukan, bila dengan bantuan modal akan memberikan peningkatan hasil atau mutu hasil, sehingga pada akhirnya pendapatan petani akan bertambah.

Departemen Pertanian (2008), dalam Modul Pengembangan LKM-A menggambarkan prosedur permohonan dan pencairan yang terperinci sebaiknya dilakukan oleh pengelola LKM-A sebagaimana terlihat pada Lampiran 12. Jika dibandingkan dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh LKM-A Agro Floris Prima, proses permohonan dan pencairan pinjaman oleh anggota sudah sesuai dengan panduan yang diberikan oleh Kementerian Pertanian tersebut.

4.4.5 Hambatan Pelaksanaan Simpan-Pinjam BLM-PUAP

1. Penetapan Prosedur dan Persyaratan simpan-pinjam

Seiring dengan berjalannya waktu dan keberadaan LKM-A Agro Floris Prima sebagai lembaga keuangan mikro agribisnis di sekitar lingkungan masyarakat Kelurahan Lubuk Minturun, mengakibatkan ada petani yang belum merupakan anggota kelompok tani mengajukan pinjaman kepada LKM-A Agro Floris Prima, sehingga hal ini menjadi perhatian baru atau permasalahan pada penetapan persyaratan pinjaman yang telah ditetapkan sebelumnya bagi pengelola LKM-A, pengurus gapoktan dan perwakilan anggota. Melalui pertimbangan dan musyawarah, maka diputuskanlah bahwa petani yang bukan merupakan anggota tidak akan diberikan pinjaman karena sebelumnya sudah ada peraturan yang mengatur tentang persyaratan simpan-pinjam, dimana yang bukan anggota tidak akan diberikan pelayanan. Untuk mengatasi masalah tersebut pengurus gapoktan, pengelola LKM-A, dan penyuluh berinisiatif merangkul petani tersebut untuk

bergabung dalam keanggotaan gapoktan dan LKM-A, sehingga nantinya anggota tersebut memiliki keterikatan dengan kelompok tani dan mereka juga mendapatkan pengawasan dari kelompok taninya serta bila memenuhi persyaratan, mereka bisa mendapatkan pelayanan simpan-pinjam dari LKM-A.

2. Proses pencairan dana pinjaman

Perguliran dana kepada anggota LKM-A Agro Floris Prima sejauh ini dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah dana yang tersedia dan analisa kelayakan usaha anggota serta kapan mengajukan permohonan pinjaman. Secara umum LKM-A dapat memenuhi kebutuhan anggota akan dana tersebut jika dikaitkan dengan kemampuan permodalan LKM-A Agro Floris Prima saat ini. Namun karena keterbatasan permodalan yang dimiliki oleh LKM-A, saat ini belum semua permohonan yang diajukan oleh anggota dapat dikabulkan dalam waktu cepat. Berdasarkan pengamatan penulis pada saat penelitian, ditemukan ada anggota yang harus menunggu dana masuk dari anggota lain untuk mendapatkan pinjaman, bahkan bisa ada yang menunggu kurang lebih selama beberapa minggu untuk mendapatkan pinjaman. Menurut pengelola LKM-A, hal ini disebabkan oleh keterbatasan dana yang tersedia dan setiap dana yang masuk dari anggota telah ada anggota lain yang lebih dahulu mengajukan permohonan. Proses perguliran dana ini menurut pertimbangan dan kendala yang dihadapi dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Kendala Pelaksanaan Simpan-Pinjam Dana PUAP di LKM-A

Pertimbangan	Pelaksanaan	Kendala
Jumlah dana tersedia	Langsung digulirkan apabila ada dana	Ada pemohon yg harus menunggu dana tersedia
Analisa Kelayakan Usaha	Dilakukan oleh manajer dan ketua gapoktan	Tidak dilakukan dengan studi yg mendalam
Waktu permohonan	Diterima sesuai maksud pemohon	Pencairan tidak bisa cepat,terkendala dana tersedia di kas LKM-A

Jika diakumulasikan sampai bulan Mei tahun 2012, total nilai dana BLM-PUAP yang telah bergulir sebesar Rp.279.860.000,- (lihat Lampiran 6). Dana PUAP ini dikembalikan oleh anggota dengan sistem cicilan paling lama 10 bulan termasuk bunga pinjaman sebesar 1,5% tiap bulannya.

Berdasarkan wawancara dengan pengelola LKM-A Agro Floris Prima, dipaparkan bahwa setiap dana pengembalian pinjaman yang diterima oleh LKMA, apabila telah memenuhi jumlah permohonan anggota yang akan meminjam, maka dana tersebut akan digulirkan kepada anggota tersebut, sehingga tidak ada istilah dana yang mengendap di kas LKM-A Agro Floris Prima. Dana-dana tersebut seutuhnya dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan. Alasan inilah yang menyebabkan belum semua anggota yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan pinjaman bisa dengan cepat memperoleh pinjaman tersebut.

3. Jam pelayanan LKM-A

LKM-A Agro Floris Prima buka setiap hari Rabu dan Sabtu, melayani anggota dari jam 10.30-17.00 WIB. Sebenarnya untuk pengembalian kredit bila petani tidak bisa mengantarkan langsung ke kantor LKM-A, petani dapat mengantarkan cicilan atau pinjaman langsung ke rumah pengelola LKM-A pada waktu dan hari yang tidak ditentukan, ini dikarenakan keterbatasan waktu pelayanan LKM-A yang hanya bisa melayani anggota 2 kali dalam satu minggu. Namun dari hasil diskusi dengan petani responden, masalah yang dikeluhkan petani adalah untuk proses pengajuan pinjaman, LKM-A tidak dapat melayani permohonan pinjaman diluar jam kerja yang telah ditentukan. Hal ini menjadi kendala bagi petani karena untuk mengajukan pinjaman petani harus menunggu untuk mendapatkan pelayanan pada jam kerja LKM-A.

Menurut pengurus LKM-A untuk pelayanan pengembalian memang lebih fleksibel, sehingga anggota dapat mengantarkan langsung cicilan ke rumah pengelola LKM-A, sementara untuk permohonan peminjaman memang harus dilakukan di kantor dan pada jam kerja LKM-A, ini dikarenakan prosedur dan persyaratan yang rumit dan hanya bisa dilakukan di kantor LKM-A. Selain itu keterbatasan jam kerja pengelola LKM-A yang hanya bisa melayani anggota 2

kali dalam seminggu dikarenakan, setiap pengelola LKM-A juga memiliki pekerjaan lain yang harus dikerjakan, sehingga LKM-A hanya bisa buka 2 kali dalam seminggu

4.4.6 Pencatatan dan Pelaporan Keuangan oleh LKM-A Agro Floris Prima

Secara konsep, sistem pencatatan dan pelaporan keuangan oleh LKM-A ataupun gapoktan penerima dana program BLM-PUAP telah diatur oleh petunjuk teknis pelaksanaan program BLM-PUAP yang dikeluarkan oleh Departemen Pertanian maupun BPTP Sumatera Barat. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana Program BLM-PUAP di LKM-A Agro Floris Prima, panduan pencatatan dan pelaporan tersebut sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini terwujud berkat adanya bimbingan dan pendampingan yang dilakukan oleh PMT dan PPL.

Laporan yang dibuat oleh LKM-A Agro Floris Prima dibuat dan dikirimkan secara reguler kepada tim teknis tingkat kabupaten, yang kemudian diolah dan dilaporkan oleh PMT ke tim teknis tingkat provinsi dan tim teknis pusat. Secara umum, laporan-laporan tersebut meliputi :

1. Laporan Bulanan, yang berisi tentang laporan perkembangan dana PUAP tiap bulannya. Disamping itu, dalam laporan ini juga berisikan jumlah dan nama kelompok tani yang tergabung dalam gapoktan, jumlah simpanan/tabungan anggota dan data-data lain. Laporan ini ditandatangani oleh ketua gapoktan dan diketahui oleh ketua tim teknis tingkat kecamatan bersama wali nagari.
2. Laporan Tahunan. Laporan ini berisi tentang akumulasi jumlah pembiayaan selama satu tahun bersama jumlah bunga pembiayaan yang diperoleh oleh LKM-A. Kemudian laporan ini juga berisi tabel pendapatan per bulan selama satu tahun serta akumulasi pendapatan dan pengeluaran selama tahun kegiatan yang dilaporkan, sehingga pada akhir laporan tersebut dilaporkan juga tentang sisa hasil usaha yang diperoleh pada tahun tersebut. Laporan ini ditandatangani oleh ketua gapoktan.
3. Buku Evaluasi (bulanan). Kegiatan Usaha Gapoktan tentang jalannya operasional LKM-A. Buku laporan ini berisi tentang evaluasi pembiayaan, tabungan, bunga yang diperoleh dari anggota, hasil evaluasi dan laporan

permasalahan yang mungkin dihadapi oleh LKM-A dalam mengelola dana BLM-PUAP. Buku evaluasi ini juga ditanda tangani oleh ketua gapoktan.

4. Laporan LKM-A untuk Rapat Anggota Tahunan (RAT). Laporan ini berisikan tentang laporan rugi laba LKM-A selama satu tahun pelaporan, neraca keuangan LKM-A selama satu periode, laporan posisi kekayaan/modal bersih selama setahun, laporan pembiayaan berdasarkan jumlah anggota yang meminjam dan mengembalikan pinjaman selama setahun. Laporan ini dibuat oleh bagian administrasi pembukuan LKM-A, diketahui oleh manajer LKM-A dan disetujui oleh ketua gapoktan.

Disamping laporan-laporan tersebut diatas, LKM-A Agro Floris Prima Gapoktan Agro Floris juga membuat beberapa buah buku pencatatan dan pelaporan yang digunakan untuk membantu pengelola dalam memberikan informasi kepada anggota dan pihak-pihak yang membutuhkan. Pencatatan-pencatatan tersebut secara khusus diperuntukkan untuk mempermudah kerja pengelola LKM-A dalam mengelola keuangan dan juga untuk menghindari kesalahan dalam membuat laporan-laporan yang dibutuhkan. Pencatatan-pencatatan tersebut diantaranya:

1. Buku profil LKM-A dan Gapoktan
2. Buku daftar anggota yang mengajukan pinjaman
3. Buku *data base* anggota
4. Buku daftar anggota peminjam menurut jenis usaha

Pencatatan dan pelaporan ini merupakan hal yang sangat krusial dalam pengelolaan sebuah lembaga keuangan. Menurut Departemen Pertanian (2008), monitoring, evaluasi dan pelaporan merupakan proses manajemen. Hal ini diperlukan untuk mengetahui keberhasilan suatu kegiatan atau usaha, dan juga untuk mengetahui berbagai permasalahan yang muncul pada saat pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat dicarikan solusi pemecahannya. Khusus dalam pencatatan dan pelaporan dalam pengelolaan dana program BLM-PUAP digunakan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan, penyaluran dan pemanfaatan dana BLM-PUAP yang sistematis, berjenjang, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

4.5. Analisis Manfaat dana BLM- PUAP oleh anggota LKM-A Agro Floris Prima

Dalam perhitungan penggunaan dana kredit ini penulis melihat untuk apa saja penggunaan dana kredit BLM-PUAP yang didapatkan oleh masing-masing petani. Dimana tujuan dari penyaluran dana BLM-PUAP ini adalah untuk membantu petani, buruh tani dan rumah tangga tani miskin dalam membantu permodalan mereka. Responden yang dilihat disini adalah petani anggota LKM-A Agro Floris Prima yang meminjam dana BLM-PUAP dan mengusahakan tanaman padi sawah. Disini akan terlihat untuk apa saja dana BLM-PUAP tersebut digunakan oleh petani padi sawah dalam menunjang kegiatan usahatani yang dijalankan. Perhitungan dilakukan dengan cara penghitungan analisis biaya yang dibayarkan untuk usahatani dari masing-masing responden petani anggota LKM-A Agro Floris Prima yang berjumlah 30 orang (Lampiran 15). Anggota LKM-A yang dijadikan responden dalam perhitungan analisis usahatani ini adalah anggota LKM-A yang menggunakan dana PUAP untuk mengusahakan tanaman pangan yakni padi sawah, karena dana BLM-PUAP di Gapoktan Agro Floris dan LKM-A Agro Floris Prima ini memang diprioritaskan untuk membantu permodalan petani padi sawah. Selain itu menurut pengelola LKM-A rata-rata petani anggota yang mengusahakan tanaman padi sawah merupakan petani miskin dan mengalami kesulitan modal, sehingga sudah selayaknya untuk mendapatkan bantuan. Dimana pada saat penelitian yakni pada bulan Juni, jumlah anggota LKM-A yang mengusahakan padi sawah adalah sebanyak 96 orang.

4.5.1. Sumber Modal

Sumber modal yang digunakan oleh petani responden sebelum dan sesudah adanya penyaluran dana PUAP mengalami perubahan, dimana sebelum adanya penyaluran dana PUAP di LKM-A Agro Floris Prima rata-rata petani sampel dalam penelitian ini menggunakan modal untuk usahatani yang berasal dari modal sendiri yaitu sebesar 30% dan pinjaman yang berasal dari rentenir sebanyak 70%. Tingginya persentase pinjaman dari rentenir mengindikasikan

tingginya ketergantungan petani terhadap kredit rentenir untuk modal usahatannya.

Apriyantino *dalam* Anonim (2008), mengatakan bahwa prosedur pinjaman dari rentenir (toke/heler) mudah, luwes dan sangat informal, tidak terikat waktu dan tempat. Hal ini yang menjadi daya tarik petani untuk memperoleh pinjaman dengan cepat dan praktis. Petani kurang memanfaatkan keberadaan Lembaga Keuangan Formal (LKF) seperti Badan Kredit Desa (BKD) dan BRI Unit Desa untuk memperoleh pinjaman dengan alasan terlalu rumit dan prosedural, walaupun petani mengetahui secara ekonomis akan lebih menguntungkan. Tengkulak atau toke/heler sebagai kreditor dan pembeli hasil produk pertanian mendapatkan keuntungan berlipat dari petani yang meminjam kepadanya. Keuntungan tersebut didapat dari bunga dari pinjaman yang diberikan dan keuntungan dari selisih harga beli di petani dengan harga jual di pasar konsumen. Sudah menjadi rahasia umum bahwa rentenir (toke/heler) leluasa membeli hasil produk pertanian dari petani dengan rendah karena posisi tawar yang sangat kuat di hadapan petani, sehingga petani akan dirugikan karena terbebani hutang dengan bunga pinjaman tinggi.

Berdasarkan keterangan petani responden dalam penelitian ini, setelah adanya penyaluran dana PUAP di LKM-A Agro Floris Prima, pinjaman dari LKM-A Agro Floris Prima merupakan sumber permodalan utama didalam menjalankan usahatani. Masih adanya beberapa petani yang meminjam ke rentenir dan sebagian lagi dengan tambahan modal sendiri untuk menjalankan usahatannya, dikarenakan keterlambatan pencairan pinjaman dari LKM-A dan pinjaman yang diberikan oleh LKM-A belum mampu mencukupi 100% kebutuhan usahatani petani responden. Namun secara keseluruhan, pinjaman LKM-A telah dapat dijadikan petani sebagai sumber modal utama dalam melaksanakan kegiatan usahatani petani. Hal ini mengindikasikan bahwa kredit dari LKM-A Agro Floris Prima telah dapat membantu petani dalam pembiayaan usahatani, sehingga tidak lagi terlalu bergantung pada rentenir yang menetapkan suku bunga yang tinggi dalam pembiayaan usahatannya. Untuk lebih jelasnya

tentang sumber permodalan petani responden setelah mendapatkan pinjaman dari LKM-A dapat dilihat pada Tabel. 15

Tabel 15. Sumber Permodalan Petani Responden Pengguna Dana PUAP

Kontribusi Modal	Sumber Modal		
	Pinjaman LKM-A	Pinjaman Rentenir	Modal Sendiri
Maksimal	5.000.000	700.000	500.000
Minimal	500.000	200.000	200.000
Total	55.500.000	2.800.000	1.650.000
Persentase Modal (%)	92,58	4,67	2,75
Rata-Rata	1.850.000	350.000	275.000

Berdasarkan Tabel 15 terlihat bahwa sumber permodalan utama petani responden bersal dari pinjaman BLM-PUAP yang diberikan oleh LKM-A. Dimana LKM-A memberikan pinjaman paling besar Rp.5.000.000,- dan paling kecil Rp.500.000,-, dengan total pinjaman Rp.55.500.000,- (92,58%) dan rata-rata pinjaman yang diberikan adalah sebesar Rp.1.850.000,-. Selain dari pinjaman LKM-A, sebagian kecil modal berasal dari pinjaman rentenir, dimana pinjaman terbesar adalah Rp.700.000,- dan paling kecil adalah Rp.200.000,- dengan total pinjaman Rp.2.800.000,- (4,67%) dan rata-rata pinjaman yang diberikan sebesar Rp.350.000,-. Sumber permodalan petani yang terakhir adalah dari modal sendiri, modal sendiri cukup kecil kontribusinya, ini dikarenakan jarang petani yang bisa memenuhi kebutuhan usahataniya dari modal sendiri, karena rata-rata petani responden mengalami kesulitan dalam permodalan. Dimana untuk modal sendiri paling besar yang dikeluarkan petani adalah Rp.500.000,- dan paling kecil Rp.200.000,-, dengan total Rp.1.650.000,- (2,75) dan rata-rata Rp.275.000,-. Penjelasan tersebut sudah cukup bisa menggambarkan bahwa modal utama petani responden dalam melaksanakan usahatani padi sawah mereka berasal dari dana PUAP yang dipinjamkan oleh LKM-A. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Lampiran 14.

Berdasarkan perubahan sumber modal petani responden sudah terlihat manfaat kredit yang diberikan oleh LKM-A dalam hal penyediaan modal bagi usahatani anggota. Dimana selama ini petani anggota cenderung meminjam dari rentenir dengan tingkat bunga yang tinggi, sedangkan untuk meminjam pada

lembaga keuangan formal yang memiliki tingkat bunga yang rendah, petani terbentur pada prosedur dan persyaratan yang tidak dapat dipenuhi. Selain itu manfaat lain yang peneliti temukan adalah pada kegiatan penyaluran dan pengembalian dana kredit dari LKM-A ke petani selama ini yang berjalan dengan cukup lancar. Ini menandakan dalam membantu permodalan petani anggota, LKM-A sudah cukup sukses, dimana sampai saat penelitian dilakukan pengembalian kredit oleh petani berjalan cukup lancar sehingga dana kredit dapat terus digulirkan kepada anggota.

4.5.2. Jumlah Pinjaman yang Diberikan

LKM-A memberikan pinjaman kepada petani agar petani dapat memenuhi kebutuhan usahataniya dari biaya pembelian pupuk, obat-obatan, bibit, upah Tenaga Kerja, sewa mesin bajak, dan pajak bumi bangunan.

1. Pupuk

Adapun jenis pupuk yang digunakan oleh petani responden pengguna dana BLM-PUAP yaitu pupuk Urea, pupuk SP36 dan pupuk kandang. Harga dari masing-masing pupuk yaitu:

1. Urea Rp.4.000,-/Kg
2. SP36 Rp.5.400,-/Kg
3. Pupuk Kandang Rp. 500,-/Kg

Sebelum menggunakan dana BLM-PUAP ini rata-rata petani untuk membeli pupuk harus menyisihkan uang dari panen tahun lalu, berhutang pada kios-kios pupuk atau meminjam kepada rentenir. Setelah adanya bantuan tambahan dana, petani dapat langsung membeli pupuk, dan dapat menggunakan pupuk lebih tepat waktu dan beberapa petani menambah penggunaan pupuk.

Biaya penggunaan pupuk dihitung berdasarkan harga per Kg pupuk dikalikan dengan jumlah pemakaian per musim tanam oleh masing-masing petani. Rata-rata penggunaan pupuk oleh petani responden pengguna dana BLM-PUAP yaitu Urea sebanyak 117,83 Kg/Petani, rata-rata penggunaan SP36 sebanyak 59,66 Kg/Petani dan rata-rata penggunaan pupuk kandang sebanyak 21,16 Kg/Petani. Maka biaya rata-rata petani untuk pembelian Urea adalah

Rp.464.666,66,-/Petani, SP36 Rp.322.200,-/Petani, dan pupuk kandang Rp.9.916,66,-/Petani. Dengan demikian total biaya rata-rata yang dikeluarkan oleh petani yaitu Rp.811.216,66,-.

Sedangkan Rata-rata penggunaan pupuk oleh petani per Ha yaitu Urea sebanyak 167,61Kg/Ha, rata-rata penggunaan SP36 sebanyak 84,87 Kg/Ha dan rata-rata penggunaan pupuk kandang sebanyak 28,68 Kg/Ha. Maka biaya untuk pembelian Urea adalah Rp.660.976,75,-/Ha, SP36 Rp.458.321,47,-/Ha, dan pupuk kandang Rp.14.106,21,-/Ha. Dengan demikian total biaya rata-rata yang dikeluarkan oleh petani yaitu Rp.1.153.955,51,-/Ha. Dilihat dari tingginya biaya pupuk, maka persentase dana BLM-PUAP yang akan digunakan petani adalah 46,13%/Petani dan 65,61%/Ha (Lampiran 16). Tingginya persentase dana untuk pembelian pupuk dikarenakan ketersediaan pupuk yang cukup sangat penting dalam kegiatan usahatani petani padi sawah.

2. Obat-obatan

Obat-obatan yang digunakan oleh petani umumnya adalah pestisida. Harga dari pestisida tersebut Rp.20.000,-/Kaleng. Biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk obat-obatan yaitu Rp.18.117,64,- dan total biaya yang dikeluarkan Rp.308.000,-. Sementara persentase dana pinjaman BLM-PUAP yang digunakan untuk membeli obat-obatan adalah 0,74%/Petani, seperti yang terlihat pada Lampiran 17. Dari penghitungan biaya rata-rata penggunaan pupuk dan obat-obatan diatas maka didapatkan penghitungan biaya sarana produksi seperti terlihat pada Tabel 16 dan lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran 18.

Tabel 16. Biaya dan Persentase Dana PUAP yang Digunakan Petani Responden untuk Saprodi

No	Variabel	Biaya/Petani (Rp)	Biaya/Ha (Rp)	Persentase (%)
1	Pupuk	811.216,66	1.5153.955,51	46,13
2	Obat-Obatan	8.117,64	35.135,16	0,74
	Jumlah	821.483,33	1.168.539,00	46,87

3. Bibit

Sebelum adanya dana kredit BLM-PUAP beberapa petani responden tidak mengeluarkan biaya untuk pembelian bibit karena mereka hanya menggunakan bibit yang disisihkan dari hasil panen sebelumnya dengan varietas IR 42. Sedangkan sesudah menerima kredit BLM-PUAP seluruh petani responden membeli bibit dengan varietas IR 42 bersertifikasi agar menghasilkan padi berkualitas baik dengan harga Rp. 4.600,- /kg. Rata-rata petani menggunakan bibit sebanyak 25,03 Kg/Ha. Untuk rata-rata total biaya yang dibayarkan petani untuk pembelian bibit adalah sebesar Rp.80.960,-/Petani dan Rp.115.163,58,-/Ha. Sedangkan untuk persentase dana PUAP yang digunakan adalah 4,56%/Petani dan 6,49%/Ha (Lampiran 19).

4. Upah Tenaga Kerja Luar Keluarga

Upah Tenaga Kerja Luar Keluarga sesudah adanya kredit BLM-PUAP dihitung berdasarkan upah yang berlaku di daerah penelitian yaitu Rp.40.000,-/hari. Biaya rata-rata upah TKLK yang dihitung untuk petani padi sawah pengguna dana BLM- PUAP per hektarnya terdiri dari upah pengolahan tanah, upah pemupukan, upah pengendalian HPT, penyiangan dan upah panen adalah sebesar Rp.317.333,33,-/Petani dan Rp.451.389,79,-/Ha. Sedangkan persentase dana pinjaman PUAP yang digunakan adalah 16,74%/Petani dan 23,82%/Ha. Persentase dana BLM-PUAP yang digunakan untuk biaya tenaga kerja luar keluarga cukup tinggi, karena rata-rata petani responden menggunakan tenaga kerja luar keluarga dalam kegiatan usahatani. Namun pada pengolahan tanah biaya yang dikeluarkan untuk TKLK tidak ada karena dalam pengerjaannya petani responden mengoptimalkan TKDK serta menyewa mesin bajak untuk mempercepat pekerjaan, sehingga biayanya dimasukkan kedalam biaya sewa mesin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 20.

5. Sewa Mesin

Biaya mesin digunakan untuk menunjang kegiatan usahatani pada waktu pengolahan tanah yakni untuk menyewa mesin bajak untuk membajak tanah sawah. Petani responden tidak mampu mengolah tanah secara manual (menggunakan sapi) karena membutuhkan waktu yang lama. Jadi meskipun biaya

sewa mesin yang dikeluarkan cukup besar akan tetapi petani sangat terbantu karena pengerjaannya yang cepat, sehingga petani dapat melakukan penanaman lebih awal. Biaya penggunaan mesin yang dikeluarkan setiap petani responden adalah sebesar Rp.700.000,-/ha/musim tanam. Dimana rata-rata petani mengeluarkan Rp.505.833,33,-/Petani, Rp.719.535,32,-/Ha, sementara persentase pinjaman BLM-PUAP yang dikeluarkan untuk sewa mesin adalah 27,56%/Petani dan 39,21%/Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 21.

6. Pajak

Pajak yang dibayarkan petani adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang harus dibayarkan oleh setiap petani untuk lahan mereka. Biaya pajak yang dibayar oleh petani adalah sama yaitu Rp.12.000,-/ha/tahun. Dengan demikian biaya yang dikeluarkan oleh petani untuk PBB per musim tanam yaitu Rp.6.000,-/ha/musim tanam (1 tahun terdapat 2 musim tanam). Rata-rata biaya pajak yang dibayarkan petani padi sawah pengguna dana BLM-PUAP adalah Rp.4.420,-/petani/musim tanam dan Rp.6.287,34,-/Ha/musim tanam. Sementara persentase dana PUAP yang digunakan untuk membayar pajak adalah 0,23%/Petani dan 0,32 %/Ha. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Lampiran 22.

Berdasarkan dari penghitungan saprodi, bibit, penghitungan upah TKLK, sewa mesin, dan pajak diatas, maka dapat dihitung rincian total kebutuhan biaya usahatani oleh petani responden seperti pada Tabel 17 dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 23.

Tabel 17. Jumlah Rata-Rata Kebutuhan Biaya Usahatani Padi Sawah Petani Responden Anggota LKM-A Agro Floris Prima

No	Variabel	Biaya / Petani (Rp)	Biaya / Ha (Rp)
1	Saprodi	821.483,33	1.168.539,59
2	Bibit	80.960,00	115.163,58
3	Upah TKLK	317.333,33	451.389,76
4	Sewa Mesin	505.833,33	719.535,32
5	Pajak	4.420,00	6.287,34
Jumlah		1731123,33	2462479,84

Berdasarkan Tabe 17 dapat dilihat total rata-rata penggunaan dana PUAP oleh petani responden. Untuk pembiayaan usahatani adalah sebesar Rp.1.731.123,33,-/Petani dan Rp.2.4762479,84,-/Ha. Sementara itu dana pinjaman BLM-PUAP paling banyak digunakan petani untuk keperluan membeli pupuk yaitu 46,13%/Petani petani dan 65,61%/Ha, sehingga menjadikan biaya untuk keperluan saprodi yang memerlukan jumlah dana paling besar, dimana persentase pinjaman BLM-PUAP yang digunakan untuk keperluan saprodi adalah 46,87%/Petani dan 66,22%/Ha. Selanjutnya persentase biaya yang dikeluarkan untuk sewa mesin adalah 27,56%/Petani dan 39,21%/Ha. Sementara biaya untuk pajak menjadi biaya dengan rata-rata persentase paling rendah dari biaya lainnya yaitu 0,23%/Petani dan 0,32%/Ha. Jadi rata-rata biaya yang harus dibayarkan oleh petani responden adalah Rp.1.731.123,33,-/Petani dan Rp.2.462.479,84,-/Ha, dimana semua biaya yang diperlukan untuk kebutuhan usahatani padi sawah petani responden dalam satu musim dibayarkan dari pinjaman BLM-PUAP yang diterima oleh masing-masing petani.

Jika dibandingkan dengan rekomendasi penggunaan input-input produksi usahatani padi sawah pada daerah penelitian, setelah petani mendapatkan pinjaman dari LKM-A, penggunaan input-input produksi masih belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi yang dianjurkan pada daerah tersebut, sesuai dengan Tabel 18 .

Tabel 18. Perbandingan Pemakaian Input-Input dan Produksi Petani dengan Standar yang Dianjurkan Pada Daerah Penelitian.

No	Variabel	Rata-Rata Penggunaan Input dan Produksi /Ha (Kg)	Rekomendasi Penggunaan Input dan Standar Produksi/Ha (Kg)
1	Pupuk		
	a. Urea	176,24	250 - 300
	b. SP36	89,12	75 - 100
	c. P. Kandang	28,26	200 - 250
2	Bibit	25,03	25 - 30
3	Produksi	3.000,94	4.000

Berdasarkan Tabel 18 dapat dilihat, untuk penggunaan pupuk, hanya penggunaan pupuk SP36 saja yang penggunaannya sesuai rekomendasi yang

disarankan, Sementara penggunaan pupuk urea masih dibawah rekomendasi dan pupuk kandang penggunaannya masih sangat jauh dari rekomendasi yang disarankan. Untuk penggunaan bibit, setelah adanya pinjaman dari LKM-A, keseluruhan responden menggunakan bibit yang bersertifikasi demi mendapatkan hasil produksi yang lebih baik dan penggunaan bibit oleh petani responden juga telah sesuai dengan rekomendasi yang disarankan (25-30 kg/ha).

Sementara jika dilihat dari hasil produksi padi sawah petani responden, setelah mendapatkan pinjaman dari LKM-A, tingkat produksi petani tetap masih dibawah standar produksi potensial yang ditetapkan untuk daerah tersebut yaitu sebesar 4.000 Kg/Ha. Dimana untuk rata-rata produksi padi sawah petani responden adalah sebesar 2.109,67 Kg dan untuk rata-rata produksi padi sawah petani responden per Ha adalah 3.000,94 Kg. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 24.

Jadi, setelah petani mendapatkan pinjaman dari LKM-A untuk membiayai usahatani padi sawahnya, pemakaian input-input produksi petani masih belum sesuai dengan rekomendasi yang disarankan pada daerah penelitian. Baru pada penggunaan bibit saja yang sesuai dengan rekomendasi yang disarankan. Hal tersebut berimplikasi langsung pada hasil produksi padi sawah petani yang masih dibawah standar produksi potensialnya. Dari hal tersebut belum dapat terlihat manfaat dari pinjaman yang diberikan LKM-A bagi petani anggota untuk peningkatan usahatani padi sawahnya selama ini.

LKM-A Agro Floris Prima telah melaksanakan kegiatan simpan-pinjam sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pengelolaan dana BLM-PUAP, namun dalam penentuan jumlah pinjaman yang diberikan kepada anggota, LKM-A Agro Floris Prima tidak melakukannya dengan cukup tepat, walau pada saat permohonan pengelola LKM-A telah melakukan survei terkait kelayakan dan besaran pinjaman yang akan diberikan pada anggota. Dapat dilihat pada kebutuhan biaya usahatani petani responden diatas, dimana setelah menganalisis total biaya yang dikeluarkan untuk usahatani, ternyata ada beberapa petani responden yang pinjamannya tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan biaya usahatannya.

Dimana dari 30 orang petani responden, hanya 18 orang petani yang mendapatkan pinjaman sesuai dengan jumlah biaya kebutuhan usahatani mereka atau hanya memenuhi 60% saja dari total responden, sisanya 40% atau sebanyak 12 responden tidak mendapatkan pinjaman yang sesuai dengan biaya yang harus mereka bayarkan untuk kebutuhan usahatannya (Lampiran 23). Untuk memenuhi kekurangan biaya usahatani tersebut, beberapa petani memilih meminjam kepada rentenir dan sebagian lagi memakai modal sendiri. Untuk lebih jelasnya persentase kontribusi Dana BLM-PUAP yang diberikan terhadap biaya usahatani anggota dapat dilihat pada Tabel 19.

Tabel 19. Kontribusi kredit BLM-PUAP terhadap usaha tani padi sawah

Kontribusi	Per Petani		
	Pinjaman (RP)	Biaya Dibayarkan (RP)	%
Maksimum	4.200.000,00	3.553.000,00	100,00
Minimum	800.000,00	1.076.400,00	74,32
Rata-Rata	1.920.000,00	1.879.313,32	94,35

Berdasarkan Tabel 19 dapat dilihat, untuk biaya yang dibayarkan per petani jumlah maksimal pinjaman BLM-PUAP yang diberikan LKM-A dapat 100% membantu permodalan anggota bahkan masih bersisa dari biaya yang dibayarkan untuk usaha tani, kontribusi maksimal ini didapatkan dari responden yang mendapatkan pinjaman sebesar Rp.4.200.000,-, sedangkan biaya yang dibayarkan untuk usahatani hanya Rp.3.553.000,-. Sementara untuk kontribusi dana BLM-PUAP paling minimal hanya dapat memenuhi 74,32% dari biaya yang dibayarkan untuk usahatani, dengan biaya yang dibayarkan sebesar Rp.1.076.400,- sedangkan pinjaman yang diberikan LKM-A hanya sebesar Rp.800.000,-, untuk itu petani terpaksa memberdayakan sendiri kekurangan biaya tersebut dengan modal sendiri ataupun meminjam kepada rentenir. Untuk rata-rata kontribusi dana BLM PUAP bagi usahatani petani anggota, hanya baru dapat memenuhi biaya usahatani sebesar 94,35%.

Menurut pengelola LKM-A jumlah pinjaman yang mereka berikan telah sesuai dengan hasil survei terkait besaran pinjaman yang layak didapatkan

anggota. Pengelola mempertimbangkan berbagai hal dalam penentuan jumlah pinjaman yang akan diberikan, mulai dari analisa kelayakan usaha sampai pada kemampuan anggota mengembalikan pinjaman tersebut.

4.5.3. Penggunaan Dana Pinjaman

Kredit BLM-PUAP yang diterima petani akan digunakan untuk membiayai kegiatan usahatani petani anggota nantinya. Dimana kredit tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan mulai dari pembelian pupuk, pestisida, bibit, biaya tenaga kerja, biaya mesin, dan pajak.

Untuk pembelian pupuk, rata-rata dana pinjaman yang dikeluarkan oleh petani responden adalah Rp.763.533,33,-, rata-rata persentase penggunaan dana kredit untuk pembelian pupuk adalah 41,27%. Jumlah dana kredit yang digunakan oleh petani untuk membeli pupuk merupakan persentase terbesar jika dibandingkan dengan biaya lainnya, karena ketersediaan pupuk yang cukup sangat penting bagi kegiatan usahatani padi sawah. Selanjutnya dalam mengolah tanah, semua petani responden menyewa mesin bajak, dimana rata-rata dana kredit yang digunakan untuk biaya sewa mesin adalah Rp.492.666,67,-, rata-rata persentase penggunaan dana kredit untuk sewa mesin adalah 26,63%. Untuk biaya tenaga kerja, biaya yang dikeluarkan petani adalah untuk membayar tenaga kerja luar keluarga (TKLK), dimana rata-rata dana kredit yang digunakan untuk membayar TKLK adalah Rp.313.166,7,- dan rata-rata persentase penggunaan dana kredit untuk biaya Tenaga Kerja adalah 16,93%.

Sementara bagi biaya yang dikeluarkan untuk pembelian bibit, pestisida dan membayar pajak tergolong cukup kecil, ini dikarenakan harga satuannya yang lebih murah dari biaya pupuk, sewa mesin, dan biaya tenaga kerja. Untuk biaya bibit, rata-rata petani responden mengeluarkan biaya sebesar Rp.80.560,-, dengan rata-rata persentase penggunaan dana kredit untuk bibit adalah 4,35%. Untuk biaya pestisida rata-rata biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.19.647,06,- dan rata-rata persentase penggunaan dana kreditnya sebesar 0,83%. Terakhir untuk biaya pajak yang merupakan biaya terkecil, rata-rata dana kredit yang terpakai adalah

Rp.6.386,66,- dengan persentase penggunaan dana kredit sebesar 0,34%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 27.

Namun dari diskusi yang peneliti lakukan dengan responden, diketahui bahwa dana kredit PUAP yang diberikan oleh LKM-A tidak hanya digunakan untuk melaksanakan kegiatan usahatani semata, beberapa petani responden juga menggunakan dana kredit tersebut untuk keperluan lain diluar usahatani, mulai dari keperluan konsumsi, biaya pendidikan anak, dan lain-lain. Dimana dari 30 orang responden, sebanyak 15 orang atau 50% dari total keseluruhan responden menggunakan dana BLM-PUAP tersebut untuk keperluan diluar kegiatan usahatani. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 20.

Tabel 20. Penggunaan Dana Kredit Diluar Kebutuhan Usahatani Oleh Petani Responden

Penggunaan	Penggunaan Dana Kredit Diluar Kebutuhan Usahatani (Rp)		
	Konsumsi	Biaya Pendidikan	Biaya Lain-Lain
Maksimal	350.000,00	300.000,00	300.000,00
Minimal	150.000,00	125.000,00	200.000,00
Rata-Rata	231.818,20	179.000,00	250.000,00
Persentase Penggunaan (%)	10,20	10,78	10,00

Berdasarkan Tabel 20 tersebut, dapat dilihat bahwa dana kredit PUAP yang diberikan oleh LKM-A tidak tepat penggunaannya oleh petani anggota. Menurut petani responden, mereka menggunakan dana kredit tersebut untuk keperluan lain dikarenakan kebutuhan tersebut mendesak untuk dipenuhi. Berdasarkan diskusi dengan pengelola LKM-A, sewaktu akan memberikan kredit tersebut mereka telah melakukan analisa usahatani bagi tiap-tiap anggota yang meminjam, sehingga kredit yang diberikan dapat sesuai dengan kebutuhan masing-masing petani. Namun pada penggunaan kredit oleh petani pengelola LKM-A tidak dapat melakukan kontrol sepenuhnya apakah dana kredit tersebut digunakan untuk usahatani saja atau digunakan untuk keperluan lain.

4.5.4. Waktu Penyaluran Pinjaman

Dalam memanfaatkan kredit, petani sering kali menghadapi beberapa masalah, salah satu diantara masalah tersebut adalah pencairan kredit yang tidak tepat waktu. Berdasarkan hasil wawancara dengan petani responden, diketahuilah bahwa pinjaman BLM-PUAP yang diberikan oleh LKM-A Agro Floris Prima ini dianggap pencairannya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh petani. Rata-rata petani mengungkapkan bahwa pencairan pinjaman BLM-PUAP yang diberikan oleh LKM-A Agro Floris Prima cenderung terlambat dari yang diharapkan petani, beberapa anggota bahkan harus menunggu lebih dari satu minggu sampai pinjaman mereka dapat dicairkan oleh LKM-A, sehingga petani sering menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan usahatani mereka. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 28.

Menurut pengelola LKM-A waktu pencairan kredit memang sudah sesuai dengan yang seharusnya, hanya saja rata-rata petani peminjam baru akan mengajukan permohonan peminjaman ke pihak LKM-A 3-6 hari sebelum mereka akan mempergunakan dana kredit tersebut untuk kebutuhan usahatannya. Selain itu, terkadang anggota juga harus menunggu pencairan pinjamannya diakibatkan karena kekosongan kas LKM-A. Disisi lain Pengelola LKM-A membutuhkan waktu untuk memproses permohonan pinjaman anggota, mulai dari mensurvei usaha, pendapatan, dan pengeluaran yang telah dituliskan dalam blanko permohonan. Selain itu keterlambatan juga dikarenakan anggota harus menunggu giliran pencairan pinjaman mereka, dikarenakan sebelum mereka telah ada anggota lain yang mengajukan permohonan dan sedang menunggu pencairan dana, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk pencairan pinjaman bertambah lama.

Untuk itu pengelola LKM-A seharusnya juga memberikan arahan dan pendampingan kepada petani terkait waktu pengajuan permohonan pinjaman yang tepat, sehingga nantinya dana pinjaman dapat diterima sesuai dengan yang diharapkan oleh petani. Menurut Ashari (2006), pengelolaan kredit yang baik memerlukan pengetahuan tentang kredit, perencanaan usaha yang efisien dan pembuatan keputusan yang bijaksana. Ketika hal ini absen dari diri petani akibat

tidak adanya pembinaan, maka pihak pemberi kredit sesungguhnya yang bertanggung jawab untuk mendampingi dan mengawasi petani. Sementara untuk cara pembayaran kredit dari LKM-A dapat dilihat pada Tabel 21.

Tabel 21. Cara Pembayaran Pinjaman dari LKM-A oleh Petani Responden

Cara Pembayaran Kredit	Jumlah Cicilan (Bulan)	Jangka Waktu Pelunasan (Bulan)	Mulai Membayar (Bulan)	Bunga / Bulan (Rp)	Total Bunga (Rp)
Maksimum	5,00	7,00	5,00	75.000	525.000
Minimum	1,00	3,00	2,00	7.500	22.500
Rata-Rata	2,13	4,73	3,40	27.750	144.500

Berdasarkan Tabel 21 dapat dilihat, dalam melunasi pinjamannya, petani responden mencicil pinjaman dari LKM-A dari 1-5 kali cicilan dengan rata-rata 2,13 bulan/cicilan. Untuk jangka waktu pelunasan pinjaman antara 3-7 bulan, dengan rata-rata 4,73 bulan pelunasan. Sementara untuk pembayaran pertama, petani mulai dari bulan ke 2-5, dengan rata-rata mulai membayar pada bulan 3,4. Dari jumlah bunga yang dibebankan kepada petani tiap bulannya rata-rata bunga yang harus dibayar petani per bulan adalah Rp.27.750,- dan rata-rata total bunga yang harus dibayarkan petani sampai pinjaman LKM-A lunas adalah Rp.144.500,. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Lampiran 29.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan dan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan simpan-pinjam dana program BLM-PUAP oleh LKM-A Agro Floris Prima, secara umum telah merujuk kepada petunjuk-petunjuk yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. Koordinasi dan komunikasi yang baik antara pengurus Gapoktan dan LKM-A, merupakan kunci pelaksanaan simpan-pinjam. Dalam pelaksanaan simpan-pinjam BLM-PUAP, proses penetapan prosedur dan persyaratan serta bunga pinjaman telah dirancang cukup baik sehingga tidak terlalu berat dan dapat dipenuhi. Pelaksanaan simpan-pinjam di LKM-A juga sudah diatur dengan cukup baik, mulai dari pencairan pinjaman sampai pada pengembalian. Pada Realisasi pencairan dan penggunaan dana terdapat perbedaan antara rencana dan realisasi, baik pencairan maupun penggunaan dana. Hal ini disebabkan beberapa hal, yakni: keterlambatan pencairan dana ke Gapoktan dan pertimbangan pengelola terhadap usaha yang diusulkan anggota.
2. Setelah adanya penyaluran dana BLM-PUAP, dana tersebut menjadi sumber modal utama petani dalam melaksanakan usahatani dan akhirnya mampu mengurangi ketergantungan petani terhadap pinjaman modal dari rentenir yang bersifat eksploitatif. Untuk jumlah kredit yang diberikan, hanya sebanyak 60% anggota yang kebutuhan usahatannya tercukupi, hal ini menunjukkan bahwa manfaat kredit secara penuh baru bisa dirasakan oleh sebagian petani anggota. Kredit PUAP tujuan penggunaannya adalah untuk pembiayaan usahatani anggota, namun sebanyak 50% responden juga menggunakan dana BLM-PUAP untuk kepentingan lain. Rata-rata petani responden mengajukan permohonan pinjaman hanya 3-6 hari sebelum dana tersebut mereka gunakan, padahal pengelola LKM-A membutuhkan waktu untuk memproses permohonan kredit tersebut terlebih dahulu. Selain itu jika dibandingkan dengan rekomendasi pemakaian input-input produksi, setelah

adanya BLM-PUAP masih belum ada perbaikan berarti terkait penggunaan input-input produksi sesuai dengan rekomendasi yang ada. Hal ini berdampak pada produksi padi sawah petani yang belum sesuai dengan standar produksi potensial produksi padi sawah disana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dana BLM-PUAP tidak bermanfaat bagi perbaikan usahatani petani anggota

5.2. Saran

Berdasarkan pokok kesimpulan diatas, dan terkait dengan tujuan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis merumuskan beberapa saran kepada LKM-A Agro Floris Prima Gapoktan Agro Floris secara umum dan kepada pihak-pihak terkait sebagaimana berikut:

- 1) Agar pengelolaan LKM-A Agro Floris Prima dapat lebih baik, disarankan kepada pengelola untuk memberikan penyuluhan pada anggota agar mengajukan pinjaman sekitar 2 minggu sebelum dana tersebut dipergunakan, hal ini supaya kedepannya tidak ada lagi anggota yang mengeluh terkait waktu pencairan yang tidak sesuai harapan, karena LKM-A butuh waktu untuk memproses permohonan pinjaman serta melakukan pengontrolan terkait penggunaan dana oleh anggota supaya tidak terjadi penyimpangan penggunaan dana pinjaman.
- 2) LKM-A diharapkan lebih banyak lagi melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan khususnya dalam pengembangan kegiatan simpan-pinjam, sehingga mampu melayani anggota dengan lebih baik lagi kedepannya karena keberadaan LKM-A Agro Floris Prima cukup berpotensi. Selain itu diperlukan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun pihak swasta. Dukungan tersebut dapat berupa penambahan modal LKM-A dan penguatan kelembagaan Gapoktan dan LKM-A sehingga kedepannya lebih baik dalam melaksanakan setiap aktivitasnya.
- 3) Kepada pemerintah, hendaknya juga turut serta mengawasi kegiatan usahatani petani yang mendapatkan bantuan modal usaha, tidak hanya mengawasi perkembangan dana BLM-PUAP di LKM-A saja, sehingga pemerintah dapat

benar-benar mengetahui bagaimana penggunaan dana bantuan tersebut dalam kegiatan usahatani petani anggota. Selain itu, disarankan kepada pemerintah untuk memperpendek jalur birokrasi dalam pencairan dana bantuan kepada masyarakat, sehingga rencana yang telah dibuat oleh berbagai pihak dapat terealisasi dan digunakan sesuai harapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2008. *Hubungan Tengkulak dengan Petani*. Universitas Sumatera Utara. Medan
- Antonio, et al. 2001. *Apa dan Bagaimana Bank Islam (Seri Ekonomi Islam)*, No.1. Yogyakarta. PT Dhna Bakti Yasa, cet. Ke-1.
- Ashari. 2006. *Potensi Lembaga Keuangan (LKM) dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya*. Analisis Kebijakan Pertanian 4 (2): 146-164.
- Ashari dan Saptana. 2005. *Prospek Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian*. Forum Penelitian Agroekonomi Volume ER No. 2, Desember 2005.
- Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat. 2009. *Petunjuk Teknis Program PUAP di Sumatera Barat*. Padang. BPTP Sumatera Barat. 47 hal.
- Departemen Pertanian. 2005. *Pedoman Umum Penguatan Modal Usaha Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A)*: Jakarta.
- Departemen Pertanian. 2008. *Petunjuk Penyaluran Dana BLM- PUAP*. . Departemen Pertanian. Jakarta. 28 Hal.
- Hadinoto, Soetanto. 2005. *Kunci Sukses Bisnis Kredit Mikro*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Hamid,E.S. 1986.*Kredit Pedesaan di Indonesia*.BPFE Yogyakarta.
- Hastuti, E.L. 2006. *Kjian Sistem Pembiayaan Mikro Pertanian* .Pusat Analisis Sosek dan Kebijakan Pertanian . Departemen Pertanian.
- Ismawan, Bambang. 2010. *Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Otonomi Daerah*.JurnalEkonomiRakyat.ArtikelTh.IINo.1.http://www.ekonomirakyat.org/edisi_13/artikel_1.htm. [18/01/2012].
- Kasmadi.2005.*PUAPuntukKesejahteraanRakyat*.http://www.magelangkab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=279%3Adana-rp-100-juta-untuk-puap&catid=208%3Aberita-pertanian&Itemid=221. [11/12/2011].
- Madjid, Baihaqi Abd dan A Rasyid Syarifudin. 2000. *Paradigma Bru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syriah, Perjalanan Gagasan dan Gerakan BMT Indonesia*. Jakarta: Pinbuk. Cet ke-1.
- Mashudi, 2003. *Dasar-dasar Perkreditan*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Mubiyarto. 1973. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Lembaga Penelitian, Pendidikan Ekonomi dan Sosial. PT.Repro Internasional, Jakarta. 274 hal.
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

- Nurmanaf, Rozany. 2006. *Lembaga Informal Pembiayaan Mikro Lebih Dekat Dengan Petani*. http://www.magelangkab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=279%3Aberita-pertanian&Itemid=221. [11/03/2012]
- Rusbina, Endila. 2010. *Analisis Komparatif Sistem Usahatani Padi Sawah Antara Pra PUAP dan Masa PUAP Anggota Gapoktan Sinamar Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota*. Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Padang.
- Soekartawi. 1995. *Pembangunan Pertanian*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sudaryanto, T. 2000. *Pengembangan Lembaga Keuangan Alternatif di Pedesaan*. Puslitbang Sosek Pertanian, Badan Litbang Pertanian.
- Supriatna, Ade. 2003. *Aksesibilitas Petani kecil pada Sumber Kredit Pertanian di Tingkat Desa*. http://www.smecca.com/deputi7/file_Infokop/EDISI%2024/prijadi.htm. [15/12/11]
- Suryana, dkk. 2001. *Dinamika Kebijakan Perberasan Nasional: Sebuah Pengantar*. Bunga Rampai Ekonomi Beras. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat. Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. 15 hlm.
- Thoha, Mahmud. 2000. *Pemberdayaan Usaha Kecil Melalui Model Grameen Bank: Bab II, Grameen Bank Sebagai sebuah Model Pengentasan Kemiskinan di Pedesaan*. Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI. Jakarta.
- Tjondronegoro, Sediono. 1988. *Politik dan Kebijaksanaan Pembangunan*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Trisantoso, 1997:24. *Pengembangan Keuangan Mikro Bagi Pembangunan Indonesia*. Media Informasi Bank Perkreditan Rakyat, Edisi IV Mret 2005.
- Widyawan, 2006. *Kajian Sistem Pembiayaan Mikro Pertanian*. Catatan Harian. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Departemen Pertanian.
- Wijono, W.W. 2005. *Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro sebagai Salah satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan*. <http://www.fiskal.depkeu.go.id/webbkf/kajian%5Cwiloejo-1.pdf>. [18/0211/2011]
- Yunus, Muhammad. 2008. *Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan, Bagaimana Bisnis Sosial Mengubah Kehidupan Kita*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Lampiran 1. Kuota Lokasi Penerima PUAP Menurut Propinsi tahun 2008

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Kuota Desa
1	NAD	19	600
2	Sumatera Utara	19	475
3	Sumatera Barat	12	208
4	Riau	10	182
5	Jambi	9	208
6	Bengkulu	9	292
7	Sumatera Selatan	12	369
8	Lampung	9	269
9	Bangka Belitung	6	63
10	Kepulauan Riau	4	54
11	DKI Jakarta	4	15
12	Jawa Barat	19	529
13	Jawa tengah	30	987
14	D.I. Yogyakarta	4	127
15	Jawa Timur	30	987
16	Banten	5	138
17	Bali	9	137
18	NTB	8	220
19	NTT	18	522
20	Kalimantan Barat	11	244
21	Kalimantan Tengah	13	225
22	Kalimantan Timur	10	239
23	Kalimantan Selatan	11	355
24	Sulawesi Utara	9	214
25	Sulawesi Selatan	20	417
26	Sulawesi Tenggara	10	315
27	Sulawesi Barat	4	110
28	Gorontalo	5	134
29	Maluku	7	195
30	Maluku Utara	6	145
31	Papua Barat	8	230
32	Papua	20	505
33	Sulawesi Tengah	9	290

Sumber: Kebijakan Teknis Program PUAP Tahun 2008

Lampiran 2: Gapoktan penerima BLM-PUAP di Kota Padang

No	Nama Gapoktan	Kelurahan	Pengurus		
			Ketua	Sekretaris	Bendahara
1	Jaya Bersama	Batipuah Panjang	Hamzah	Hanafi	Nilawani
2	Agro Floris	Lubuk Minturun Sungai Lareh	Jamaris,SP	Syafrudin	Darmiwi s
3	Harapan Bersama	Limau Manih	Yuherman,SE	Maizan	Nurhayati
4	Harapan Jaya	Gurun Laweh	Ramli,RB	Muchlis	Adek
5	Harapan Bundo	Lubuk Lintah	Yulisman	Samsuir	Maidir
6	Batu Gadang Bersama	Batu Gadang	Basri Dt Rajo Usali	Gustina	Yusmarni
7	Sepakat	Kurao Pagang	Jumlisman	Yumasri	Nurhayati

Sumber: Keputusan Wali Kota Padang Nomor : 589 Tahun 2010

Lampiran 3. Daftar Nama dan Jumlah Anggota Kelompok Tani yang Terdaftar dalam Gapoktan Agro Floris Tahun 2010

No.	Nama Poktan	Jumlah Anggota	Ketua Kelompok
1.	Telaga Biru	26 orang	Jamaris, SP
2.	Dagang Saiyo	22 orang	Mustapa
3.	Pertiwi Nurseri	22 orang	Darniwilis
4.	Perindu	24 orang	Rustam
5.	Lubuk Ramang	18 orang	Firdaus Kader
6.	Budi Sepakat	20 orang	Muslim Adang
7.	Bugenvil Prima	15 orang	Fitri Yani
8.	Tambun Prabu	9 orang	Mustapa
9.	Tani Jaya	12 orang	Syafruddin
10.	Harapan Penerus	15 orang	Samsuar
11.	Fitrah	17 orang	Mustapa
12.	Prima Lestari	15 orang	Destina Elita
	Jumlah	215 orang	

Sumber: Gapoktan Agro Floris Tahun 2011

Lampiran 4. Jumlah Petani Padi Sawah Pengguna Dana BLM-PUAP

No	Kelompok Tani	Ketua	Petani Padi Sawah Pengguna BLM-PUAP
1	Telaga biru	Jamaris ,SP	16
2	Bougenvile	Fitri Yani	13
3	Pertiwi Nurseri	Darniwilis	17
4	Lubuk Ramang	Firdaus Kader	16
5	Al-Fitrah	Mustapa	9
6	Prima Lestari	Destina Elita	8
7	Perindu	Rustam	6
8	Budi Sepakat	Muslim Adang	11
Jumlah			96

Sumber : LKM-A Agro Floris Prima Tahun 2012

Lampiran 5. Rencana Usaha Bersama (RUB) PUAP

FORMULIR 2
RENCANA USAHA BERSAMA (RUB)

1. Nama Gapoktan : AGRO FLORIS
2. Alamat Gapoktan : Kelurahan : Lubuk Minturun Sungai Lareh
Kecamatan : Koto Tengah
Kab/Kota : Padang
Propinsi : Sumatera Barat
3. Tanggal Pendirian Gapoktan : 31 Mai 2007
4. Tanggal Pengukuhan Gapoktan : 06 November 2008
5. Pengurus Gapoktan Ketua : Jamaris,SP
Sekretaris : Syafruddin
Bendahara : Darniwilis
6. Nomor Rekening Gapoktan : 5244-01-010391-53-2
7. Nama Bank : BRI unit Koto Tengah Cabang Padang
8. Alamat Bank : Jl.Sungai Lareh Kel. Lubuk Minturun Koto Tengah Padang

No.	Usaha Produktif	Satuan Volume (Ha, Ekor, RT, dll)	Nilai (Rp. 000)
I	Budidaya (On-Farm)		
	1.1. Tanaman Pangan	40 Ha	55.000
	1.2. Hortikultura	25 Ha Ketimun	25.000
	1.3. Peternakan	2 Ekor Sapi	10.000
	1.4. Perkebunan	20 Ha Kakao	10.000
II	Non Budidaya (Of-Farm)		
	2.1. Industri Rumah Tangga Pertanian	-	-
	2.2. Pemasaran Hasil Pertanian Skala Mikro (Bakulan, dll)	-	-
	Total	-	100.000

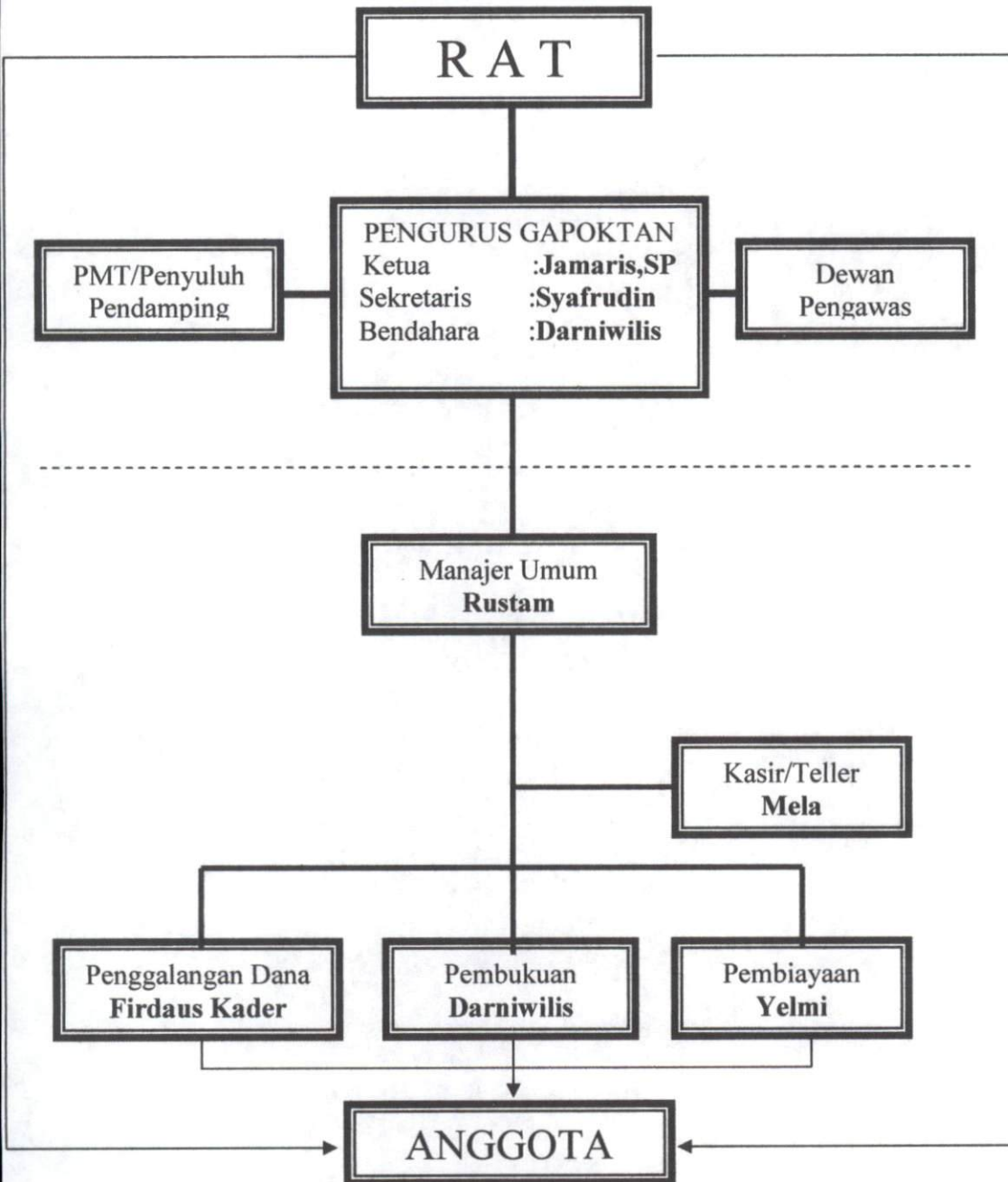
Sumber: Gapoktan Agro Floris Tahun 2011

Lampiran 6 . Perkembangan Dana BLM-PUAP di LKMA Agro Floris Prima Januari 2010 sampai dengan Mei 2012

No	Bulan	Jumlah Dana (Rp)	Keterangan
1	Januari 2010	54.000.000	-
2	Februari	70.000.000	Naik 29,63%
3	Maret	98.260.000	Naik 40,37%
4	April	107.260.000	Naik 9,15 %
5	Mei	114.260.000	Naik 6,52 %
6	Juni	127.260.000	Naik 11,37%
7	Juli	142.760.000	Naik 12,18%
8	Agustus	151.260.000	Naik 5,95 %
9	September	152.260.000	Naik 0,66 %
10	Oktober	166.260.000	Naik 9,19 %
11	November	176.260.000	Naik 6,01 %
12	Desember	194.260.000	Naik 10,21%
13	Januari 2011	196.260.000	Naik 1,03 %
14	Februari	196.260.000	-
15	Maret	214.260.000	Naik 9,17 %
16	April	210.260.000	Turun -1,86 %
17	Mei	226.260.000	Naik 7,61 %
18	Juni	224.760.000	Turun -0,66 %
19	Juli	222.260.000	Turun -1,11 %
20	Agustus	250.760.000	Naik 12,82%
21	September	257.260.000	Naik 2,59 %
22	Oktober	262.260.000	Naik 1,94 %
23	November	263.760.000	Naik 0,57 %
24	Desember	263.260.000	Turun -0,19 %
25	Januari 2012	269.300.000	Naik 2,24 %
26	Februari	272.800.000	Naik 1,28 %
27	Maret	275.260.000	Naik 0,89 %
28	April	278.900.000	Naik 1,31 %
29	Mei	279.860.000	Naik 0,34 %

Sumber : Laporan Bulanan Akumulasi LKM-A Agro Floris Prima (data diolah)

Lampiran 7. Struktur Organisasi LKM-A Agro Floris Prima Gapoktan Agro Floris



Sumber: Profil Gapoktan Agro Floris Tahun 2010

Lampiran 8. Surat Rekomendasi Mengajukan Pinjaman di LKM-A Agro Floris Prima

SURAT REKOMENDASI

Yang bertanda tangan dbawah ini , saya :

Nama :
 Tanggal lahir :
 Alamat :
 Pekerjaan :
 No. identitas :
 Suku :

Dalam hal ini selaku ketua kelompok tani.....

Telah memberikan persetujuan kepada anggota kami yaitu :

Nama :
 Tanggal lahir :
 Alamat :
 Pekerjaan :
 No. identitas :
 Suku :

Untuk mengadakan pembiayaan/pinjaman kepada LKM-A "AGRO FLORIS PRIMA".bila dikemudian hari terjadi permasalahan dari anggota kami. Maka kami bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikannya.

Demikian surat rekomendasi di buat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Minturun ,2011

Yang menerima rekomendasi

Yang membuat rekomendasi
Ketua Kelompok Tani

(.....)

(.....)

Mengetahui
Ketua Gapoktan Agro Floris

(.....)

Lampiran 9. Surat Persetujuan Mengajukan Pinjaman di LKM-A Agro Floris Prima

SURAT PERSETUJUAN

Dari Suami / Istri

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama :

Tanggal lahir :

Alamat :

No. Identitas :

Status :

Telah memberikan persetujuan kepada istri/suami/anak/saudara :

Nama :

Tanggal lahir :

Alamat :

Status :

Untuk mengadakan pembiayaan/pinjaman kepada LKM-A "Agro Floris Prima". Bila dikemudian hari terjadi permasalahan dari istri/anak/saudara kami , maka kami bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Demikianlah surat persetujuan ini di buat dan dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Minturun , 2011

Yang Menerima Persetujuan

Yang Membuat Persetujuan

(.....)

(.....)

Mengetahui
Ketua LKMA

(.....)

Lampiran 10. Surat Permohonan Pembiayaan di LKM-A Agro Floris Prima

**LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS
AGRO FLORIS PRIMA**

Sekretariat : Sungai Lareh Rt 02 Rw 01 Kelurahan Lubuk Minturun Kec.Koto Tengah
Kota Padang

DATA PERMOHONAN PEMBIAYAAN

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

A. DATA PRIBADI

1. Nama :
2. Agama :
3. Tempat/tgl. Lahir :
4. Pendidikan terakhir :
5. Alamat lengkap :
6. Status rumah :
7. Jama'ah mesjid :
8. Nama suami/istri :

B. DATA USAHA

1. Jenis usaha :
2. Tempat usaha :
3. Modal usaha :
4. Modal sekarang :

C. BANTUAN

1. Jenis bantuan :
2. Besar pinjaman :
3. Dipergunakan untuk :

D. KESANGGUPAN MENGANGSUR

Sanggup mengangsur sesuai dengan tanggal yang disepakati (sanggup/tidak)

E. SUMBER PELUNASAN

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1. A. Gaji | B. Hasil usaha |
| 2. Janga waktu : | |
| 3. Dipergunakan untuk : | |

- F. 1. Tanggal pengajuan :
2. Yang menerima :

Lubuk Minturun, 2011

Pihak penanggung

Yang mengajukan

(.....)

(.....)

Lampiran 11. Surat Perjanjian Pinjaman di LKM-A Agro Floris Prima

**LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS
AGRO FLORIS PRIMA**

Sekretariat : Sungai Lareh Rt 02 Rw 01 Kelurahan Lubuk Minturun Kec.Koto Tengah
Kota Padang

SURAT PERJANJIAN PINJAMAN

Nomor : 02.005./LKMA-AFP/PUAP/X/2010

Pada hari ini : _____, tanggal _____ tahun dua ribu _____, Yang bertanda tangan dibawah ini :-----

Nama : RUSTAM
Tempang/tgl lahir : PADANG,01-01-1958
Jabatan : Manejer Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA)
AGRO FLORIS PRIMA
Alamat : RT 03/04 KEL.KOTO PANJANG

Dalam hal ini bertindak atas nama LKMA selaku pengelola pinjaman bergulir dana PUAP dari Gapoktan **AGRO FLORIS PRIMA** Kelurahan Lubuk Minturun Sungai Lareh.

Sebagai Pihak Pertama. -----

Nama :
Umur :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak sebagai Pihak Kedua.-----

Para pihak dalam kedudukannya tersebut diatas dengan ini menyatakan bahwa:-----

Pihak Pertama telah memberikan Pinjaman Bergulir Dana PUAP kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menyatakan pula telah menerima uang pinjaman bergulir dari kepada Pihak Pertama.-----

Para Pihak telah setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian meminjam dengan ketentuan-ketentuan dan syarat sebagai berikut :-----

PASAL 1

Pihak Pertama telah memberikan pinjaman bergulir dana PUAP kepada Pihak Kedua seluruhnya berjumlah sebesar Pokok Pinjam RP. _____ (Rupiah)

PASAL 2

1. Pinjaman yang diterima oleh pihak kedua akan dipergunakan untuk kegiatan usaha pertanian dalam rangka meningkatkan pendapatan dan mutu kehidupan keluarga tani,-----
2. Pihak Pertama berkewajiban mendampingi Pihak Kedua secara berkelompok agar dapat menggunakan dana pinjaman bergulir untuk mengembangkan usaha pertaniannya, meningkatkan mutu kehidupan keluarga dan memperbaiki pengaturan keuangan rumah tangga. Dengan demikian, dana pinjaman bergulir dapat dibayar kembali secara lancar sambil tetap memberikan manfaat yang setinggi-tingginya bagi kemajuan ekonomi dan perkembangan seluruh anggota keluarga

PASAL 3

Atas pinjaman tersebut dikenakan jasa 1,5 % tetap per- bulan dihitung dari pokok pinjaman mula mula

PASAL 4

1. Seluruh Pinjaman akan dibayarkan kembali dalam jangka waktu paling lama 10(sepuluh) bulan, terhitung mulai tanggal _____ sampai dengan tanggal _____, dengan cara ansuran setiap bulannya, Baik pokok maupun jasa pinjaman yaitu pokok pinjaman setiap bulan sebesar (_____) ditambah jasa pinjaman setiap bulan (_____), **pada setiap tanggal _____**, selambat-lambatnya **sampai tanggal....**, sampai pinjaman tersebut lunas.
2. Pihak Kedua diwajibkan untuk membayar ansuran pinjaman secara lancar sesuai jadwal yang telah ditentukan, sebagai cerminan ketaatan hukum dan karakter yang baik dari pihak kedua.
3. Apabila pihak kedua melakukan pembayaran angsuran dalam jumlah dan waktu yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, maka pembayaran Pihak Kedua akan diperhitungkan dengan urutan sebagai berikut:
pembayaran kewajiban jasa: _____ tambah denda keterlambatan _____,
pembayaran tunggakan pokok: _____, dan baru kemudian kewajiban **pembayaran pokok dan jasa untuk bulan yang berjalan.-----**

4. Pihak Kedua diharuskan menabung secara teratur di lembaga keuangan baik secara individu maupun kelompok, dimana tabungan tersebut juga dapat berfungsi sebagai jaminan tunai apabila ternyata terjadi keterlambatan pembayaran angsuran dari jadwal yang telah disepakati . Buku tabungan pihak kedua diserahkan kepada pihak pertama disertai surat kuasa dari pihak kedua kepada pihak pertama untuk menarik sebagian atau seluruh saldo tabungan tersebut dari lembaga keuangan pengelola tabungan tersebut untuk membayar keterlambatan angsuran pinjaman Pihak Kedua.-----

PASAL 5

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan hak serta kewajiban yang timbul atas perjanjian pinjam-meminjam ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai kata sepakat. Apabila tidak dapat dicapai kata sepakat, maka kedua belah pihak setuju akan diselesaikan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Padang .

Demikianlah perjanjian pinjam-meminjam ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga, masing-masing pihak telah membubuhkan tanda tangan dalam surat perjanjian ini.

Lubuk Minturun Sungai Lareh ,

2011

Pihak Pertama

Pihak Kedua

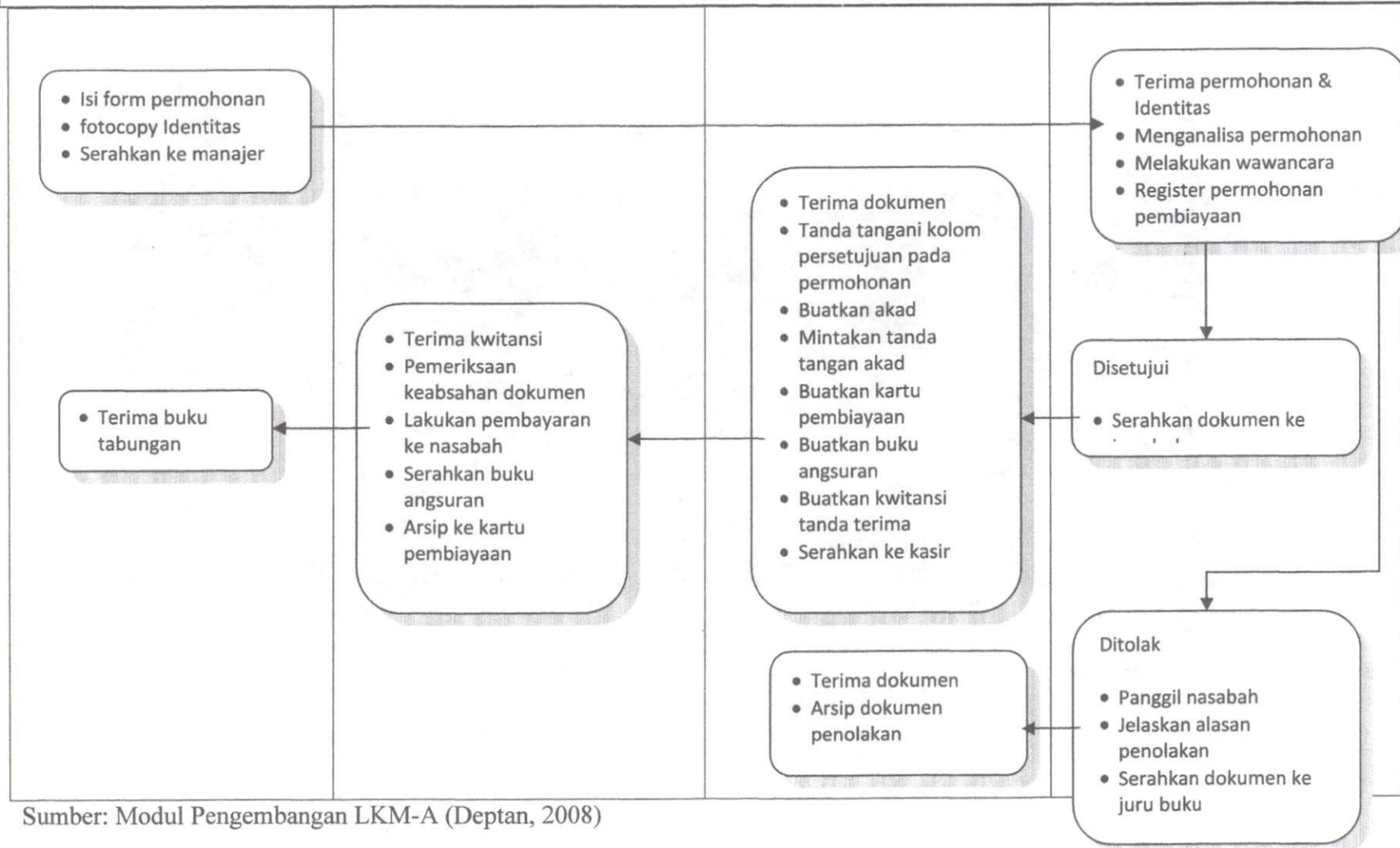
Materai.6000

(RUSTAM)

(_____)

Manejer LKMA Agro Floris Prima

Lampiran 12. Prosedur permohonan dan pencairan dana pinjaman di LKM-A



Sumber: Modul Pengembangan LKM-A (Deptan, 2008)

Lampiran 13. Perbandingan Bunga LKM-A dengan Bunga Bank Umum

Petani	Jumlah Pinjaman LKM-A	Bunga LKM-A 1,5 % / Bulan			Bunga Bank 4 % 4 Bulan (Rp)
		Lama Meminjam (Bulan)	Bunga (%)	Total Bunga (Rp)	
1	1.200.000	4	6	72000	48000
2	1.200.000	4	6	72000	48000
3	1.600.000	4	6	108000	64000
4	1.700.000	6	9	76500	68000
5	3.500.000	6	9	315000	140000
6	2.000.000	6	9	120000	80000
7	500.000	4	6	30000	20000
8	800.000	4	6	60000	32000
9	1.600.000	4	6	96000	64000
10	800.000	5	7,5	48000	32000
11	1.500.000	4	6	90000	60000
12	1.400.000	6	9	84000	56000
13	2.000.000	6	9	180000	80000
14	1.500.000	4	6	90000	60000
15	1.100.000	4	6	82500	44000
16	1.600.000	4	6	144000	64000
17	2.200.000	8	12	198000	88000
18	500.000	4	6	22500	20000
19	1.600.000	4	6	72000	64000
20	1.500.000	4	6	90000	60000
21	1.700.000	6	9	153000	68000
22	1.300.000	4	6	58500	52000
23	2.700.000	6	9	243000	108000
24	4.500.000	6	9	405000	180000
25	2.000.000	6	9	120000	80000
26	4.200.000	8	12	441000	168000
27	2.000.000	6	9	180000	80000
28	5.000.000	6	9	525000	200000
29	900.000	4	6	54000	36000
30	1.400.000	6	9	105000	56000

Lampiran 14. Sumber Permodalan Petani Responden Dalam Melaksanakan Usahatani Padi Sawah

Petani	Pinjaman Dari LKM-A (Rp)	Pinjaman Dari Rentenir (Rp)	Modal Sendiri (Rp)
1	1.200.000	-	500.000
2	1.200.000	400.000	-
3	1.600.000	-	-
4	1.700.000	-	-
5	3.500.000	-	250.000
6	2.000.000	-	-
7	500.000	-	250.000
8	800.000	-	250.000
9	1.600.000	-	-
10	800.000	350.000	-
11	1.500.000	-	-
12	1.400.000	-	-
13	2.000.000	200.000	-
14	1.500.000	-	-
15	1.100.000	-	200.000
16	1.600.000	-	-
17	2.200.000	300.000	-
18	500.000	-	200.000
19	1.600.000	-	-
20	1.500.000	-	-
21	1.700.000	-	-
22	1.300.000	250.000	-
23	2.700.000	300.000	-
24	4.500.000	700.000	-
25	2.000.000	-	-
26	4.200.000	-	-
27	2.000.000	-	-
28	5.000.000	350.000	-
29	900.000	-	-
30	1.400.000	-	-
Jumlah	55.500.000	2.800.000	1.650.000
Rata-rata	1.850.000	350.000	275.000

Lampiran 15. Identitas Responden Petani Padi Sawah

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur (Tahun)	Pendidikan	Luas Lahan (Ha)	Status Lahan	Pengalaman Bertani (Tahun)	Jumlah Tanggungan (Orang)	Sumber Modal Sebelumnya	Jumlah Pinjaman LKM-A (Rp)
1	Arifindal	L	60	SMP	0,5	Milik	42	5	Sendiri	1.200.000
2	Nazir	L	42	SMA	0,5	Milik	20	3	Rentenir	1.200.000
3	Wardi	L	37	SD	0,5	Sewa	18	2	Rentenir	1.600.000
4	Neni	P	28	SD	0,5	Sewa	3	3	Rentenir	1.700.000
5	Oslinda	P	30	SMP	1,5	Milik	5	3	Sendiri	3.500.000
6	Rian	L	32	SMP	0,7	Milik	7	2	Rentenir	2.000.000
7	Dodi	L	34	SMP	0,25	Milik	8	4	Sendiri	500.000
8	Dini	P	45	SMA	0,3	Milik	16	3	Sendiri	800.000
9	Kamal	L	61	SMP	0,5	Sewa	33	7	Rentenir	1.600.000
10	Johan	L	57	SMP	0,4	Milik	30	3	Rentenir	800.000
11	Karni	P	65	SMP	0,5	Milik	40	4	Rentenir	1.500.000
12	Firman	L	54	SD	0,5	Sewa	30	6	Rentenir	1.400.000
13	Yanti	P	33	SMA	0,8	Milik	6	3	Rentenir	2.000.000
14	Imun	P	35	SD	0,5	Sewa	9	2	Rentenir	1.500.000
15	Teti	P	29	SD	0,5	Milik	3	3	Sendiri	1.100.000
16	Upik	P	37	SD	0,5	Milik	9	4	Rentenir	1.600.000
17	Adang	L	47	SMA	1	Sewa	19	5	Rentenir	2.200.000
18	Ida	P	32	SD	0,25	Milik	5	2	Sendiri	500.000
19	Afdal	L	29	SD	0,5	Sewa	4	3	Rentenir	1.600.000
20	Fahrul	L	39	SMA	0,5	Milik	13	3	Rentenir	1.500.000
21	Siti	P	31	SMA	0,5	Sewa	4	2	Rentenir	1.700.000
22	Saparudin	L	45	SMP	0,6	Milik	15	2	Rentenir	1.300.000
23	Zulkifli	L	35	SMA	1,2	Milik	13	2	Rentenir	2.700.000
24	Anto	P	50	SD	2	Sewa	30	6	Rentenir	4.500.000
25	Hendra	L	30	SD	0,5	Sewa	11	4	Sendiri	2.000.000
26	Suhardi	L	41	SD	1,5	Milik	17	5	Rentenir	4.200.000
27	Yosi	P	25	SMP	0,6	Milik	3	4	Sendiri	2.000.000
28	Yulidarman	L	48	SD	2	Sewa	14	3	Rentenir	5.000.000
29	Doni Riswandi	L	32	SI	0,4	Milik	7	-	Sendiri	900.000
30	Reza	L	33	SMP	0,6	Sewa	10	3	Rentenir	1.400.000

Lampiran 16. Penggunaan Pupuk Oleh Petani Padi Sawah Responden PUAP

Responden	Luas Lahan (Ha)		Pupuk Yang Digunakan				Harga Pupuk per Kg			Biaya Pembelian Pupuk			Total Biaya	Dana PUAP %
	Urea (Kg)	SP36 (Kg)	p.kandang (Kg)	Urea (Rp)	SP36 (Rp)	p.kandang (Kg)	Urea (Rp)	SP36 (Rp)	p.kandang (Kg)	Urea (Rp)	SP36 (Rp)	p.kandang (Kg)		
1	0,5	100	50	15	4.000	5.400	500	400.000	270.000	7.500	677.500	56,46		
2	0,5	100	50	12	4.000	5.400	500	400.000	270.000	6.000	676.000	56,33		
3	0,5	100	50	15	4.000	5.400	500	400.000	270.000	7.500	677.500	42,34		
4	0,5	100	50	10	4.000	5.400	500	400.000	270.000	5.000	675.000	39,70		
5	1,5	150	100	40	4.000	5.400	500	600.000	540.000	20.000	1.160.000	33,14		
6	0,7	120	60	15	4.000	5.400	500	480.000	324.000	7.500	811.500	40,57		
7	0,25	50	25	6	4.000	5.400	500	200.000	135.000	3.000	328.000	65,60		
8	0,3	70	30	12	4.000	5.400	500	280.000	162.000	6.000	448.000	56,00		
9	0,5	100	50	15	4.000	5.400	500	400.000	270.000	7.500	677.500	42,34		
10	0,4	80	45	10	4.000	5.400	500	320.000	243.000	5.000	568.000	71,00		
11	0,5	100	50	16	4.000	5.400	500	400.000	270.000	8.000	678.000	45,20		
12	0,5	60	30	15	4.000	5.400	500	240.000	162.000	7.500	409.500	29,25		
13	0,8	120	65	20	4.000	5.400	500	480.000	351.000	10.000	841.000	42,05		
14	0,5	90	50	12	4.000	5.400	500	360.000	270.000	6.000	636.000	42,40		
15	0,5	100	40	15	4.000	5.400	500	400.000	216.000	7.500	623.500	56,68		
16	0,5	100	50	13	4.000	5.400	500	400.000	270.000	6.500	676.500	42,28		
17	1	150	80	26	4.000	5.400	500	600.000	432.000	13.000	1.045.000	47,50		
18	0,25	50	25	15	4.000	5.400	500	200.000	135.000	7.500	342.500	68,50		
19	0,5	95	55	25	4.000	5.400	500	380.000	297.000	12.500	689.500	43,09		
20	0,5	100	55	10	4.000	5.400	500	400.000	297.000	5.000	702.000	46,80		
21	0,5	90	45	18	4.000	5.400	500	360.000	243.000	9.000	612.000	36,00		
22	0,6	110	60	25	4.000	5.400	500	440.000	324.000	12.500	776.500	59,73		

Lampiran 16. Lanjutan

Responden	Luas Lahan (Ha)	Pupuk Yang Digunakan			Harga Pupuk per Kg			Biaya Pembelian Pupuk			Total Biaya	Dana PUAP %
		Urea (Kg)	SP36 (Kg)	p.kandang (Kg)	Urea (Rp)	SP36 (Rp)	p.kandang (Kg)	Urea (Rp)	SP36 (Rp)	p.kandang (Kg)		
23	1,2	220	105	60	4.000	5.400	500	880.000	567.000	30.000	1.477.000	54,70
24	2	350	150	50	4.000	5.400	500	1.400.000	810.000	25.000	2.235.000	49,66
25	0,5	100	75	17	4.000	5.400	500	400.000	405.000	8.500	813.500	40,67
26	1,5	250	120	40	4.000	5.400	500	1.000.000	648.000	20.000	1.668.000	39,71
27	0,6	45	25	10	4.000	5.400	500	180.000	135.000	5.000	320.000	16,00
28	2	350	160	45	4.000	5.400	500	1.400.000	864.000	22.500	2.286.500	45,73
29	0,4	45	20	5	4.000	5.400	500	180.000	243.000	2.500	425.500	47,27
30	0,6	40	20	8	4.000	5.400	500	160.000	216.000	4.000	380.000	27,14
Jumlah	21,1	3.535	1.790	605				13.940.000	9.666.000	297.500	24.336.500	1.383,84
Rata-rata/Petani		117,83	59,66	20,16				464.666,66	322.200	9.916,66	811.216,66	46,13
Rata-rata/Ha		167,61	84,87	28,68				660.976,75	458.321,47	14.106,21	1.153.935,51	65,61

Lampiran 17. Penggunaan Obat-obatan oleh Petani Responden

Petani	Luas Lahan	Kebutuhan (Kaleng)	Harga Per Kaleng	Biaya Pestisida (Rp)	Dana PUAP %
1	0,5	0,5	20000	10000	0,83
2	0,5	0,5	20000	-	
3	0,5	0,5	20000	10000	0,62
4	0,5	0,5	20000	-	
5	1,5	1,5	20000	30000	0,85
6	0,7	0,7	20000	14000	0,70
7	0,25	0,25	20000	-	
8	0,3	0,3	20000	-	
9	0,5	0,5	20000	-	
10	0,4	0,4	20000	-	
11	0,5	0,5	20000	10000	0,66
12	0,5	0,5	20000	10000	0,71
13	0,8	0,8	20000	16000	0,80
14	0,5	0,5	20000	-	
15	0,5	0,5	20000	-	
16	0,5	0,5	20000	10000	0,62
17	1	1	20000	20000	0,91
18	0,25	0,25	20000	-	
19	0,5	0,5	20000	-	
20	0,5	0,5	20000	10000	0,66
21	0,5	0,5	20000	-	
22	0,6	0,6	20000	12000	0,92
23	1,2	1,2	20000	24000	0,88
24	2	2	20000	40000	0,88
25	0,5	0,5	20000	10000	0,50
26	1,5	1,5	20000	30000	0,71
27	0,6	0,6	20000	12000	0,60
28	2	2	20000	40000	0,80
29	0,4	0,4	20000	-	
30	0,6	0,6	20000	-	
Jumlah	21,1	21,1		308.000	12,65
Rata-rata/petani	0,703	0,703		18117,64	0,74
Rata-rata/Ha	1	1		35135,16	

Lampiran 18. Total Pembelian Saprodi Petani Responden

Petani	Pupuk (Rp)	Obat-obatan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Dana PUAP %
1	677.500	10000	687.500	57,29
2	676.000	-	676.000	56,33
3	677.500	10000	687.500	42,97
4	675.000	-	675.000	39,70
5	1.160.000	30000	1.190.000	34,00
6	811.500	14000	825.500	41,27
7	328.000	-	328.000	65,60
8	448.000	-	448.000	56,00
9	677.500	-	677.500	42,34
10	568.000	-	568.000	71,00
11	678.000	10000	688.000	45,86
12	409.500	10000	419.500	29,96
13	841.000	16000	857.000	42,85
14	636.000	-	636.000	42,40
15	623.500	-	623.500	56,68
16	676.500	10000	686.500	42,90
17	1.045.000	20000	1.065.000	48,41
18	342.500	-	342.500	68,50
19	689.500	-	689.500	43,09
20	702.000	10000	712.000	47,46
21	612.000	-	612.000	36,00
22	776.500	12000	788.500	60,65
23	1.477.000	24000	1.501.000	55,59
24	2.235.000	40000	2.275.000	50,55
25	813.500	10000	823.500	41,17
26	1.668.000	30000	1.698.000	40,42
27	320.000	12000	332.000	16,60
28	2.286.500	40000	2.326.500	46,53
29	425.500	-	425.500	47,27
30	380.000	-	380.000	27,14
Jumlah	24336500	308.000	24.644.500	1.396,61
Rata-rata/petani	811216,66	18117,64	821.483,33	46,87
Rata-rata/Ha	1153935,51		1.168.539,59	66,22

Lampiran 19. Biaya Bibit Petani Responden

Petani	Penggunaan Bibit (Kg)	Harga Bibit (Rp/Kg)	Total Biaya Bibit (Rp/Kg)	Dana PUAP %
1	10	4600	46000	3,83
2	10	4600	46000	3,83
3	15	4600	69000	4,31
4	10	4600	46000	2,70
5	32	4600	147200	4,20
6	18	4600	82800	4,14
7	5	4600	23000	4,60
8	8	4600	36800	4,60
9	10	4600	46000	2,87
10	10	4600	46000	5,75
11	10	4600	46000	3,06
12	15	4600	69000	4,92
13	20	4600	92000	4,60
14	10	4600	46000	3,06
15	15	4600	69000	6,27
16	15	4600	69000	4,31
17	25	4600	115000	5,22
18	8	4600	36800	7,36
19	17	4600	78200	4,88
20	15	4600	69000	4,60
21	15	4600	69000	4,05
22	15	4600	69000	5,30
23	30	4600	138000	5,11
24	50	4600	230000	5,11
25	15	4600	69000	3,45
26	35	4600	161000	3,83
27	20	4600	92000	4,60
28	50	4600	230000	4,60
29	10	4600	46000	5,11
30	20	4600	92000	6,57
Jumlah	528		2428800	136,93
Rata-rata/petani	17,6		80.960	4,56
Rata-rata/Ha	25,03		115.163,58	6,49

Lampiran 20. Penggunaan Tenaga Kerja Oleh Petani Responden Sesudah PUAP

Responden	Pengolahan Tanah		Pemupukan		Pengendalian HPT		Penyiangan		Panen		Biaya (Rp)	Total Biaya Tenaga Kerja		Dana PUAP untuk TKLK %
	TKDK	TKLK	TKDK	TKLK	TKDK	TKLK	TKDK	TKLK	TKDK	TKLK		TKDK (Rp)	TKLK (Rp)	
1	0	0	1	0	1	0	0	2	2	6	40.000	160.000	320.000	26,66
2	0	0	1	2	0	1	1	0	0	4	40.000	80.000	280.000	23,33
3	0	0	1	0	2	0	2	0	1	6	40.000	240.000	240.000	15,00,0
4	0	0	0	1	1	0	1	2	2	4	40.000	160.000	280.000	16,47
5	0	0	0	1	1	0	2	4	0	9	40.000	120.000	560.000	16,00
6	0	0	1	2	2	0	3	1	2	5	40.000	320.000	320.000	16,0
7	0	0	1	0	1	0	4	0	3	2	40.000	360.000	80.000	16,00
8	0	0	1	0	1	0	3	2	4	4	40.000	360.000	240.000	30,00
9	0	0	1	0	2	0	1	0	0	7	40.000	160.000	280.000	17,50
10	0	0	1	0	2	0	2	0	2	4	40.000	280.000	160.000	20,00
11	0	0	2	0	1	0	1	0	2	4	40.000	240.000	160.000	10,66
12	0	0	1	0	1	0	1	0	2	7	40.000	200.000	280.000	20,00
13	0	0	3	1	1	0	2	2	2	4	40.000	320.000	280.000	14,00
14	0	0	1	0	1	0	2	0	3	4	40.000	280.000	160.000	10,66
15	0	0	2	1	2	0	1	0	2	4	40.000	280.000	200.000	18,18
16	0	0	1	0	1	0	2	1	3	3	40.000	280.000	160.000	10,00
17	0	0	0	2	2	1	0	3	2	8	40.000	160.000	560.000	25,45
18	0	0	1	0	1	0	2	0	2	2	40.000	240.000	80.000	16,00
19	0	0	2	0	1	0	2	0	1	4	40.000	240.000	160.000	10,00
20	0	0	1	1	1	0	1	1	4	3	40.000	280.000	200.000	13,33
21	0	0	0	1	1	0	2	1	3	3	40.000	240.000	200.000	11,76

Lampiran 20. Lanjutan

Responden	Pengolahan Tanah		Pemupukan		Pengendalian HPT		Penyiangan		Panen		Biaya (Rp)	Total Biaya Tenaga Kerja		Dana PUAP untuk TKLK %
	TKDK	TKLK	TKDK	TKLK	TKDK	TKLK	TKDK	TKLK	TKDK	TKLK		TKDK (Rp)	TKLK (Rp)	
22	0	0	1	1	1	0	2	0	4	5	40.000	320.000	240.000	18,46
23	0	0	3	2	2	0	2	2	4	7	40.000	440.000	440.000	16,29
24	0	0	0	3	2	1	0	6	0	17	40.000	320.000	1.080.000	24,00
25	0	0	1	0	1	0	2	0	4	3	40.000	320.000	120.000	6,00
26	0	0	3	2	2	1	3	3	5	8	40.000	520.000	560.000	13,33
27	0	0	2	1	1	1	3	0	2	5	40.000	320.000	280.000	14,00
28	0	0	0	3	0	3	0	5	4	16	40.000	160.000	1.280.000	25,60
29	0	0	1	0	1	0	2	1	3	2	40.000	280.000	120.000	13,33
30	0	0	1	0	1	0	3	1	2	4	40.000	280.000	200.000	14,28
Jumlah												7.960.000	9.520.000	502,34
Rata-rata/petani												265.333,33	317.333,33	16,74
Rata-rata/Ha												377.430,06	451.389,76	23,82

Lampiran 21. Biaya Sewa Mesin Petani Responden

Petani	Biaya sewa mesin (Rp/Ha)	Biaya Mesin Tiap Petani (Rp)	Dana PUAP %
1	700000	350000	29,16
2	700000	350000	29,16
3	700000	350000	21,87
4	700000	350000	20,58
5	700000	1100000	31,43
6	700000	490.000	24,50
7	700000	175000	35,00
8	700000	210000	26,25
9	700000	350000	21,87
10	700000	300000	37,50
11	700000	350000	23,33
12	700000	350000	25,00
13	700000	600000	30,00
14	700000	350000	23,33
15	700000	350000	31,81
16	700000	350000	21,87
17	700000	750000	34,09
18	700000	175000	35,00
19	700000	350000	21,87
20	700000	350000	23,33
21	700000	350000	20,58
22	700000	450000	34,61
23	700000	900000	33,33
24	700000	1400000	31,11
25	700000	350000	17,50
26	700000	1125000	26,78
27	700000	450000	22,50
28	700000	1400000	28,00
29	700000	300000	33,33
30	700000	450000	32,14
Jumlah	12.885.000	15175000	826,92
Rata-rata/petani	429.500	505.833,33	27,56
Rata-rata/Ha	610.953,05	719.535,32	39,21

Lampiran 22. Biaya Pajak atas Lahan padi Sawah Petani Responden

Petani	Harga Pajak Tiap MT (Rp/ha)	Pajak (Rp/MT)	Dana PUAP %
1	6000	3000	0,25
2	6000	3000	0,25
3	6000	3000	0,18
4	6000	3000	0,17
5	6000	9000	0,25
6	6000	4200	0,21
7	6000	1500	0,30
8	6000	1800	0,22
9	6000	3000	0,18
10	6000	2400	0,30
11	6000	3000	0,20
12	6000	3000	0,21
13	6000	4800	0,24
14	6000	3000	0,20
15	6000	3000	0,27
16	6000	3000	0,18
17	6000	6000	0,27
18	6000	1500	0,30
19	6000	3000	0,18
20	6000	3000	0,20
21	6000	3000	0,17
22	6000	3600	0,27
23	6000	7200	0,26
24	6000	12000	0,26
25	6000	3000	0,15
26	6000	9000	0,21
27	6000	3600	0,18
28	6000	12000	0,24
29	6000	2400	0,26
30	6000	3600	0,25
Jumlah		132.600	6,91
Rata-rata/petani		4.420	0,23
Rata-rata/Ha		6.287,34	0,32

Lampiran 23. Total Biaya yang Dibayarkan Petani Responden

Petani	Saprodi (Rp)	Bibit (Rp)	TKLK (Rp)	Sewa Mesin (Rp)	Pajak (Rp)	Total (Rp)
1	687.500	46.000	320.000	350.000	3.000	1.406.500
2	676.000	46.000	280.000	350.000	3.000	1.355.000
3	687.500	69.000	240.000	350.000	3.000	1.349.500
4	675.000	46.000	280.000	350.000	3.000	1.354.000
5	1.190.000	147.200	560.000	1.100.000	9.000	3.006.200
6	825.500	82.800	320.000	490.000	4.200	1.722.500
7	328.000	23.000	80.000	175.000	1.500	607.500
8	448.000	36.800	240.000	210.000	1.800	936.600
9	677.500	46.000	280.000	350.000	3.000	1.356.500
10	568.000	46.000	160.000	300.000	2.400	1.076.400
11	688.000	46.000	160.000	350.000	3.000	1.247.000
12	419.500	69.000	280.000	350.000	3.000	1.121.500
13	857.000	92.000	280.000	600.000	4.800	1.833.800
14	636.000	46.000	160.000	350.000	3.000	1.195.000
15	623.500	69.000	200.000	350.000	3.000	1.245.500
16	686.500	69.000	160.000	350.000	3.000	1.268.500
17	1.065.000	115.000	560.000	750.000	6.000	2.496.000
18	342.500	36.800	80.000	175.000	1.500	635.800
19	689.500	78.200	160.000	350.000	3.000	1.280.700
20	712.000	69.000	200.000	350.000	3.000	1.334.000
21	612.000	69.000	200.000	350.000	3.000	1.234.000
22	788.500	69.000	240.000	450.000	3.600	1.551.100
23	1.501.000	138.000	440.000	900.000	7.200	2.979.000
24	2.275.000	230.000	1.080.000	1.400.000	12.000	4.997.000
25	823.500	69.000	120.000	350.000	3.000	1.365.500
26	1.698.000	161.000	560.000	1.125.000	9.000	3.553.000
27	332.000	92.000	280.000	450.000	3.600	1.157.600
28	2.326.500	230.000	1.280.000	1.400.000	12.000	5.248.500
29	425.500	46.000	120.000	300.000	2.400	893.900
30	380.000	92.000	200.000	450.000	3.600	1.125.600
Jumlah	24.644.500	2428800	9.520.000	15.175.000	132.600	51.933.700
Rata-Rata /petani	821.483,33	80.960	317.333,33	505.833,33	4.420	1.731.123,33
Rata-Rata /Ha	1168539,59	115163,58	451.389,76	719.535,32	6.287,34	2.462.479,84

Lampiran 23. Total Biaya yang Dibayarkan Petani Responden

Petani	Saprodi (Rp)	Bibit (Rp)	TKLK (Rp)	Sewa Mesin (Rp)	Pajak (Rp)	Total (Rp)
1	687.500	46.000	320.000	350.000	3.000	1.406.500
2	676.000	46.000	280.000	350.000	3.000	1.355.000
3	687.500	69.000	240.000	350.000	3.000	1.349.500
4	675.000	46.000	280.000	350.000	3.000	1.354.000
5	1.190.000	147.200	560.000	1.100.000	9.000	3.006.200
6	825.500	82.800	320.000	490.000	4.200	1.722.500
7	328.000	23.000	80.000	175.000	1.500	607.500
8	448.000	36.800	240.000	210.000	1.800	936.600
9	677.500	46.000	280.000	350.000	3.000	1.356.500
10	568.000	46.000	160.000	300.000	2.400	1.076.400
11	688.000	46.000	160.000	350.000	3.000	1.247.000
12	419.500	69.000	280.000	350.000	3.000	1.121.500
13	857.000	92.000	280.000	600.000	4.800	1.833.800
14	636.000	46.000	160.000	350.000	3.000	1.195.000
15	623.500	69.000	200.000	350.000	3.000	1.245.500
16	686.500	69.000	160.000	350.000	3.000	1.268.500
17	1.065.000	115.000	560.000	750.000	6.000	2.496.000
18	342.500	36.800	80.000	175.000	1.500	635.800
19	689.500	78.200	160.000	350.000	3.000	1.280.700
20	712.000	69.000	200.000	350.000	3.000	1.334.000
21	612.000	69.000	200.000	350.000	3.000	1.234.000
22	788.500	69.000	240.000	450.000	3.600	1.551.100
23	1.501.000	138.000	440.000	900.000	7.200	2.979.000
24	2.275.000	230.000	1.080.000	1.400.000	12.000	4.997.000
25	823.500	69.000	120.000	350.000	3.000	1.365.500
26	1.698.000	161.000	560.000	1.125.000	9.000	3.553.000
27	332.000	92.000	280.000	450.000	3.600	1.157.600
28	2.326.500	230.000	1.280.000	1.400.000	12.000	5.248.500
29	425.500	46.000	120.000	300.000	2.400	893.900
30	380.000	92.000	200.000	450.000	3.600	1.125.600
Jumlah	24.644.500	2428800	9.520.000	15.175.000	132.600	51.933.700
Rata-Rata /petani	821.483,33	80.960	317.333,33	505.833,33	4.420	1.731.123,33
Rata-Rata /Ha	1168539,59	115163,58	451.389,76	719.535,32	6.287,34	2.462.479,84

Lampiran 24. Produksi Padi Petani Responden

Petani	Luas Lahan	Pinjaman Dari LKM-A (Rp)	Produksi (Kg)
1	0,5	1.200.000	1.400
2	0,5	1.200.000	1.500
3	0,5	1.600.000	1.500
4	0,5	1.700.000	1.440
5	1,5	3.500.000	4.500
6	0,7	2.000.000	1.800
7	0,25	500.000	700
8	0,3	800.000	900
9	0,5	1.600.000	1.600
10	0,4	800.000	1.000
11	0,5	1.500.000	1.500
12	0,5	1.400.000	1.600
13	0,8	2.000.000	2.000
14	0,5	1.500.000	1.600
15	0,5	1.100.000	1.500
16	0,5	1.600.000	1.600
17	1	2.200.000	3.000
18	0,25	500.000	750
19	0,5	1.600.000	1.550
20	0,5	1.500.000	1.550
21	0,5	1.700.000	1.640
22	0,6	1.300.000	1.800
23	1,2	2.700.000	3.700
24	2	4.500.000	6.000
25	0,5	2.000.000	1.560
26	1,5	4.200.000	4.600
27	0,6	2.000.000	1.800
28	2	5.000.000	6.100
29	0,4	900.000	1.400
30	0,6	1.400.000	1.700
Jumlah	21,1	55.500.000	63.290
Rata-rata/Petani	0,703	1.850.000	2.109,67
Rata-Rata/Ha	1		3.000,94

Lampiran 25. Rekomendasi Pemakaian Input dan Standar Produksi Usahatani Padi Sawah Di Wilayah Penelitian

Rekomendasi Pemakaian Input dan Produksi Usahatani Padi Sawah Per Ha		
No	Variabel	Standar /Ha
1	Pupuk a. Urea b. SP36 c. Pupuk Kandang	250 - 300 kg 75 - 100 kg 200 - 250 kg
3	Bibit	25 – 30 kg(IR 42)
4	Produksi	4.000 kg

Sumber : Penyuluh Pendamping Lapangan (PPL) Kelurahan Lubuk Minturun

Lampiran 26. Persentase Kontribusi Jumlah Kredit BLM-PUAP Petani Padi Sawah yang Harus Dibayarkan Untuk Kegiatan Usahatani

Petani	Jumlah Pinjaman LKM-A (Rp)	Biaya Yang Dibayarkan Untuk Usahatani	Kontribusi Kredit (%)	Kecukupan Jumlah Kredit
1	1.200.000	1.406.500	85,31	Tidak Cukup
2	1.200.000	1.355.000	88,56	Tidak Cukup
3	1.600.000	1.349.500	100,00	Cukup
4	1.700.000	1.354.000	100,00	Cukup
5	3.500.000	3.006.200	100,00	Cukup
6	2.000.000	1.722.500	100,00	Cukup
7	500.000	607.500	82,30	Tidak Cukup
8	800.000	936.600	85,41	Tidak Cukup
9	1.600.000	1.356.500	100,00	Cukup
10	800.000	1.076.400	74,32	Tidak Cukup
11	1.500.000	1.247.000	100,00	Cukup
12	1.400.000	1.121.500	100,00	Cukup
13	2.000.000	1.833.800	100,00	Cukup
14	1.500.000	1.195.000	100,00	Cukup
15	1.100.000	1.245.500	88,31	Tidak Cukup
16	1.600.000	1.268.500	100,00	Cukup
17	2.200.000	2.496.000	88,14	Tidak Cukup
18	500.000	635.800	78,64	Tidak Cukup
19	1.600.000	1.280.700	100,00	Cukup
20	1.500.000	1.334.000	100,00	Cukup
21	1.700.000	1.234.000	100,00	Cukup
22	1.300.000	1.551.100	83,81	Tidak Cukup
23	2.700.000	2.979.000	90,63	Tidak Cukup
24	4.500.000	4.997.000	90,05	Tidak Cukup
25	2.000.000	1.365.500	100,00	Cukup
26	4.200.000	3.553.000	100,00	Cukup
27	2.000.000	1.157.600	100,00	Cukup
28	5.000.000	5.248.500	95,26	Tidak Cukup
29	900.000	893.900	100,00	Cukup
30	1.400.000	1.125.600	100,00	Cukup
Jumlah		51.933.700	2.830,74	
Rata-rata		1.731.123,33	94,35	

Lampiran 27. Penggunaan Dana Kredit oleh Responden

Responden	Penggunaan Kredit (Rp)								
	Pupuk	Obat-obatan	Bibit	Tenaga Kerja	Mesin	Pajak	Konsumsi	Biaya Pendidikan	Biaya Lain-lain
1	341.000	10.000	46.000	270.000	330.000	3.000	200.000	-	-
2	460.000	-	46.000	240.000	300.000	3.000	150.000	-	-
3	585.000	10.000	60.000	240.000	350.000	3.000	200.000	150.000	-
4	750.000	-	46.000	300.000	350.000	3.000	-	-	-
5	1.100.000	30.000	150.000	550.000	1.100.000	9.000	250.000	-	300.000
6	800.000	40.000	70.000	350.000	500.000	4.200	-	-	-
7	220.000	-	23.000	80.000	170.000	1.500	-	-	-
8	380.000	-	36.800	180.000	200.000	1.800	-	-	-
9	700.000	-	46.000	300.000	350.000	3.000	-	125.000	-
10	400.000	-	46.000	150.000	200.000	2.400	-	-	-
11	700.000	10.000	46.000	160.000	350.000	3.000	-	220.000	-
12	600.000	10.000	65.000	300.000	350.000	3.000	-	-	-
13	800.000	16.000	90.000	280.000	600.000	5.000	-	-	200.000
14	700.000	-	46.000	200.000	350.000	3.000	150.000	-	-
15	550.000	-	70.000	175.000	300.000	3.000	-	-	-
16	700.000	10.000	70.000	200.000	350.000	3.000	250.000	-	-
17	900.000	20.000	100.000	500.000	650.000	6.000	-	-	-
18	250.000	-	30.000	70.000	150.000	1.500	-	-	-
19	700.000	-	75.000	150.000	350.000	3.000	-	300.000	-
20	700.000	10.000	75.000	250.000	350.000	3.000	-	-	-
21	620.000	-	75.000	300.000	350.000	3.000	350.000	-	-
22	600.000	12.000	70.000	200.000	400.000	3.600	-	-	-
23	1.200.000	24.000	140.000	450.000	880.000	72.000	-	-	-
24	2.000.000	40.000	220.000	800.000	1.200.000	12.000	200.000	-	-
25	700.000	10.000	70.000	200.000	350.000	3.000	300.000	-	250.000
26	2.000.000	30.000	160.000	550.000	1.200.000	9.000	250.000	-	-
27	400.000	12.000	100.000	300.000	600.000	3.600	250.000	100.000	-
28	2.200.000	40.000	200.000	1.170.000	1.350.000	12.000	-	-	-
29	420.000	-	45.000	130.000	300.000	2.400	-	-	-
30	430.000	-	100.000	350.000	500.000	3.600	-	-	-
Jumlah	22.906.000	334.000	2.416.800	9.395.000	14.780.000	191.600	2.550.000	895.000	750.000
Rata-Rata	763.533,33	19.647,06	80.560	313.166,7	492.666,67	6.386,66	231.818,2	179.000	250.000
Persentase Penggunaan Kredit(%)	41,27	0,83	4,35	16,93	26,63	0,34	10,2	10,78	10

Lampiran 28. Waktu Pencairan Kredit BLM-PUAP Petani Padi Sawah di LKM-A Agro Floris Prima

Petani	Luas Lahan (Ha)	Jumlah Pinjaman LKMA	Waktu Pencairan Pinjaman
1	0,50	1.200.000	3
2	0,50	1.200.000	2
3	0,50	1.600.000	7
4	0,50	1.700.000	7
5	1,50	3.500.000	20
6	0,70	2.000.000	6
7	0,25	500.000	2
8	0,30	800.000	5
9	0,50	1.600.000	7
10	0,40	800.000	15
11	0,50	1.500.000	15
12	0,50	1.400.000	12
13	0,80	2.000.000	8
14	0,50	1.500.000	12
15	0,50	1.100.000	5
16	0,50	1.600.000	6
17	1,00	2.200.000	2
18	0,25	500.000	2
19	0,50	1.600.000	7
20	0,50	1.500.000	7
21	0,50	1.700.000	14
22	0,60	1.300.000	20
23	1,20	2.700.000	14
24	2,00	4.500.000	21
25	0,50	2.000.000	5
26	1,50	4.200.000	7
27	0,60	2.000.000	12
28	2,00	5.000.000	21
29	0,40	900.000	20
30	0,60	1.400.000	25
Jumlah	21,10	55.500.000	309
Rata-rata per petani	0,703	1.850.000	10,3
Rata-rata per Ha	1	2631578,94	14,65

Lampiran 29. Cara Pembayaran Kredit dari LKM-A oleh Petani Responden

Petani	Jumlah Pinjaman LKM-A	Frekuensi Pembayaran (Cicilan)	Jangka Waktu Pelunasan	Mulai Pembayaran (Bulan)	Bunga/Bulan (Rp)	Total Bunga (Rp)	Total Pengembalian (Rp)
1	1.200.000	1	4	4	18.000	72.000	1.272.000
2	1.200.000	4	6	2	18.000	108.000	1.308.000
3	1.600.000	1	3	3	24.000	72.000	1.672.000
4	1.700.000	1	3	3	25.500	76.500	1.776.500
5	3.500.000	3	6	3	52.500	315.000	3.815.000
6	2.000.000	1	4	3	30.000	120.000	2.120.000
7	500.000	1	4	4	7.500	30.000	530.000
8	800.000	1	5	4	12.000	60.000	860.000
9	1.600.000	1	4	4	24.000	96.000	1.696.000
10	800.000	1	4	4	12.000	48.000	848.000
11	1.500.000	1	4	4	22.500	90.000	1.590.000
12	1.400.000	3	4	2	21.000	84.000	1.584.000
13	2.000.000	4	6	3	30.000	180.000	2.180.000
14	1.500.000	1	4	4	22.500	90.000	1.590.000
15	1.100.000	1	5	4	16.500	82.500	1.182.500
16	1.600.000	4	6	3	24.000	144.000	1.744.000
17	2.200.000	3	6	4	33.000	198.000	2.398.000
18	500.000	1	3	3	7.500	22.500	522.500
19	1.600.000	1	3	3	24.000	72.000	1.672.000
20	1.500.000	2	4	3	22.500	90.000	1.590.000
21	1.700.000	4	6	3	25.500	153.000	1.853.000
22	1.300.000	1	3	3	19.500	58.500	1.358.500
23	2.700.000	3	6	3	40.500	243.000	2.943.000
24	4.500.000	4	6	3	67.500	405.000	4.905.000
25	2.000.000	1	4	4	30.000	120.000	2.120.000
26	4.200.000	5	7	3	63.000	441.000	4.641.000
27	2.000.000	3	6	4	30.000	180.000	2.180.000
28	5.000.000	5	7	3	75.000	525.000	5.525.000
29	900.000	1	4	4	13.500	54.000	954.000
30	1.400.000	1	5	5	21.000	105.000	1.505.000
Jumlah	55500000	64	142	102	832500	4335000	59935000
Rata-Rata	1850000	2,13	4,73	3,4	27750	144500	1997833,3

Lampiran 30. Matriks Data Set Penelitian

Tujuan	Variabel/topik data	Indikator	Data dan Sumber data	Alat Ukur	Analisis data	Teknik pengumpulan data
1	2	3	4	5	6	7
1. Mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan simpan pinjam BLM-PUAP oleh LKM-A Agro Floris Prima	1. Profil LKMA Agro Floris Prima	a. Gambaran umum wilayah kerja LKM-A Agro Floris Prima b. Sejarah dan Tujuan berdiri c. Organisasi d. Permodalan e. Keanggotaan f. Usaha dan perkembangannya.	Data primer dan Sekunder dari Gapoktan Agro Floris dan LKM-A Agro Floris Prima,serta penyuluh pendamping.	Profil Gapoktan dan Juknis PUAP 2008	Deskriptif kualitatif	Wawancara dengan key informan, studi kepustakaan (laporan buku profil dll)
	2. Pelaksanaan simpan pinjam dana BLM-PUAP di LKM-A Agro Floris Prima	a. Penetapan prosedur dan persyaratan simpan pinjam b. Penetapan bunga pinjaman c. Pelaksanaan Simpan Pinjam d. Rencana dan realisasi pencairan dan Penggunaan dana PUAP e. Hambatan Pelaksanaan Simpan Pinjam BLM-PUAP f. Pencatatan dan pelaporan keuangan oleh LKM-A	Data primer dan Sekunder dari Pengurus Gapoktan Agro Floris dan LKM-A Agro Floris Prima		Deskriptif kualitatif	Wawancara dengan key informan dan data laporan pelaksanaan dana PUAP di LKM-A Agro Floris Prima

1	2	3	4	5	6	7
<p>2. Menganalisis manfaat PUAP yang dilaksanakan LKM-A bagi aktivitas usahatani padi sawah petani anggota.</p>	<p>Manfaat BLM-PUAP bagi aktivitas usahatani padi sawah anggota</p>	<p>Daya guna kredit BLM-PUAP bagi aktivitas usahatani padi sawah petani anggota Gapoktan Agro Floris, dilihat dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan dana kredit • Waktu pemberian kredit • Jumlah kredit yang diberikan 	<p>Data primer</p>		<p>Deskriptif kualitatif</p>	<p>Kuitisioner untuk responden (anggota LKM-A), studi kepustakaan (laporan buku profil dll)</p>